

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DISPERINDAG ESDM KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION ON TRADITIONAL MARKET
MANAGEMENT POLICY TOWARDS THE SPECIFIC TECHNICAL UNIT OF
EMPLOYEES' PERFORMANCE TO ACHIEVE THE EFFECTIVITY OF
TRADITIONAL MARKET MANAGEMENT CONDUCTED IN SPECIFIC
TECHNICAL UNIT OF INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT, GARUT
REGENCY***

T E S I S

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Program Pascasarjana Universitas Garut

Oleh:
YUDI WAHYUDI
NPM 24091116026



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS GARUT
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DISPERINDAG ESDM KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION ON TRADITIONAL MARKET
MANAGEMENT POLICY TOWARDS THE SPECIFIC TECHNICAL UNIT OF
EMPLOYEES' PERFORMANCE TO ACHIEVE THE EFFECTIVITY OF
TRADITIONAL MARKET MANAGEMENT CONDUCTED IN SPECIFIC
TECHNICAL UNIT OF INDUSTRY AND TRADE DEPARTMENT, GARUT
REGENCY***

**Oleh:
YUDI WAHYUDI
NPM 24091116026**

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Endang Soetari, Ad., MS

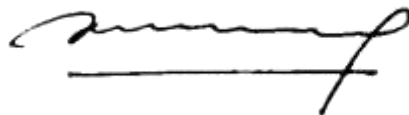
Pembimbing II



Dr. H. Doddy Hermana, M.Si

Mengetahui

**Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut**



Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “**Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag Esdm Kabupaten Garut**”, beserta isinya adalah karya saya sendiri tanpa ada di dalamnya bagian yang merupakan jiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di kalangan masyarakat ilmiah.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan saya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

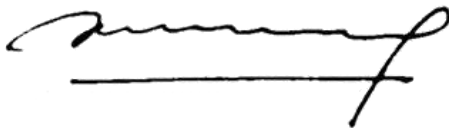
Garut, April 2018

Materai 6000

**YUDI WAHYUDI
NPM 24091116026**

Garut, April 2018

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
TESIS**

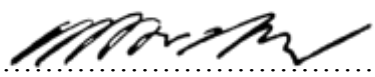
Nama : **YUDI WAHYUDI**
NPM : **24091116026**
Judul Tesis : **PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI UNIT
PELAKSANA TEKNIS UNTUK MEWUJUDKAN
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DISPERINDAG ESDM
KABUPATEN GARUT**

Telah melakukan perbaikan Tesis berdasarkan hasil Ujian Sidang Tesis pada:

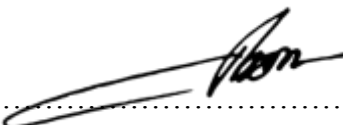
Hari : Sabtu
Tanggal : 24 Maret 2018

Menyetujui atas perbaikan Tesis tersebut:
Komisi Pembimbing,

Prof. Dr. H. Endang Soetari, Ad., MS.

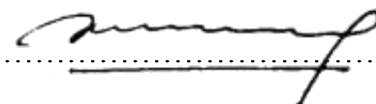
(..........)

Dr. H. Doddy Hermana, M.Si.


(..........)

Penguji,

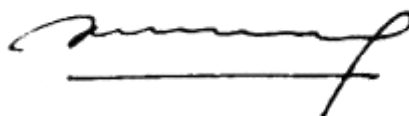
Prof. DR. H. Jusman Iskandar, M.S.

(..........)

DR. Gugun Geusan Akbar, M.Si.

(..........)

Mengetahui:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut,



Prof. DR. H. Jusman Iskandar, M.S.

ABSTRAK

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut

YUDI WAHYUDI, NPM: 24091116026

Program Pascasarjana Universitas Garut

Tesis, 2018, 5 Bab, 204 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan teknik survey. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperindag ESDM Kabupaten Garut sebanyak 155 orang yang terdiri dari pegawai PNS, TKK, dan TKS. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*).

Pengujian terhadap hipotesis utama menunjukkan hasil signifikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $79,2010 > 3,0560$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dengan nilai pengaruh relatif kuat sebesar 61,14% sedangkan pengaruh di luar variabel yang diteliti (*epsilon*) adalah sebesar 38,86%. Pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis sebesar 39,66% dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $10,0288 > 1,9758$. Kemudian variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebesar 14,35% dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $3,5489 > 1,9758$, dan variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebesar 46,80% dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,8657 > 1,9758$.

Temuan permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, yaitu: Komunikan (staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut) belum sepenuhnya dapat memahami kebijakan yang disampaikan, dan Komunikan (staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut) belum dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, yaitu: Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sepenuhnya dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung, dan Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan. Selanjutnya untuk variable

Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, yaitu: Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum direspon dengan baik, dan Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak.

Berdasarkan temuan-temuan permasalahan tersebut, peneliti menyarankan agar Pimpinan di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada seluruh staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut akan pentingnya memahami kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah, khususnya Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, Pimpinan membentuk tim yang bertugas memonitor/ mengawasi seluruh proses kinerja staf, agar Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis berjalan dengan optimal khususnya dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat. Kemudian, Pimpinan dan seluruh staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dapat terbuka terhadap situasi yang berkembang, baik yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Dengan transparansi yang terkontrol iklim organisasi di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut akan menjadi dinamis dan berimbas pada optimalisasi kinerja pegawai dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang menjadi salah satu tugas pokok UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Kata kunci: *Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat*

ABSTRACT

The Influence of Implementation on Traditional Market Management Policy Towards the Specific Tehnical Unit of Employees' Performance to Achieve the Effectivity of Traditional Market Management Conducted in Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut Regency

YUDI WAHYUDI, NPM: 24091116026

Postgraduate Program Universitas of Garut

Thesis, 2018, 5 Chapters, 204 pages

This study aimed at reporting the influence of Implementation on Traditional Market Management Policy towards the Specific Tehnical Unit Employees' Performance to Achieve the Traditional Market Management Efectivity Conducted in Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut Regency. The study employed descriptive analisis as the method through survey technique. In this study there were 155 respondents consisting of civil servant and non-civil servant employees worked in Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut regency. The Data analysis technique used to answer the hypothesis which was statistical analysis through path analysis model.

Testing the main hypothesis showed that the results significantly influenced at which the score of $F_{value} > F_{table}$ showed $79,2010 > 3,0560$, so that it could be concluded that the influence of Implementation on Traditional Market Management Policy significantly effected the Specific Tehnical Unit Employees' Performance to Achieve the Traditional Market Management Efectivity Conducted in Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut Regency. The influenced score was relatively high that showed 61,14%. Meanwhile, the influence of other uninvestigated variable (epsilon) were 38,86%. In addition, testing on sub-hypothesis showed that the variable of Implementation of Traditional Market Management Policy had significantly influenced Specific Tehnical Unit Employees' Performance variable that reached 39,66%, at which $t_{value} > t_{table}$ showed $10,0288 > 1,9758$. Then, the variable of Implementation of Traditional Market Management Policy had insignificantly influenced the Traditional Market Management Efectivity that showed 14,35%, at which $t_{value} > t_{tabel}$ was $3,5489 > 1,9758$. Moreover, the Specific Tehnical Unit Employees' Performance variable had significantly influenced the Traditional Market Management Efectivity that showed 46,80%, at which $t_{value} > t_{tabel}$ that was $7,8657 > 1,9758$.

The findings of the problems showed that in terms of the variable of the Implementation on Traditional Market Management Policy, the problems indicated: Communicants have not fully understood the policy conveyed, and Communicants have not been able to implement the policy as expected. Moreover, in terms of the variable of the Specific Tehnical Unit Employees' Performance, the problems indicated: Monitoring at Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut Regency has not been fully implemented during the process of activity, and Monitoring at Specific Technical Unit of Industry and Trade Department, Garut Regency has not

been fully implemented by leader towards the employees. Furthermore, in terms of the variable of Traditional Market Management Effectivity, the problems indicated: The agency's response to external changes in each Specific Technical Unit (UPT) has not been well responded, and the agency's response to external changes in each Specific Technical Unit (UPT) has not been responded based on the results of the whole evaluations).

Based on the findings of the aforementioned problems, the researcher suggested that the Leaders of Specific Technical Unit (UPT) Industry and Trade Department, Garut regency provides the direction and understanding to the whole staffs due to the importance of understanding the policies conveyed by the Government, especially Traditional Market Management Policy. Furthermore, the Leaders should form a team to monitor/ supervise the entire staff's process of work performance, so that Specific Tehnical Unit Employees' Performance runs optimally, especially in implementing the Traditional Market Management Policy. In addition, Leaders and staffs can accept to the dynamic situation, both from internal and external circumstances. Through this transparency, the organizational climate will be dynamic and effect on optimizing the Specific Tehnical Unit Employees' Performance in realizing the Traditional Market Management Effectivity who become one of the main functions of Specific Technical Unit (UPT) of Industry and Trade Department, Garut Regency.

Keywords: *The implementation on Traditional Market Management Policy, the Specific Tehnical Unit of Employees' Performance, the Effectivity of Traditional Market Management*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Shalawat dan Sallam semoga selalu dilimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*. Atas rahmat dan karunia Allah, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS UNTUK MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PASAR RAKYAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DISPERINDAG ESDM KABUPATEN GARUT**“. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Garut.

Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan, sehingga penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan baik dari sisi penulisan maupun penggunaan bahasa. Untuk itu, peneliti mengharapkan nasihat, saran, dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak guna meningkatkan bobot Tesis ini. Karenanya peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Pertama, Rektor Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melanjutkan Program Studi Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Garut;

Kedua, Direktur Program Pascasarjana Universitas Garut yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penulisan Tesis ini;

Ketiga, Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. H. Endang Soetari, Ad., MS., selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Doddy Hermana, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembuatan penelitian ini sehingga banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada peneliti;

Keempat, seluruh Dosen Universitas Garut yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti proses perkuliahan yang sudah pasti telah banyak memberikan wawasan dan visi keilmuan kepada peneliti;

Kelima, seluruh Civitas Akademika Universitas Garut yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan;

Keenam, Kepala Disperindag Kabupaten Garut, serta Kepala UPT Disperindag dan Staf UPT Disperindag Kabupaten Garut yang telah memberikan izin dan dorongan moril kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Garut;

Ketujuh, Kepala UPT Disperindag dan Staf UPT Disperindag Kabupaten Garut yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian dengan memberikan data dan informasi untuk penyusunan penelitian ini;

Kedelapan, Orangtua, putera-puteri, dan isteri tercinta yang selalu mendoakan peneliti untuk segera menyelesaikan penyusunan penelitian ini, untuk segala cinta, dukungan dan energi yang tidak pernah habis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Kesembilan, rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Garut Angkatan ke-XXIII yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya yang diberikan;

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin

Garut, April 2018

Peneliti,

YUDI WAHYUDI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 15 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 16 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 31 |
| 2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Perekonomian dan Pengelolaan Pasar Rakyat | 33 |
| 2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu | 40 |
| 2.3 Relevansi Masalah Penelitian dengan Kajian Administrasi Negara .. | 47 |
| 2.4 Tinjauan Teoritik Variabel-Variabel Penelitian | 50 |

| | |
|--|-----|
| 2.4.1 Tinjauan Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat | 50 |
| 2.4.2 Tinjauan Tentang Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis | 60 |
| 2.4.3 Tinjauan Tentang Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat | 69 |
| 2.5 Hubungan konseptual antar variabel penelitian | 77 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 83 |
| 3.1 Metode yang Digunakan | 83 |
| 3.2 Variabel-variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian | 84 |
| 3.2.1 Variabel-Variabel Penelitian | 84 |
| 3.2.2 Paradigma Penelitian | 85 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel-variabel Penelitian | 87 |
| 3.4 Operasionalisasi Variabel-variabel Penelitian | 89 |
| 3.5 Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Realibilitas Alat Ukur Penelitian | 98 |
| 3.5.1 Alat Ukur Penelitian | 98 |
| 3.5.2 Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian | 99 |
| 3.5.3 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian | 106 |
| 3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Sampling | 110 |
| 3.7 Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Proses Pengumpulan Data | 111 |
| 3.7.1 Sumber dan Jenis Data | 111 |
| 3.7.2 Teknik Pengumpulan Data | 112 |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.7.3 | Proses Pengumpulan Data | 115 |
| 3.8 | Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengujian Hipotesis Penelitian | 116 |
| 3.8.1 | Teknik Pengolahan Data | 116 |
| 3.8.2 | Proses Transformasi Data | 117 |
| 3.8.3 | Teknik Analisis Data untuk Hipotesis Penelitian | 119 |
| 3.9 | Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-tahap Penelitian | 123 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | 125 |
| 4.1 | Gambaran Umum Objek Penelitian | 125 |
| 4.1.1 | Keadaan Permasalahan Pasar Rakyat(Tradisional)..... | 126 |
| 4.1.2 | Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat..... | 130 |
| 4.1.3 | Tugas Pokok dan Fungsi UPT Disperindag ESDM..... | 132 |
| 4.2 | Karakteristik Responden | 134 |
| 4.2.1 | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 134 |
| 4.2.2 | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 135 |
| 4.2.3 | Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja | 136 |
| 4.2.4 | Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan | 137 |
| 4.3 | Deskripsi Hasil Penelitian | 138 |
| 4.3.1 | Deskripsi Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat | 139 |
| 4.3.1.1 | Dimensi Komunikasi | 143 |
| 4.3.1.2 | Dimensi Sumber daya | 145 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 4.3.1.3 | Dimensi Disposisi | 148 |
| 4.3.1.4 | Dimensi Birokrasi | 150 |
| 4.3.2 | Deskripsi Variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis ... | 153 |
| 4.3.2.1 | Dimensi Motivasi | 157 |
| 4.3.2.2 | Dimensi Pembinaan | 159 |
| 4.3.2.3 | Dimensi Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja | 161 |
| 4.3.2.4 | Dimensi Akses Terhadap Sumber Informasi..... | 164 |
| 4.3.3 | Deskripsi Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat | 166 |
| 4.3.3.1 | Dimensi Produktivitas atau Produksi | 170 |
| 4.3.3.2 | Dimensi Efisiensi | 172 |
| 4.3.3.3 | Dimensi Kepuasan | 174 |
| 4.3.3.4 | Dimensi Adaptasi | 177 |
| 4.4 | Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian | 180 |
| 4.4.1 | Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z) | 181 |
| 4.4.2 | Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) | 186 |

| | | |
|--|---|-----|
| 4.4.3 | Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z) | 190 |
| 4.4.4 | Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z) | 192 |
| | | 196 |
| | | 196 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | | 200 |
| 5.1 | Kesimpulan | 204 |
| 5.2 | Saran | 207 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |
| LAMPIRAN 1 Alat Ukur Penelitian | | |
| LAMPIRAN 2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian | | |
| LAMPIRAN 3 Pengolahan dan Analisis Data | | |
| LAMPIRAN 4 SK Komisi Pembimbing | | |
| LAMPIRAN 5 Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian | | |
| LAMPIRAN 6 Daftar Riwayat Hidup | | |
| LAMPIRAN 7 Jurnal Publik | | |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-------|---|---------|
| Tabel | Data Pasar Rakyat (Tradisional) Di Kabupaten Garut | |
| 1.1 | Tahun 2016 - 2017 | 6 |
| Tabel | Data Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperindag | |
| 1.2 | Kabupaten Garut tahun 2016 – 2017 | 8 |
| Tabel | Laporan Realisasi PAD Bulan Desember 2016 | 11 |
| 1.3 | | |
| Tabel | Hirarki Perundangan | 13 |
| 1.4 | | |
| Tabel | Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian | 45 |
| 2.1 | Terdahulu | |
| Tabel | Operasionalisasi Variabel Penelitian | 89 |
| 3.1 | | |
| Tabel | Kategori dan Bobot Skor Jawaban | 99 |
| 3.2 | | |
| Tabel | Hasil Uji Validitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan | |
| 3.3 | Pengelolaan Pasar Rakyat) | 102 |

| | | |
|-------|--|-----|
| Tabel | Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kinerja Pegawai Unit | |
| 3.4 | Pelaksana Teknis) | 104 |
| Tabel | Hasil Uji Validitas Variabel Z (Efektivitas Pengelolaan | |
| 3.5 | Pasar Rakyat) | 105 |
| Tabel | Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan | |
| 3.6 | Pengelolaan Pasar Rakyat) | 108 |
| Tabel | Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Kinerja Pegawai Unit | |
| 3.7 | Pelaksana Teknis) | 109 |
| Tabel | Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z (Efektivitas Pengelolaan | |
| 3.8 | Pasar Rakyat) | 109 |
| Tabel | Populasi Penelitian | 110 |
| 3.9 | | |
| Tabel | Langkah –langkah dan Jadwal Waktu Penelitian | 124 |
| 3.10 | | |
| Tabel | Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 134 |
| 4.1 | | |
| Tabel | Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 135 |
| 4.2 | | |
| Tabel | Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja | 136 |
| 4.3 | | |
| Tabel | Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan .. | 137 |
| 4.4 | | |

| | | |
|-------|--|-----|
| Tabel | Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase | 139 |
| 4.5 | | |
| Tabel | Kriteria Penilaian Variabel Pelaksanaan Kebijakan | |
| 4.6 | Pengelolaan Pasar Rakyat | 139 |
| Tabel | Dimensi Komunikasi | 143 |
| 4.7 | | |
| Tabel | Dimensi Sumber daya | 146 |
| 4.8 | | |
| Tabel | Dimensi Disposisi | 148 |
| 4.9 | | |
| Tabel | Dimensi Birokrasi | 150 |
| 4.10 | | |
| Tabel | Kriteria Penilaian Variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana | |
| 4.11 | Teknis | 153 |
| Tabel | Dimensi Motivasi | 157 |
| 4.12 | | |
| Tabel | Dimensi Pembinaan | 159 |
| 4.13 | | |
| Tabel | Dimensi Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja | 162 |
| 4.14 | | |
| Tabel | Dimensi Akses Terhadap Sumber Informasi | 164 |
| 4.15 | | |

| | | |
|-------|---|-----|
| Tabel | Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar | |
| 4.16 | Rakyat | 167 |
| Tabel | Dimensi Produktivitas atau Produksi | 170 |
| 4.17 | | |
| Tabel | Dimensi Efisiensi | 172 |
| 4.18 | | |
| Tabel | Dimensi Kepuasan | 175 |
| 4.19 | | |
| Tabel | Dimensi Adaptasi | 177 |
| 4.20 | | |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 1.1 Model Penelitian | 28 |
| Gambar 3.1 Model Paradigma Penelitian | 85 |
| Gambar 4.1 Diagram Jalur | 180 |

BAB I

PENDAHULUN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang berkeadilan dan sejahtera. Witjaksono (2009) mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warga negara atau penduduk daerah setempat. Pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan yang diambil pemerintah guna mencapai tujuan ekonomi yang mencakup dalam pengendalian inflasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kesempatan kerja dapat diwujudkan salah satunya dalam pemanfaatan pasar sebagai tempat penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sehingga dalam pembangunan ekonomi, pasar dapat dikategorikan sebagai pusat pembangunan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Merujuk pada istilah pasar, pasar dapat difahami sebagai suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan transaksi jual beli barang dan jasa atau faktor-faktor produksi lainnya. Selain sebagai tempat transaksi jual beli, pasar mempunyai lima fungsi utama lainnya. Kelima fungsi tersebut menurut Sudarman (2009) adalah sebagai berikut:

1. Pasar menetapkan nilai (*sets value*)

Fungsi penetapan nilai, dalam ekonomi pasar merupakan suatu proses menentukan harga sesuai dengan ukuran nilainya.

2. Pasar mengorganisir produksi

Fungsi mengorganisir produksi merujuk pada adanya harga-harga produksi di pasar, yang kemudian mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang efisien.

3. Pasar mendistribusikan barang

Fungsi mendistribusikan barang merujuk pada kemampuan seseorang membeli barang tergantung pada penghasilannya.

4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (*rationing*)

Fungsi penyelenggaraan penjatahan merujuk pada penjatahan inti dari adanya harga.

5. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang

Fungsi ini merujuk pada daya tahan stok barang yang disimpan dan disiapkan guna didistribusikan di masa datang sehingga menghindari adanya kelangkaan barang.

Berdasarkan kelima fungsi pasar di atas, pada hakikatnya pasar mempunyai peranan yang urgen di bidang ekonomi yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya mutlak diperlukan suatu pengelolaan pasar yang efektif sehingga kelima fungsi pasar di atas dapat tercapai dengan optimal.

Merujuk pada efektifitas pengelolaan pasar yang optimal, menurut Rosjidi (dalam Iskandar 2017: 330) efektifitas pengelolaan suatu organisasi pemerintah pertama-tama harus dilihat dari sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang ada, dan apakah keduanya sesuai atau tidak dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila merujuk pada pendapat Rosjidi di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas pengelolaan pasar harus sesuai dengan peraturan serta perencanaan yang ada. Sehingga, pada tahun 2016 Pemerintah daerah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2016 tentang Penataan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Selanjutnya, Peraturan tersebut menetapkan bahwa pasar rakyat (tradisional) dibedakan berdasarkan kriteria: skala pelayanan masyarakat, pengelolaan pasar, dan sarana prasarana pasar. Adapun kriteria pengelolaan pasar rakyat tersebut dibedakan menjadi:

- a. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
- c. Pasar yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi.

Berdasarkan kriteria pengelolaan pasar di atas, pasar rakyat (tradisional) dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan minimal memiliki 150 (seratus lima puluh) kios, dengan struktur bangunan kios bersifat permanen; dan luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan. Dengan kriteria pengelolaan yang telah ditentukan di atas, Pemerintah daerah berharap hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pasar rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan potensi pasar rakyat. Adapun potensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Pasar rakyat dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya.
2. Berfungsi sebagai supplier untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas.
3. Pasar rakyat memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern.
4. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen.
5. Potensi pasar akan semakin penting karena *market turn over* cepat dengan sistem pembayaran tunai.

Fungsi – fungsi pasar rakyat di atas dapat diwujudkan secara optimal apabila efektivitas pengelolaan pasar rakyat dapat diwujudkan dengan optimal pula. Sehingga, semua pihak dapat diuntungkan, baik masyarakat sebagai konsumen, pedagang, petani, industri rumahan (home industry) atau pabrik sebagai produsen. Selanjutnya, fungsi pasar yang berhasil diimplementasikan dengan baik dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Harganya yang lebih murah dan bisa ditawar,
2. Dekat dengan pemukiman, dan
3. Memberikan banyak pilihan produk yang segar.

Akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan dan kondisi keumuman serta hasil kajian sementara tentang pasar rakyat khususnya yang berada di Kabupaten

Garut masih menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Sementara ini, pasar rakyat masih terkesan kumuh, kotor, becek, serta tidak teratur yang mana hal ini kemudian menjadi stigma buruk bagi keberadaan pasar rakyat itu sendiri. Melekatnya pandangan buruk pada pasar rakyat, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang relatif lebih mudah dijangkau (tidak perlu masuk ke dalam pasar). Namun demikian, sampai saat ini kebanyakan pasar rakyat masih memiliki pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja.

Di sisi lain, bagi para pengunjung yang tergolong pada segmen berpendapatan menengah ke atas sudah mulai cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan berbelanja. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pasar rakyat yang dalam perkembangannya mulai menjadi sepi, ditinggalkan oleh pengunjung atau pembeli yang beralih ke pasar modern. Stigma yang melekat pada pasar rakyat secara umum bukan hanya dilatarbelakangi oleh tempatnya yang kurang nyaman, akan tetapi juga oleh perilaku pedagang itu sendiri serta pengelolaanya.

Berikut adalah data pasar rakyat (tradisional) di Kabupaten Garut tahun 2016 - 2017:

Tabel 1.1
Data Pasar Rakyat (Tradisional) Di Kabupaten Garut Tahun 2016 - 2017

| No. | Nama Pasar | Kelurahan/ Desa | Tahun berdiri | Jumlah Kios/ Los/ PKL | Jumlah Pedagang |
|-----|------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
|-----|------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|

| | | | | | |
|----|------------------|------------------|------|-------|-------|
| 1 | Guntur | Haurpanggung | 1993 | 4.476 | 4.386 |
| 2 | Wanaraja | Wanamekar | 1982 | 1.013 | 761 |
| 3 | Cibatu | Keresek | 1990 | 486 | 383 |
| 4 | Malangbong | Malangbong | 1991 | 862 | 700 |
| 5 | Limbangan | Limbangan Tengah | 1994 | 823 | 600 |
| 6 | Kadungora | Talagasari | 2000 | 678 | 558 |
| 7 | Leles | Leles | 1992 | 424 | 257 |
| 8 | Samarang | Samarang | 1980 | 600 | 480 |
| 9 | Cibodas | Banjarsari | 1995 | 213 | 140 |
| 10 | Andir-Bayongbong | Mulyasari | 1997 | 653 | 502 |
| 11 | Cilimus | Sukarame | 1997 | 169 | 110 |
| 12 | Bojongloa | Sukamaju | - | 189 | 120 |
| 13 | Cisurupan | Cisurupan | 1992 | 224 | 184 |
| 14 | Cikajang | Cibodas | 1995 | 740 | 574 |
| 15 | Pameungpeuk | Paas | 2000 | 680 | 319 |
| 16 | Plaza Sukamukti | Sukamukti | 1932 | 465 | 351 |
| 17 | Banyuresmi | Banyuresmi | 1999 | 210 | 91 |
| 18 | Sukaratu | Sukaratu | 1999 | 115 | 24 |
| 19 | Lokal | Leuwigoong | 1918 | 124 | 60 |
| 20 | Surabaya | Surabaya | - | 33 | 22 |
| 21 | Cirapuhan | Cirapuhan | 1947 | 145 | 92 |
| 22 | Pasar Bandrek | Sukamerang | 2001 | 108 | 65 |
| 23 | Cikarag | Cikarag | 2002 | 113 | 53 |
| 24 | Pasar Lewo | Sukaratu | 1916 | 348 | 297 |
| 25 | Linggarjati | Linggarjati | 1994 | 8 | 14 |
| 26 | Pakenjeng | Pakenjeng | 1997 | 10 | 35 |
| 27 | Panyindangan | Panyindangan | 1925 | 104 | 226 |
| 28 | Karangsari | Karangsari | 1989 | 4 | 35 |
| 29 | Depok | Depok | 1970 | 120 | 180 |
| 30 | Tanjungjaya | Tanjungjaya | - | 38 | 176 |
| 31 | Sukamulya | Sukamulya | - | 20 | 140 |
| 32 | Barujaya | Wangunjaya | 1987 | 20 | 32 |
| 33 | Pasirlangu | Pasirlangu | 1950 | 30 | 212 |
| 34 | Tegalgede | Tegalgede | 1987 | 21 | 60 |
| 35 | Wangunjaya | Wangunjaya | - | 90 | 173 |
| 36 | Caringin | Caringin | - | 125 | 208 |
| 37 | Sukarame | Sukarame | - | 80 | 194 |
| 38 | Purbayani | Purbayani | - | 84 | 188 |
| 39 | Cisewu | Cisewu | 1977 | 70 | 120 |
| 40 | Sukajaya | Sukajaya | 1990 | 145 | 103 |
| 41 | Sugih Mukti | Karangsewu | 2006 | 31 | 56 |
| 42 | Dwikarya | Pamalayan | 2000 | 50 | 60 |
| 43 | Mancagahar | Nyalindung | 2002 | 75 | 75 |
| 44 | Perdes | Mekarmukti | 1998 | 21 | 21 |
| 45 | Selaawi | Selaawi | 1946 | 171 | 250 |
| 46 | Pasar Senin | Sukamaju | 1993 | 7 | 20 |
| 47 | Giri Mulya | Mekarmulya | 2000 | 40 | 35 |
| 48 | Banjarwangi | Banjarwangi | 1986 | 50 | 169 |
| 49 | Singajaya | Singajaya | 1926 | 215 | 216 |
| 50 | Pancasura | Pancasura | 1950 | 10 | 80 |
| 51 | Sukarasa | Sukarasa | 1976 | 72 | 120 |
| 52 | Toblong | Toblong | - | 14 | 213 |
| 53 | Bungbulang | Bungbulang | 1990 | 8 | 4 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 54 | Perk. Miramareu | Miramareu | 1988 | 5 | 5 |
| 55 | Mekarwangi | Mekarwangi | 2002 | 3 | 4 |
| 56 | Cihurip | Cihurip | 1970 | 6 | 2 |
| 57 | Cisompet | Cisompet | 1993 | 78 | 50 |
| 58 | Simpang | Simpang | - | 34 | 155 |
| 59 | Cikelet | Cikelet | 1982 | 4 | 9 |
| 60 | Linggamanik | Linggamanik | - | 20 | 101 |
| 61 | Cigadog | Cigadog | - | 4 | 40 |
| 62 | Mekarmukti | Mekarmukti | 1975 | 145 | 174 |
| 63 | Cijayana | Cijayana | 1997 | 134 | 90 |
| 64 | Agro | Mekarasih | 2010 | 32 | 68 |
| 65 | Pasirwangi | Padawaas | 1987 | 175 | 265 |
| 66 | Cintamanik | Cintamanik | - | 32 | 74 |
| 67 | Psr Sehat Genteng | Margalaksana | 2011 | 159 | 137 |
| 68 | Pangauban | Pangauban | 2011 | 87 | 76 |
| 69 | Psr Wisata | Cijambe | 2010 | 15 | - |
| 70 | Pasar Cimurah | Cimurah | 2011 | - | - |
| 71 | Cigedug | Cigedug | - | - | - |
| 72 | Cijambe | Cijambe | - | - | - |
| 73 | Neglasari | Neglasari | - | - | - |
| 74 | Sukamaju | Sukamaju | - | - | - |
| 75 | Mekarmukti | Mekarmukti | - | - | - |
| 76 | Cinta | Cinta | - | - | - |
| 77 | Karang Sewu | Karang Sewu | - | - | - |
| 78 | Suka Ratu | Suka Ratu | - | - | - |
| 79 | Cikelet | Cikelet | - | - | - |
| 80 | Caringin | Caringin | - | - | - |
| 81 | Mekar Mukti | Mekar Mukti | - | - | - |
| 82 | Miramareu | Miramareu | - | - | - |
| 83 | Mekar Mukti 2 | Mekar Mukti 2 | - | - | - |
| 84 | Cangkuang | Cangkuang | - | - | - |
| 85 | Rancasalak | Rancasalak | - | - | - |
| | Jumlah | | | 16.577 | 15.816 |

Sumber: *Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 85 pasar rakyat yang tersebar di Kabupaten Garut dengan jumlah kios sebanyak 16.577, dan jumlah pedagang sebanyak 15.816. Jumlah kios dan pedagang yang mencapai jumlah di atas 15.000 menunjukkan bahwa jumlah tersebut sangatlah signifikan, dimana dibutuhkan jumlah pegawai UPT Disperindag Kabupaten Garut yang dapat memenuhi rasio perbandingan antara pedagang yang ada dan pegawai yang dapat mengelola pedagang serta kios dan pasar di Kabupaten Garut.

Berdasarkan data yang ada di tahun 2016 – 2017 jumlah pegawai di lingkungan Disperindag Kabupaten Garut jumlahnya hanya 155 yang terdiri dari pegawai PNS, TKK, DAN TKS, sehingga rasio tersebut tidak berimbang. Berkenaan dengan jumlah pegawai yang bertugas di UPT Disperindag se-Kabupaten Garut, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperindag Kabupaten Garut tahun 2016 – 2017

| No. | Nama UPTD | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|---------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | Guntur | 19 | |
| 2 | Kadungora | 10 | |
| 3 | Bayongbong | 9 | |
| 4 | Cikajang | 9 | |
| 5 | Leles | 11 | |
| 6 | Samarang | 11 | |
| 7 | Wanaraja | 13 | |
| 8 | Limbangan | 7 | |
| 9 | Malangbong | 5 | |
| 10 | Cisurupan | 5 | |
| 11 | Pameungpeuk | 7 | |
| 12 | Cibatu | 5 | |
| 13 | Garut Kota | 13 | |
| 14 | Sukawening | 7 | |
| 15 | Cilawu | 5 | |
| 16 | Singajaya | 2 | |
| 17 | Cisewu | 3 | |
| 18 | Karangpawitan | 7 | |
| 19 | Banyuresmi | 5 | |
| 20 | Bungbulang | 2 | |
| Jumlah | | 155 | |

Sumber: *Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, 2017*

Dari fenomena yang muncul di atas, dilihat dari perbandingan jumlah pedagang dan pegawai UPT Disperindag di Kabupaten Garut tidaklah berimbang. Hal ini dimungkinkan akan menghambat efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Garut, sehingga efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kabupaten Garut masih belum optimal. Menurut Stoner (dalam Iskandar 2017: 4)

salah satu hal yang dapat menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan pasar rakyat adalah kinerja pegawai. Pendapat Stoner di atas dapat dikatakan sesuai dengan fakta yang ada. Selain disebabkan oleh rasion pedagang dan pegawai yang tidak berimbang, perilaku pedagang, serta peran kinerja pegawai Pemerintah dalam hal ini pegawai dibawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Disperindag, walau secara keorganisasian berada dibawah wewenang Bapenda, yang belum dapat menjalankan pengelolaan pasar rakyat dengan optimal. Adapun pengelolaan pasar rakyat tersebut dapat berbentuk:

1. upaya perbaikan perilaku pedagang;
2. upaya perbaikan sarana dan prasarana yang ada;
3. upaya mensosialisasikan serta menjalankan peraturan yang ada demi terciptanya situasi pasar yang teratur dan disiplin.

Adapun penyebab lain yang dihadapi oleh kinerja pegawai adalah adanya keterbatasan kompetensi tenaga pegawai dalam mengelola pasar rakyat, serta keterbatasan kelembagaan (organisasi) pengelola pasar untuk melakukan pengelolaan pasar rakyat dan pembinaan pedagang. Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai adalah tidak terlepas dari kebijakan pemimpin daerah dan para pejabat yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten atau kota. Kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui bahwa keperdulian para pejabat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pasar rakyat masih kurang. Seperti diketahui pembiaran PKL yang dagang dimana saja dapat berimbas menyebabkan gangguan terhadap pasar rakyat

dan para pedagang di dalamnya. Sehingga para PKL juga perlu ditata dan dibina seperti halnya dengan pasar rakyat dan para pedagangnya.

Berdasarkan pengalaman empiris yang bersumber pada penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU (2007) terhadap para pedagang di pasar-pasar rakyat di kota Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (JOBODETABEK) diperoleh informasi bahwa salah satu pesaing utama para pedagang di pasar-pasar rakyat adalah para PKL. Sehingga keberadaan PKL di sekitar pasar hendaknya diperhatikan benar agar tidak menyaingi para pedagang pasar, karena mereka banyak yang berjualan menutupi bagian depan dan jalan masuk ke pasar yang ini menjadikan bagian luar pasar - pasar rakyat tampak kumuh dan semrawut. Dikebanyakan pasar rakyat, kondisi seperti ini dibiarkan terus terjadi tanpa solusi, akibatnya para pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar sehingga memancing para pedagang yang berjualan di dalam pasar berpindah ke luar meninggalkan lapaknya yang pada akhirnya keadaan di dalam pasar kosong. Untuk menghindari persaingan antara pedagang pasar dengan PKL, maka perlu dilakukan penataan dengan menempatkan PKL ke lokasi yang ditentukan, di mana di tempat yang baru PKL tidak lagi menyebabkan kekumuhan baru dan tidak menyaingi pedagang pasar rakyat.

Dari permasalahan penataan PKL dan pedagang di pasar rakyat di atas, kepedulian pimpinan daerah dan para pejabat di bawahnya terhadap pasar rakyat dalam menentukan kebijakan sangatlah penting. Hal ini mengingat sudah ada perangkat organisasi pemerintah daerah yang bertugas mengurus pengelolaan pasar rakyat, yaitu instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi

pasar rakyat di daerah. Di beberapa daerah, khususnya di Kabupaten Garut, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar rakyat semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapat Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah dan pejabat daerah di tingkat bawahnya (SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar semata daripada penekanan pada pembinaan pasar termasuk di dalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar. Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada kepala pengelola pasar rakyat diberikan target-target sedemikian rupa agar memperoleh pendapatan seoptimal mungkin, sehingga daya tampung jumlah pedagang tidak diperhatikan. Selanjutnya, para pedagang dibiarkan mengisi bagian tempat-tempat kosong seperti tangga dan lorong-lorong pasar yang seharusnya dibiarkan tetap kosong agar para pengunjung tetap nyaman bermobilitas.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut yang diperoleh dari hasil retribusi Pasar rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Laporan Realisasi PAD Bulan Desember 2016

| N o. | Jenis Pajak/Retribusi | Realisasi | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------|----------------|------|---------------------|-----|-------------|------|
| | | Target | S/D Bulan Lalu | % | Bulan Desember 2016 | % | Jumlah | % |
| 1 | Retribusi Pasar | 978.554.375 | 504.184.200 | 51,5 | 67.042.600 | 6,9 | 571.226.800 | 58,4 |
| 2 | Retribusi Sampah | 443.827.440 | 241.882.800 | 54,5 | 32.558.400 | 7,3 | 274.441.200 | 61,8 |
| 4 | M C K | 42.821.935 | 23.635.000 | 55,2 | 2.870.000 | 6,7 | 26.505.000 | 61,9 |

Sumber: *Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, 2016*

Berdasarkan fenomena di atas, pengeloaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih dalam dengan menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formalitas kebijakan. Fokus analisis kebijakan ini adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut agar efektivitas pengelolaan pasar rakyat tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka.

Model pembinaan yang melibatkan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Bapeda dan Disperindag ini biasanya sulit berjalan dengan baik, mengingat masalah koordinasi diantara dua SKPD tersebut. Disini SKPD Pembina pedagang pasar yang berada dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disperindag ketika melakukan pembinaan harus merasuk ke dalam unit kerja pasar rakyat yang secara keorganisasian berada dibawah wewenang Bapenda. Kesulitan dalam melakukan koordinasi ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah kerana kentalnya ego sektoral yang pada akhirnya masalah ini menjadi salah satu sebab munculnya stigma buruk yang melekat pada pasar rakyat sehingga tidak menarik untuk dikunjungi oleh konsumen.

Untuk menghindari kesulitan dalam hal koordinasi, maka penanganan permasalahan (penataan, pembinaan dan pengelolaan) pedagang pasar rakyat dan PKL secara langsung di lapangan dilakukan oleh UPT Disperindag ESDM dimana di dalam struktur SKPD ini terdapat bidang yang menangani pasar termasuk pasar

rakyat di dalamnya dan Bidang yang khusus menangani PKL serta dapat melibatkan Ikatan Warga Pasar (IWAPA) dari masing-masing pasar rakyat tersebut. Kemudian, secara kelembagaan UPT Disperindag melaporkan kepada Bapenda karena yang secara keorganisasian pasar rakyat berada dibawah wewenangnya.

Dari penjelasan di atas, perlu dilakukan evaluasi tingkat efektivitas tugas pengelolaan pasar, terutama yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik. Hal ini menuntut pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat dan kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang lebih baik, sehingga efektivitas tugas pengelolaan pasar rakyat terus meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat diduga berpengaruh terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Berdasarkan alur kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di atas, secara hirarki keseluruhan peraturan perundangan tersebut dapat diurut sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Hirarki
Perundangan

| No. | Nama dan Jenis Perundangan |
|-----|--|
| 1. | Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 2. | Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611). |
| 3. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. |
| 4. | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. |

| | |
|----|--|
| 5. | Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. |
|----|--|

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan proses penyampaian kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang belum jelas, belum memadainya sumber daya pengelolaan pasar serta tingkat koordinasi dalam pengelolaan pasar masih rendah;
2. Kinerja pegawai unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM dalam pengelolaan pasar belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditunjukkan oleh kuantitas, kualitas, penggunaan waktu kerja, dan kerjasama antar pegawai masih rendah;
3. Efektivitas pengelolaan pasar rakyat dapat dikatakan masih rendah, kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat kemampuan produktivitas, dan pengelolaan pasar yang belum optimal. Keadaan ini diperkuat oleh kondisi pasar yang masih belum tertata dengan baik, pelayanan pedagang yang belum baik, serta fungsi pasar sebagai sarana penopang perekonomian masyarakat belum tercapai dengan optimal.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, diduga ada hubungan sebab akibat terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti berminat untuk melakukan kajian dan meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana yang diungkapkan pada fenomena permasalahan di atas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti menetapkan topik penelitian dengan judul: ”**Pengaruh**

**Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja
Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas
Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag
ESDM Kabupaten Garut”.**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, teridentifikasi masalah penelitian, yaitu: Efektivitas pengelolaan pasar rakyat belum optimal. Faktor penyebabnya, diduga antara lain, karena kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang belum optimal serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum menyeluruh dan berjalan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan pernyataan masalah di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut: “Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut?”.

Kemudian dirumuskan dalam sub-sub pernyataan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis?
2. Adakah pengaruh kinerja pegawai unit pelaksana teknis terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut?

3. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena masalah organisasi publik, khususnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar, kinerja pegawai unit pelaksana teknis, serta efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berguna bagi beberapa pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar, kinerja pegawai unit pelaksana teknis, dan efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pengembangan konsep-konsep di lingkungan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar,

kinerja pegawai unit pelaksana teknis, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi:
 - a. Kepala Dinas, merupakan pedoman untuk meningkatkan pencapaian efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada Disperindag ESDM Kabupaten Garut agar mampu menunjukkan kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang baik dan optimal. Sehingga, dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat berlangsung efektif dan efisien;
 - b. Staf pengelolaan pasar rakyat, sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan kepala daerah melalui kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang baik agar mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan;
 - c. Peneliti lanjutan, merupakan salah satu bahan kajian sebelum melaksanakan penelitian lebih mendalam, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar, kinerja pegawai unit pelaksana teknis, serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum menyeluruh dan kinerja pegawai unit pelaksana teknis pengelolaan pasar rakyat belum optimal, sehingga menyebabkan efektivitas

pengelolaan pasar rakyat belum terwujud. Belum optimalnya kinerja pegawai UPT pengelolaan pasar rakyat dikarenakan efektivitas pengelolaan pasar rakyat dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum menyeluruh.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut, harus dilakukan pemecahannya dan sejatinya menjadi tugas dan kewajiban kepala dinas beserta staf. Fenomena masalah tersebut merupakan bagian dari tugas pokok kepala dinas, yang mana kepala dinas memiliki kewajiban dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar rakyat agar kinerja pegawai pengelolaan pasar rakyat lebih optimal. Fenomena masalah tersebut terkait dengan upaya mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang harus dilakukan oleh kepala dinas.

Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka fenomena masalah di atas memiliki relevansi dengan Ilmu Administrasi Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2017a: 16), bahwa :

Administrasi Negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan, dan dikendalikan. Administrasi Negara adalah juga suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara memperolehnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa Ilmu Administrasi Negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Thoha (dalam Iskandar, 2017a: 16), bahwa “Ilmu Administrasi Negara diturunkan dari administrasi sebagai ibunya, dan politik sebagai ayahnya, sehingga pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara (pemerintah) bisa dikategorikan

Administrasi Negara”. Sementara menurut Dimock dan Dimock (dalam Iskandar, 2017a: 17), “Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Karenaitu, ilmu administrasi negara tidak saja memepersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi bagaimana melakukannya”.

Terkait dengan uraian di atas, peningkatan efektivitas pengelolaan pasar rakyat merupakan tugas bagian dari kajian ilmu administrasi negara. Oleh karena itu, upaya tersebut harus diperhatikan dan dikelola secara profesional melalui pelaksanaan kebijakan dan kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang baik agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Waldo (dalam Iskandar, 2017a: 18) bahwa “Administrasi negara dan atau manajemen adalah suatu organisasi manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara juga merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara”.

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *'policy'*. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disainakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata *"wisdom"*. Penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut,

sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Sementara itu, variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang terkait dengan fokus kajian ilmu administrasi negara adalah pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar, kinerja pegawai unit pelaksana teknis, dan efektivitas pengelolaan pasar. Penjelasan ketiga variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pendapat Anderson (dalam Wahab, 2001: 3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi. Kebijakan menurut pendapat Friednich (dalam Wahab, 2001: 3) bahwa:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan, oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewuiudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan

nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Edwards III (dalam Winarno, 2016: 134 dan Iskandar, 2017a: 221), implementasi atau pelaksanaan kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis atau variabel pendukung, yang meliputi:

- a. komunikasi (*communication*),
- b. sumberdaya (*resources*),
- c. disposisi (*disposition*), dan
- d. birokrasi (*bureaucratie*).

Selanjutnya, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Iskandar (2017a: 221) mengungkapkan bahwa secara prinsip keempat faktor determinasi yang dikemukakan oleh Edwards III di atas tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan pendapat ahli lain, yaitu Van Horn dan Van Meter. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik, Van Horn dan Van Meter menggariskan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber kebijakan
- c. Karakteristik badan pelaksana, dan
- d. Sikap serta tanggungjawab pelaksana.

Untuk mengukur variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar, peneliti memilih model yang dikemukakan oleh Edwards III dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, serta (4) birokrasi.

2. Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

Kinerja sangat perlu sebagai bahan evaluasi bagi seorang pemimpin atau manajer. Kinerja juga merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dimana seseorang dituntut untuk memainkan bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009: 54), kinerja pegawai yang meningkat dapat dilihat dari peningkatan prestasi atas keberhasilan organisasi yang dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

Sementara menurut Iskandar (2017b: 102) kinerja merupakan suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja. Selain itu juga, Iskandar (2017b: 265) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh kelompok dan perorangan dengan saling pengertian dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standar kerja.

Adapun menurut Miner (dalam Sudarmanto, 2014) menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan, standar pekerjaan harus dapat

diukur dan dipahami secara jelas. Suatu pekerjaan dapat diukur melalui 4 dimensi, yaitu:

- a. Kuantitas pekerjaan;
- b. Kualitas pekerjaan;
- c. Penggunaan Waktu kerja; dan
- d. Kemampuan kerja sama.

Adapun menurut Coughlin (dalam Iskandar, 2017: 112-121) kinerja tidak dapat terpisahkan dari dimensi-dimensinya. Dimensi tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

- a. Motivasi;
- b. Pembinaan;
- c. Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja; dan
- d. Akses Terhadap Sumber Informasi

Untuk mengukur variabel kinerja pegawai unit pelaksana teknis, peneliti memilih model yang dikemukakan oleh Coughlin dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) motivasi, (2) pembinaan, (3) dukungan dan kerja sama dari mitra kerja, serta (4) akses terhadap sumber informasi.

3. Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut

Efektivitas merupakan ukuran pencapaian suatu pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan. Bila suatu pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana, maka berarti pekerjaan yang dilakukan berlangsung efektif.

Aspek efektivitas tidak terlalu mementingkan alokasi waktu dan sumber daya yang digunakan, yang penting terselesaikan sesuai dengan rencana.

Menurut Iskandar (2017b: 340), “Efektivitas tugas atau kerja yang dilakukan seorang pegawai sama dengan prestasi atau kinerja pegawai secara keseluruhan. Efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan atau manfaat yang diperoleh masyarakat”. Hal ini menunjukkan, bahwa bila manfaat atau keuntungan yang didapat lebih besar, berarti kinerja pegawai makin efektif. Disisi lain, kinerja pegawai dapat dikatakan efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun.

Adapun untuk mengukur variabel Efektivitas Pengelolaan, Siagian (2010: 103) mengemukakan sedikitnya terdapat empat buah dimensi untuk mengukur efektivitas kerja (organisasi pemerintahan), yaitu:

- a. Ukuran waktu;
- b. Ukuran harga;
- c. Ukuran nilai-nilai sosial; dan
- d. Ukuran ketelitian.

Adapun menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely (dalam Iskandar, 2017b: 329), Efektivitas Pengelola dapat diukur oleh faktor-faktor determinan yang menjadi dimensi-dimensinya. Secara umum terdapat empat dimensi dalam mengukur efektivitas pengelolaan, yaitu:

- a. Dimensi produktivitas atau produksi;
- b. Dimensi Efisiensi;
- c. Dimensi Kepuasan; dan

d. Dimensi Adaptasi.

Adapun untuk mengukur variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut, peneliti memilih model yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnely dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) Dimensi produktivitas atau produksi; (2) Dimensi Efisiensi; (3) Dimensi Kepuasan; dan (4) Dimensi Adaptasi.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (Variabel X), variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (variabel Y), dan variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (variabel Z) memiliki hubungan kausalitas (*causal effectual*) antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap masyarakatnya khususnya dalam bidang perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan proposisi penelitian sebagai berikut: **“apabila pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar dilaksanakan dengan optimal maka kinerja pegawai unit pelaksana teknis akan meningkat, sehingga berdampak pada terwujudnya efektifitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut”**.

Selanjutnya, proposisi tersebut di atas didukung oleh teori-teori sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma (2016) dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar”**. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar memberikan berpengaruh cukup positif dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional, sehingga dapat memberikan setidaknya pelayanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelayanan sebelumnya yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa kebijakan revitalisasi ini berdampak pada meningkatnya animo pedagang pasar tradisional dalam menjual barang dagangannya, begitu juga dengan animo masyarakat sebagai pembeli menjadi lebih bersemangat dikarenakan fisik bangunan pasar tradisional mengalami revitalisasi menjadi lebih baik. Hal tersebut memberikan imbas berupa kepercayaan masyarakat akan kualitas perekonomian pasar. Sehingga, masyarakat sebagai konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pedagang serta Pemerintah Daerah dengan Dinas terkait sebagai pihak pengelola Pasar Tradisional.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Martin (2017) dengan judul **“Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)”**, dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah khususnya di kota Bandung, dan secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern dapat memberikan pengaruh nyata pada terwujudnya produktivitas perekonomian pada pasar tradisional.

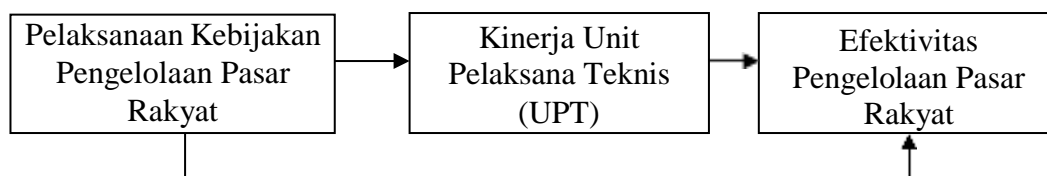
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Natsir (2017) dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”**, dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu Pengelolaan Pasar Tradisional (Rakyat) memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pegawai yang berimbas pada peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag di Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Pengelolaan Pasar Tradisional memberikan tanggapan positif dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara serta DPRD Mamuju Utara dalam berpartisipasi menyukseskan agenda Pengelolaan Pasar Tradisional.

Selanjutnya berdasarkan hubungan antara konsep-konsep tersebut, asumsi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang optimal berpotensi meningkatkan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis.

2. Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang baik dapat menjamin terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.
3. Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang optimal merupakan hasil dari Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang baik.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan diantara variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dalam pembahasan, maka kerangka pemikiran ini dirumuskan dalam suatu model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Model
Penelitian

1.5.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian yang dibagi ke dalam hipotesis utama dan sub-sub hipotesis.

1. Hipotesis Utama

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

2. Sub-sub Hipotesis

a. Sub Hipotesis 1

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis.

b. Sub Hipotesis 2

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kinerja pegawai unit pelaksana teknis terhadap efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

H_1 : Terdapat pengaruh kinerja pegawai unit pelaksana teknis terhadap efektivitas pengelolaan pasar pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

c. Sub Hipotesis 3

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.
- H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori sebagai suatu unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dengan menggunakan unsur ilmu maka suatu penelitian dapat menjelaskan atau menerangkan tentang fenomena sosial maupun fenomena alami yang menjadi pusat penelitian. Dalam penelitian ilmiah, tinjauan pustaka dapat membantu peneliti dalam menemukan serta mengkaji teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Karena menurut Iskandar (2017c: 22) teori merupakan alat dari ilmu (*tool of science*). Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan, tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta-fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Teori merupakan pernyataan tentang sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan antar gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Teori penelitian dan data empirik terlibat dalam suatu hubungan yang erat, dimana teori membina penelitian, penelitian mencari dan memisahkan fakta-fakta dan fakta-fakta mempengaruhi teori.

Menurut Iskandar (2017c: 56), teori adalah proposisi-proposisi yang saling berhubungan, beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik. Jadi suatu teori memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Terdiri dari serangkaian proposisi
- b. Proposisi-proposisi tersebut saling berhubungan
- c. Beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik.

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan. Tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar (2017c: 318) menyatakan bahwa fungsi suatu teori mencakup:

- a. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan;
- b. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi fakta –fakta yang dikumpulkan dalam penelitian;
- c. Menjelaskan dan menerangkan tentang gejala-gejala;
- d. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala lain yang akan terjadi;
- e. Mengisi lowongan-lowongan ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala yang tengah, telah atau akan terjadi.

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritis permasalahan yang menjadi pusat penelitian, menguraikan secara berurutan hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang melandasi penelitian tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan keluarga berencana terhadap efektivitas program penyuluhan, informasi dan konseling remaja untuk mewujudkan perilaku sehat reproduksi remaja, yang terdiri dari teori Administrasi Negara sebagai *grand theory*, teori kebijakan publik sebagai *middle theory* dan *operational theory* yaitu teori-teori yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Bertolak dari uraian tersebut, maka Bab ini akan membahas rumusan teoritik penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Perekonomian dan Pengelolaan Pasar Rakyat

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

2.3 Relevansi Masalah penelitian Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara

2.4 Tinjauan Teoritik tentang Variabel – Variabel Penelitian

2.4.1 Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

2.4.2 Variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

2.4.3 Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut

2.5 Hubungan Konseptual antar Variabel penelitian.

Untuk lebih jelas dan terarahnya pembahasan ini, maka peneliti menguraikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

2.1 Tinjauan Teoritik Tentang Perekonomian dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Perekonomian erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup suatu masyarakat atau suatu bangsa di suatu Negara. Derajat kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat dari taraf perekonomiannya. Makin tinggi perekonomiannya maka akan semakin sejahtera suatu masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu pemerintah berupaya mengatur perekonomian masyarakat agar dapat terus berkembang dan pada akhirnya mengalami peningkatan. Witjaksono (2009) mendefinisikan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara/daerah dalam rangka memakmurkan warga negara atau penduduk daerah setempat. Pembangunan ekonomi mengarah pada kebijakan yang diambil pemerintah guna mencapai tujuan

ekonomi yang mencakup dalam pengendalian inflasi, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian kesempatan kerja dapat diwujudkan salah satunya dalam pemanfaatan pasar sebagai tempat penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pasar dapat dikatakan sebagai pusat pembangunan perekonomian karena mampu menciptakan kesempatan kerja.

Merujuk pada istilah pasar sebagaimana yang dikemukakan oleh Witjaksono (2009) di atas, istilah pasar sebagaimana yang didefinisikan oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, bab 1, pasal 1 menyebutkan ‘pasar’ adalah “area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya”. Selanjutnya, adapun yang disebut dengan istilah ‘pasar tradisional’ adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Adapun menurut Sudarman (2009), Pasar fahami sebagai suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi lainnya, dimana pasar mempunyai lima fungsi utama

bagi penopang perekonomian masyarakat. Menurut Sudarman (2009) kelima fungsi tersebut adalah:

1. Pasar menetapkan nilai (*sets value*), Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai.
2. Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang efisien.
3. Pasar mendistribusikan barang, kemampuan seseorang membeli barang tergantung pada penghasilannya.
4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan inti dari adanya harga.
5. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang.

Berdasarkan fungsi pasar di atas, pasar dalam konteks ini merujuk pada pasar rakyat atau tradisional, karena di dalamnya didominasi oleh para pedagang yang berasal dari masyarakat itu sendiri, jauh dari sistem perekonomian monopoli yang tidak dikuasai oleh hanya satu atau dua orang pemilik modal. Disamping itu, pedagang dan pembeli dapat melakukan proses tawar-menawar yang dapat menghilangkan monopoli harga yang menjadi ciri sistem ekonomi kapitalis. Selain itu pola bangunan di pasar rakyat mempunyai ciri khas yang patut dilestarikan, dengan kata lain bagi masyarakat Indonesia pasar rakyat bukan hanya berfungsi sebagai penyangga perekonomian akan tetapi merupakan aset budaya yang harus dilestarikan.

Berkenaan dengan pasar rakyat yang berada di Kabupaten Garut, pada tahun 2016 Bupati Garut sebagai Kepala Daerah telah ikut berperan aktif melestarikan eksistensi pasar rakyat dengan cara mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2016 tentang Penataan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 3 tahun 2016 tersebut, Penetapan Pasar Rakyat dibedakan berdasarkan criteria, yaitu: skala pelayanan masyarakat, pengelolaan pasar, dan sarana prasarana pasar. Kriteria pengelolaan pasar rakyat dibedakan menjadi:

1. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
3. Pasar yang dikelola oleh swasta/BUMD/BUMN/BUMDes/Koperasi.

Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah minimal memiliki 150 (seratus limapuluh) kios, struktur bangunan kios bersifat permanen; dan luas lahan menyesuaikan dengan standar kelayakan bangunan. Sehingga potensi pasar rakyat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara umum potensi tersebut meliputi:

1. Kemampuan Pasar rakyat dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya.
2. Berfungsi sebagai supplier untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas.
3. Pasar rakyat memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern.
4. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita,

dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen.

5. Potensi pasar akan semakin penting karena *market turn over* cepat dengan sistem pembayaran tunai.

Berdasarkan potensi pasar rakyat di atas, setidaknya terdapat beberapa aspek yang membedakan dengan pasar-pasar jenis lainnya, antara lain: (1)harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, (2)dekat dengan pemukiman, dan (3)memberikan banyak pilihan produk yang segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Kelemahan itu antara lain adalah kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bawahan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial masyarakat yang berubah, di mana wanita di perkotaan umumnya berkantor sehingga hampir tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar rakyat (Esther dan Didik, 2003).

Melekatnya pandangan buruk pada pasar rakyat, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih relative mudah dijangkau (tidak perlu masuk kedalam pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja. Sementara ini seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi kebanyakan pasar rakyat memiliki stigma buruk. Sebaliknya, di lapangan

kenyataan masih dijumpai peran pengelolaan pasar rakyat terutama dari kalangan aparatur pemerintah dalam mengupayakan perbaikan perilaku pedagang pasar rakyat masih sangat terbatas. Banyak penyebab yang melatarbelakangi kondisi ini. Dimulai dari keterbatasan jumlah tenaga dan kemampuan (kompetensi) individu tenaga pengelola serta keterbatasan kelembagaan (organisasi) pengelola pasar untuk melakukan pengelolaan pasar rakyat dan pembinaan pedagang. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola pasar di lapangan tidak terlepas dari kebijakan pemimpin daerah dan para pejabat dibawahnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten atau kota. Dari kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui kepedulian mereka terhadap pasar rakyat beserta para pedagang di dalamnya dan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Seperti diketahui pembiaran PKL yang dapat menyebabkan gangguan terhadap pasar tradisional dan para pedagang di dalamnya. Sehingga para PKL juga perlu ditata dan dibina seperti halnya dengan pasar rakyat dan para pedagangnya.

Kepedulian Pimpinan Daerah dan para pejabat dibawahnya terhadap pasar rakyat menentukan kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi (SKPD) yang membidangi pasar rakyat di daerahnya. Dibeberapa daerah, pimpinan daerah meletakkan posisi pasar semata-mata sebagai salah satu sumber utama Pendapat Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang dipungut dari para pedagang. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota) dan Pejabat Daerah di tingkat bawahnya (Kepala SKPD) lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi pasar, seperti pengaturan pemungutan dan penyetoran retribusi serta administrasi keuangan (pembukuan)

retribusi semata daripada penekanan pada pembinaan pasar termasuk didalamnya pembinaan para pengelola pasar dan pedagang pasar. Akibat dari adanya kebijakan optimalisasi pemungutan retribusi tersebut, maka kepada para Kepala Pasar diberikan target-target yang untuk mencapainya pasar diusahakan sedemikian rupa agar dapat menampung pedagang dalam jumlah sebanyak mungkin, termasuk mengisi sebagian tempat-tempat kosong seperti tangga dan lorong-lorong pasar yang seharusnya dibiarkan tetap kosong tanpa pedagang agar para pengunjung tetap nyaman berlalu lalang.

Pengelolaan pasar memerlukan desain kebijakan yang komprehensif dan multisektoral, karena itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggunakan metode analisis kebijakan (*policy analysis method*), sehingga hasil studi dapat menjadi pertimbangan utama bagi perumus kebijakan dalam formalitas kebijakan. Fokus analisis adalah kebijakan apa yang perlu diambil atau yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Garut agar revitalisasi pasar rakyat tidak semakin memarginalkan para pedagang tradisional, tetapi justru meningkatkan daya saing mereka.

Model pembinaan yang melibatkan dua SKPD ini biasanya sulit berjalan dengan baik, mengingat masalah koordinasi diantara dua SKPD tersebut. Disini SKPD Pembina pedagang pasar ketika melakukan pembinaan harus merasuk ke dalam unit kerja pasar rakyat yang secara keorganisasian berada dibawah wewenang BAPENDA. Kesulitan dalam melakukan koordinasi ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah karena kentalnya ego sektoral yang pada akhirnya masalah

ini menjadi salah satu sebab munculnya stigma buruk yang melekat pada pasar rakyat sehingga tidak menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat konsumen.

Untuk menghindari kesulitan dalam hal koordinasi, maka penanganan permasalahan (penataan, pembinaan dan pengelolaan) pedagang pasar rakyat dan PKL sudah seyogyanya dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Disperindag ESDM dimana di dalam struktur SKPD ini terdapat bidang yang menangani Pasar termasuk pasar rakyat di dalamnya dan Bidang yang khusus menangani PKL serta dapat melibatkan Ikatan Warga Pasar (IWAPA) dari masing-masing pasar rakyat tersebut.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma (2016) dengan judul: **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar”**. Hal hal yang penting pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar belum sepenuhnya berhasil dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan.

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif (Moleong, 2004). Dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam (indepth interview) dan telaah dokumentasi.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar memberikan berpengaruh cukup positif dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional, sehingga dapat memberikan setidaknya pelayanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelayanan sebelumnya yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, menunjukkan dampak adanya peningkatan animo pedagang pasar tradisional dalam menjual barang dagangannya, begitu juga dengan animo masyarakat sebagai pembeli menjadi lebih bersemangat dikarenakan fisik bangunan pasar tradisional mengalami revitalisasi menjadi lebih baik. Hal tersebut memberikan imbas berupa kepercayaan masyarakat akan kualitas perekonomian pasar.
4. Kesimpulan penelitian ini adalah:
 - a. Adanya pengaruh cukup positif dari pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar, sehingga dapat memberikan pelayanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelayanan sebelumnya.
 - b. Penataan lokasi pasar tradisional menjadi lebih strategis dengan bangunan yang lebih permanen, nyaman, dan kondusif.

- c. Revitalisasi sarana dan prasarana fisik pasar tradisional juga memperhatikan kondisi drainase yang lebih baik, lahan parkir yang proporsional, dan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pembeli.
- d. Saran dari penelitian ini adalah:
 - a. Setelah adanya program revitalisasi ini, seyogyanya bangunan fisik pasar yang telah baik ini dapat dijaga dan dilestarikan oleh Dinas terkait, yaitu Dinas Disperindag dan BAPEDA Kota Makassar.
 - b. Selain adanya revitalisasi bangunan fisik pasar, seyogyanya Dinas terkait memberikan pelatihan dan pembimbingan kepada para pedagang di pasar Pa'baeng-Baeng agar dapat berperilaku lebih baik dalam berjualan dan juga dalam menjaga fisik serta kebersihan pasar yang sudah direvitalisasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Martin (2017) dengan judul **“Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)”**. Hal penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengaruh Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung.
2. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Adapun pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris yaitu implementasi penerapan kebijakan zonasi penataan pasar tradisional dan pasar modern, dan faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan kebijakan zonasi penataan pasar di Kota Bandung. Populasi dan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasar tradisional dan modern di Kota Bandung.

3. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:
 - a. Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung berpengaruh positif terhadap pengelolaan ekonomi pasar di Kota Bandung;
 - b. Secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya produktivitas pasar tradisional yang tidak termonopoli oleh pasar modern.
4. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
 - a. Menambah dan meningkatkan kualitas pasar tradisional yang telah ada selama puluhan tahun sehingga keberadaannya lebih digemari oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Jika memungkinkan kuantitas pasar modern dikurangi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Natsir (2017) dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik**

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”. Hal penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Mamuju Utara telah berjalan dengan baik;
2. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Populasi dan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasar tradisional milik pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Kesimpulan hasil penelitian adalah:
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila Implementasi Kebijakan dapat diterapkan secara lintas sektoral dimana diperlukan kerjasama antar aparatur pelaksana.
 - b. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Mamuju memberikan hasil positif sehingga terdapat perbaikan dari sisi tata kelola pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
4. Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
 - a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Mamuju Utara perlu dievaluasi dan diawasi secara berkala, sehingga efektivitasnya akan bertahan dan tidak berkurang, sehingga kualitas

pelayanan dan tata kelola pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara tetap dapat dipertahankan;

- b. Perlunya peningkatan kualifikasi keilmuan bagi seluruh aparatur pelaksana kebijakan agar seluruh pegawai dapat bekerja dengan optimal dimana potensi pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara dapat dioptimalkan pula.

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu

| Penelitian terdahulu I | Penelitian terdahulu II | Penelitian terdahulu III | Penelitian yang dilakukan |
|---|--|---|--|
| Peneliti Nur Asma | Peneliti Iqbal Martin | Peneliti Muhammad Natsir | Peneliti Yudi Wahyudi |
| Judul: “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar” (2016) | Judul: “Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)” (2017) | Judul: “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara” (2017) | Judul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut” (2018) |
| Lokasi Kota Makassar | Lokasi Kota Bandung | Lokasi Kabupaten Mamuju Utara | Lokasi Di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut |
| Objek Penelitian Pasar tradisional Pa’baeng-Baeng Kota Makassar | Objek Penelitian Pasar tradisional di Kota Bandung. | Objek Penelitian Pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara | Objek Penelitian Seluruh Staf (Pegawai) Di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut |

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Variabel X : Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional</p> <p>Y: -</p> <p>Z: Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar</p> | <p>Variabel X : Penerapan Kebijakan Zonasi</p> <p>Y : Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung</p> <p>Z: -</p> | <p>Variabel X : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara</p> <p>Y : -</p> <p>Z : -</p> | <p>Variabel X : Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat</p> <p>Y : Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis</p> <p>Z : Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut</p> |
| <p>Hasil Pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar memberikan berpengaruh cukup positif dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional, sehingga dapat memberikan setidaknya pelayanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelayanan sebelumnya yang dapat diberikan kepada masyarakat.</p> | <p>Hasil Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung berpengaruh positif terhadap pengelolaan ekonomi pasar di Kota Bandung.</p> <p>Secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya produktivitas pasar tradisional yang tidak termonopoli oleh pasar modern.</p> | <p>Hasil Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan apabila Implementasi Kebijakan diterapkan secara lintas sektoral dimana diperlukan kerjasama antar aparaturnya pelaksana.</p> <p>Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Mamuju memberikan hasil positif sehingga terdapat perbaikan dari sisi tata kelola pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara.</p> | <p>-</p> |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui originalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Fokus penelitian merupakan kajian Ilmu Administrasi Negara, yaitu Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai

Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

2. Lokus penelitian dilakukan UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.
3. Rujukan teori yang digunakan peneliti untuk variabel penelitian merupakan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi dalam kaitannya dengan Administrasi Negara, Kebijakan Publik dan Manajemen publik, seperti teori Implementasi Kebijakan dari Edwards III, teori Kinerja Pegawai dari Coughlin, dan teori Efektivitas dari Gibson, Ivancevich, dan Donnely.
4. Metode penelitian termasuk didalamnya variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis dengan menggunakan teknik survey, sedangkan variabel penelitiannya terdiri dari tiga variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan satu dan dua variabel. Dalam penelitian sekarang, peneliti menggunakan variabel bebas yang mengkaji tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, variabel antara yang mengkaji tentang Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, dan variabel terikat yang mengkaji tentang Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis.

2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Adminitrasi Negara

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Berbagai kegiatan yang terkait dengan suatu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dan

Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis merupakan urusan negara. Apabila dikaitkan dengan lingkup kajian Administrasi Negara maka hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan diantara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan.

Vieg berpendapat bahwa dalam arti yang sederhana, administrasi dimaknai sebagai suatu tindakan yang ditetapkan untuk mengejar maksud yang disadari. Batasan tersebut mengindikasikan dua hal yaitu; 1) kegiatan yang telah ditetapkan dan direncanakan, dan 2) kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai maksud yang dikehendaki (dalam Siagian, 2008: 8).

Adapun administrasi Negara sebagai administrasi publik, merupakan bagian dari ilmu administrasi dalam kerangka sistem pemerintahan, secara sederhana mencakup proses penentuan arah tujuan atau sasaran, dan norma-norma atau cara-cara untuk mencapainya berupa kebijakan-kebijakan atau program yang bersifat menyeluruh.

Kasim (dalam Iskandar, 2017b: 139) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pendapat-pendapat tersebut tentunya sesuai dengan

masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Untuk Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan suatu pengelolaan organisasi yang memenuhi standar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, relevansi Administrasi Negara dengan variabel-variabel dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaannya untuk membentuk atau membangun suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah atau negara. Kebijakan yang diimplementasikan akan efektif apabila dalam prakteknya ditunjang dan didukung oleh program yang optimal, kemampuan aparat yang professional, ketersediaan anggaran serta sarana prasarana yang memadai, dan lain sebagainya.

Dari definisi-definisi dan pendapat-pendapat di atas memberikan gambaran secara umum bahwa Ilmu Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara. Adapun proses Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu tahapan penting dalam pelaksanaan tata kelola perekonomian yang sesuai dan memenuhi standar pengelolaan, sehingga adanya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan urusan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi kerakyatan. Dengan demikian Pelaksanaan

Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berkaitan erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian

2.4.1 Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Iskandar, 2017b).

Selanjutnya, Kebijakan menurut pendapat Friednich (dalam Wahab, 2001:

3) dinyatakan sebagai:

“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan, oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Pendapat di atas secara umum dapat difahami bahwa pelaksanaan kebijakan seyogyanya harus dirumuskan terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan melalui serangkaian langkah yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan secara sederhana dapat difahami sebagai tindakan yang sengaja yang dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Edwards III (dalam Winarno, 2016: 134 dan Iskandar, 2017b: 221), implementasi atau pelaksanaan kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor determinan yang mempengaruhinya. Keempat faktor tersebut meliputi:

- a. Komunikasi (*communication*),
- b. Sumber daya (*resources*),
- c. Disposisi (*disposition*), dan
- d. Birokrasi (*bureaucratie*).

Selanjutnya, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Iskandar (2017b: 221) mengungkapkan bahwa secara prinsip keempat faktor determinasi yang dikemukakan oleh Edwards III di atas tidak begitu jauh berbeda dibandingkan dengan pendapat ahli lain, yaitu Van Horn dan Van Meter. Dalam pelaksanaan

suatu kebijakan publik, Van Horn dan Van Meter menggariskan faktor-faktor determinasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber kebijakan
- c. Karakteristik badan pelaksana, dan
- d. Sikap serta tanggungjawab pelaksana.

Selanjutnya, untuk mengukur variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, peneliti lebih memilih model yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Iskandar, 2017b: 221-222) dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Pemaparan lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi beserta indikator-indikator dari model yang dikemukakan oleh Edwards III di atas adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi menunjukkan peran sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, yang dapat dinyatakan sebagai perintah atasan kepada pelaksana kebijakan agar penerapan kebijakan sesuai jalur untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Komunikator

Komunikator diartikan sebagai aktor-aktor utama yang berbentuk perorangan atau lembaga yang ditunjuk atau dibentuk serta dilegalkan oleh pemerintah guna bertugas untuk mensosialisasikan dan melaksanakan suatu

kebijakan publik. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Komunikator memiliki kompetensi komunikasi yang baik;
- b) Komunikator memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu.

2. Pesan

Pesan diartikan sebagai suatu isi dari suatu kebijakan publik yang disosialisasikan oleh komunikator kepada komunikan melewati saluran tertentu. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Isi kebijakan dapat difahami;
- b) Isi kebijakan mendukung eksistensi pengelolaan pasar rakyat.

3. Saluran

Saluran atau *channel* diartikan sebagai media dimana pesan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (publik). Konsep indikator tersebut diuraikan melalui butir-butir item sebagai berikut:

- a) Saluran/ media sosialisasi dilakukan secara interpersonal (antar orang per orang).
- b) Saluran/ media sosialisasi dilakukan secara kelompok.

4. Komunikan

Komunikan (publik) diartikan sebagai sasaran dimana kebijakan publik tersebut ditujukan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Komunikan dapat memahami kebijakan yang disampaikan;

- b) Komunikasikan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Umpan balik

Umpan balik atau *feedback* diartikan sebagai suatu masukan efektif yang cenderung membantu kelancaran suatu pelaksanaan kebijakan publik. Akibatnya, hal ini akan memunculkan tanggapan atau reaksi yang diharapkan oleh pemberi informasi ke penerima informasi. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan;
- b) Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi.

b. Dimensi Sumber daya (*Resources*)

Sumber daya menunjukkan sarana dan prasarana yang ada untuk melaksanakan implementasi kebijakan. Konsep dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai dukungan pendanaan yang dikeluarkan untuk membiayai terlaksananya pelaksanaan suatu program kebijakan publik. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang transport;
- b) Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang makan minum.

2. Sarana

Sarana dapat diartikan sebagai alat langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pasar rakyat, khususnya pengelolaan pasar, sarana berarti segala macam peralatan yang digunakan untuk memudahkan melakukan pengelolaan pasar rakyat, misalnya: ruang pelayanan, aula tempat berkumpul dan sejenisnya. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Sarana yang tersedia cukup mendukung;
- b) Sarana yang tersedia didukung oleh teknologi informasi.

3. Prasarana

Prasarana dapat diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam ranah pengelolaan pasar rakyat, prasarana dapat mencakup segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan oleh petugas pasar untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan, sebagai contoh: lokasi/tempat, bangunan, uang, dan yang sejenisnya. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Prasarana yang tersedia cukup representatif;
- b) Prasarana yang tersedia bersih dan nyaman.

4. Alat-alat

Alat-alat dapat diartikan sebagai sarana yang sifatnya lebih spesifik sebagai alat yang digunakan oleh petugas pasar untuk digunakan dalam melayani keperluan warga pasar misalnya: peralatan komputer, peralatan keamanan pasar dan sebagainya. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Alat-alat yang tersedia cukup mendukung;
- b) Alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna.

c. Dimensi Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap aparatur merujuk terhadap suatu kegiatan atau kesepakatan para aparatur pelaksana untuk menerapkan kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Rencana kerja yang terstruktur

Bekerja berdasarkan rencana diartikan sebagai suatu pola kerja terstruktur yang dilakukan oleh agen pelaksana agar pelaksanaan program pengelolaan pasar rakyat berjalan sesuai program kerja. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Rencana kerja yang ada tertuang dalam renstra;
- b) Rencana kerja yang ada dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku.

2. Konsultasi

Konsultasi diartikan sebagai suatu proses meminta saran atau masukan dari individu kepada individu lainnya atau kelompok yang satu kepada kelompok lainnya guna mencari solusi dari suatu permasalahan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Konsultasi dilaksanakan pada setiap kegiatan;
- b) Konsultasi dilakukan secara berkelanjutan.

3. Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian akhir atas suatu proses kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian ini dilakukan oleh unsur Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan;
- b) Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Laporan

Laporan diartikan sebagai proses memberikan informasi dari apa yang telah dikerjakan selama kegiatan berlangsung. Laporan biasanya dituangkan dalam sebuah tulisan guna dapat diarsipkan sebagai refleksi bagi kegiatan yang akan dilakukan tahun yang akan datang. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Laporan dibuat secara ringkas dan jelas;
- b) Laporan dibuat untuk melaporkan hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan.

d. Dimensi Birokrasi (*Bureaucratie*)

Birokrasi atau struktur birokrasi dapat diartikan sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik-karakteristik organisasi, dimana bagian yang satu saling berhubungan dengan bagian yang lainnya. Dengan struktur birokrasi yang baik, maka penerapan kebijakan yang diimplementasikan akan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Tupoksi

Tupoksi, tugas, pokok, dan fungsi, diartikan sebagai tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan dalam suatu organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan dalam organisasi tersebut. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dengan jelas dan terstruktur;
- b) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab.

2. Wewenang

Wewenang atau *authority* diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan secara legal berdasarkan aturan yang berlaku terhadap para agen pelaksana suatu program kebijakan publik, khususnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan teguran kepada pedagang;
- b) Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada pedagang.

3. Standar operasional prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) diartikan sebagai suatu ukuran dasar dari suatu prosedur kerja yang ditetapkan guna menjadi acuan kerja bagi para agen pelaksana dalam melaksanakan suatu program kebijakan publik. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Standar operasional prosedur ditetapkan dengan jelas dan terukur;
- b) Standar operasional prosedur berlaku bagi pegawai yang bertugas.

4. Koordinasi

Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Koordinasi antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terjalin dengan solid;
- b) Koordinasi antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Dinas terkait terjalin dengan harmonis.

5. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai monitoring yang dilakukan unsur pimpinan terhadap kinerja bawahan dalam hal ini pegawai Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut sehingga kinerja pegawai dapat dipantau dengan seksama. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut;
- b) Hasil pengawasan terhadap Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala.

2.4.2 Variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

Orientasi atau kecenderungan sikap birokrasi di arahkan pada pencapaian tujuan, yaitu menjamin kepuasan pihak yang dilayani dan menjalankan suatu peraturan atau regulasi guna memelihara ketertiban masyarakat. Dengan demikian kinerja birokrasi merupakan gambaran dari kinerja para pegawainya.

Kinerja sangat perlu sebagai bahan evaluasi bagi seorang pemimpin atau manajer. Kinerja juga merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dimana seseorang dituntut untuk memainkan bagiannya dalam melaksanakan strategi organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009: 54), kinerja pegawai yang meningkat dapat dilihat dari peningkatan prestasi atas keberhasilan organisasi yang dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Sementara dalam pengertian lain, kinerja difahami sebagai suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja. Hal ini tidak lepas dari aspek manajerial yang mempengaruhinya, sebab setiap pimpinan memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menolong memperbaiki kinerja bagi mereka yang menjadi bawahannya (Iskandar, 2017b: 102).

Adapun pada umumnya kinerja erat hubungannya dengan istilah pegawai, sehingga membentuk frasa kinerja pegawai. Menurut Kusriyanto (dalam Mangkunegara, 2014: 9) istilah kinerja pegawai merupakan aspek penting yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia, dimana kinerja pegawai

dapat diartikan sebagai suatu perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Dengan kata lain, kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya, variabel kinerja memiliki dimensi-dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, sehingga dalam proses pengukuran kinerja sebaiknya semua dimensi diukur dan diperlakukan sama, akan tetapi tentu saja dimensi kerja dari suatu pekerjaan akan berbeda dengan dimensi pekerjaan yang lainnya. Adapun menurut Miner (dalam Sudarmanto, 2014) menyatakan bahwa dimensi kinerja terdiri dari empat dimana hal ini digunakan untuk memudahkan penilaian kinerja pegawai secara jelas. Adapun keempat dimensi tersebut meliputi:

- a. Kuantitas pekerjaan;
- b. Kualitas pekerjaan;
- c. Penggunaan Waktu kerja; dan
- d. Kemampuan kerja sama.

Adapun menurut ahli lain, Dessler (dalam Iskandar, 2017b: 107) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah suatu prosedur yang memiliki dimensi-dimensi yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Adapun dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Penetapan standar kerja;
- b. Penilaian kinerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar; dan

- c. Memberi umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau berkinerja lebih tinggi lagi.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Miner dan Dessler, ahli lainnya Coughlin (dalam Iskandar, 2017b: 112-121) juga berpendapat bahwa kinerja tidak dapat terpisahkan dari dimensi-dimensi yang dimilikinya. Menurut Coughlin dimensi kinerja meliputi empat aspek, yaitu:

- a. Motivasi;
- b. Pembinaan;
- c. Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja; dan
- d. Akses Terhadap Sumber Informasi

Dari ketiga pendapat ahli di atas tentang konsep kinerja dan dimensi-dimensinya, peneliti memilih konsep kinerja yang dikemukakan oleh Coughlin (dalam Iskandar, 2017b: 112-121). Selanjutnya, pemaparan lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi beserta indikator-indikator dari model yang dikemukakan oleh Coughlin di atas adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Motivasi

Motivasi diartikan sebagai suatu dorongan atau usaha untuk menimbulkan motif. Perilaku manusia dimotivasi oleh kebutuhan dari dalam dirinya (instrinsik) serta faktor lain yang berasal dari luar dirinya (ekstrinsik).

Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Kebutuhan berafiliasi

Kebutuhan untuk berafiliasi adalah dorongan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan orang lain, merupakan keinginan atas hubungan antar pribadi yang akrab dan dekat. Kebutuhan akan afiliasi menjadi daya gerak yang akan memotivasi semangat kerja seseorang. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Kebutuhan berafiliasi antar Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid;
- b) Kebutuhan berafiliasi antar Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memacu dedikasi dan prestasi;
- c) Dedikasi yang tinggi dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

2. Meningkatkan kompetensi staf

Meningkatkan kompetensi staf adalah suatu keharusan bagi suatu lembaga dan diri staf untuk dapat selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki, sehingga dengan kompetensinya tersebut dapat berimbas pada pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik. Disamping itu, keterampilan serta sikap dan perilaku yang baik dapat mendorong staf untuk mengembangkan prestasi dan karirnya. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu diprioritaskan;
- b) Program pengembangan karir staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berjalan sesuai dengan Perundangan yang ada;

- c) Peningkatan karir di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat meningkatkan kesejahteraan staf.

b. Dimensi Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses pengarahan yang ditujukan kepada staf agar dapat dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun pembinaan dapat dimulai dari monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut kegiatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Monitoring

Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pimpinan atau staf senior dalam melakukan pengendalian bagi bawahan atau staf junior agar dapat melaksanakan tugas lebih terarah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Monitoring selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung;
- b) Monitoring dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan;
- c) Monitoring dilaksanakan secara berkala.

2. Evaluasi kegiatan

Evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu evaluasi berguna untuk menganalisa hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Evaluasi selalu dilaksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan;
- b) Evaluasi dilaksanakan untuk menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan;
- c) Evaluasi dilaksanakan secara berkala.

3. Tindak lanjut

Tindak lanjut adalah proses yang dilaksanakan pasca adanya evaluasi dan penilaian yang diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, umpan balik diseleksi dan dijadikan pedoman untuk menetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program kegiatan selanjutnya. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tindak lanjut dilakukan untuk mengukur hasil evaluasi yang telah dilaksanakan;
- b) Tindak lanjut dilakukan untuk meyakinkan laporan efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang telah dilaksanakan;
- c) Tindak lanjut dilakukan untuk menentukan perencanaan dan pengembangan program kegiatan selanjutnya.

c. Dimensi Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja

Dukungan dan kerjasama dari mitra kerja adalah suatu bentuk pengakuan sosial yang diberikan oleh orang lain khususnya mitra kerja dimana dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan dapat terbentuk suatu sistem sosial yang memiliki solidaritas dan integritas yang optimal. Selain itu, diharapkan pula terwujud suatu komunitas sosial yang tinggi, yang pada

akhirnya dapat meningkatkan kadar emosional yang tinggi yang dapat melahirkan rasa saling memperhatikan satu sama lain. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Solidaritas

Solidaritas adalah suatu proses kerjasama antar staf serta lingkungan sosial yang dapat membentuk suatu atmosfer lingkungan yang kondusif sehingga akan lebih mudah mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, akan tercipta rasa nyaman dan aman dalam menjalankan tugas di tempat kerja. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut;
- b) Kerjasama yang harmonis juga dilaksanakan antara UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
- c) Kerjasama yang solid antar pihak menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi.

2. Integritas Sosial

Integritas sosial adalah sikap yang harus dimiliki oleh staf dengan lingkungan sosialnya dalam melakukan kerjasama untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Integritas sosial dalam bekerja dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut;
- b) Integritas sosial menghasilkan *team work* yang solid;
- c) Integritas sosial yang dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat mempengaruhi iklim lingkungan sosial yang kondusif.

d. Dimensi Akses Terhadap Sumber Informasi

Akses terhadap sumber informasi adalah suatu kondisi dimana staf dapat dengan mudah memperoleh informasi seputar pekerjaannya. Dengan kemudahan informasi yang didapat, staf diharapkan memiliki wawasan yang luas, terkini dan akurat, sehingga staf dapat dengan sigap menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin berubah. Dimensi ini diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Kemudahan Informasi

Kemudahan Informasi adalah kondisi dimana staf dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya. Konsep indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Kemudahan memperoleh informasi telah sesuai dengan yang dibutuhkan;
- b) Informasi yang diakses dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai;
- c) Informasi yang diperoleh digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada;

d) Informasi yang diperoleh telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemerintah.

2. Pemahaman Informasi

Pemahaman informasi adalah kondisi dimana staf dapat mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan dari informasi yang tersedia. Selain itu, staf mengetahui dan memahami bagaimana informasi tersebut diakses, dan apa fungsi informasi tersebut. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Pemahaman informasi telah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut;
- b) Pemahaman informasi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut didasarkan pada informasi yang diakses pada saat melaksanakan tugas;
- c) Pemahaman staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terkait informasi terbaru selalu disosialisasikan antar staf;
- d) Pimpinan dan segenap unsur terkait mengevaluasi keakuratan informasi yang diperoleh dan disosialisasikan.

3. Umpan Balik (*feedback*)

Umpan balik atau *feedback* adalah suatu masukan atau saran atau juga kritik yang disampaikan oleh pihak pengguna (*User*) terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh staf. Suatu umpan balik akan efektif apabila difahami dan diterima dengan positif guna membantu membantu kelancaran

dan perbaikan program di masa mendatang. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Umpan balik (*feedback*) yang bersifat membangun diinventarisir dengan baik;
- b) Umpan balik (*feedback*) yang telah diinventarisir diterima dan direspon dengan positif;
- c) Umpan balik (*feedback*) dievaluasi oleh Pimpinan dan unsur terkait lainnya sebelum digunakan menjadi pedoman perbaikan;
- d) Umpan balik (*feedback*) digunakan sebagai pedoman perbaikan program yang akan datang.

2.4.3 Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat

Efektivitas merupakan ukuran pencapaian suatu pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan. Bila suatu pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan rencana, maka berarti pekerjaan yang dilakukan berlangsung efektif. Aspek efektivitas tidak terlalu mementingkan alokasi waktu dan sumber daya yang digunakan, yang penting terselesaikan sesuai dengan rencana.

Menurut Iskandar (2017b: 340), “Efektivitas tugas atau kerja yang dilakukan seorang pegawai sama dengan prestasi atau kinerja pegawai secara keseluruhan. Efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan atau manfaat yang diperoleh masyarakat”. Hal ini menunjukkan, bahwa bila manfaat atau keuntungan yang didapat lebih besar, berarti kinerja pegawai makin efektif. Disisi lain, kinerja pegawai dapat dikatakan efektif bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun.

Adapun untuk mengukur variabel Efektivitas Pengelolaan, Siagian (2010: 103) mengemukakan sedikitnya terdapat empat buah dimensi untuk mengukur efektivitas kerja (organisasi pemerintahan), yaitu:

- a. Ukuran waktu;
- b. Ukuran harga;
- c. Ukuran nilai-nilai sosial; dan
- d. Ukuran ketelitian.

Adapun menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnely (dalam Iskandar, 2017b: 329), Efektivitas Pengelola dapat diukur oleh faktor-faktor determinan yang menjadi dimensi-dimensinya. Secara umum terdapat empat dimensi dalam mengukur efektivitas pengelolaan, yaitu:

- a. Dimensi produktivitas atau produksi;
- b. Dimensi Efisiensi;
- c. Dimensi Kepuasan; dan
- d. Dimensi Adaptasi.

Adapun untuk mengukur variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut, peneliti memilih model yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnely dengan alasan faktor-faktor determinasi yang dikemukakan lebih ideal untuk digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, pemaparan lebih lanjut mengenai dimensi-dimensi beserta indikator-indikator dari model yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnely di atas adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Produktivitas atau Produksi

Dimensi ini difahami sebagai suatu gambaran kemampuan organisasi (pemerintah daerah/SKPD) untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan kebutuhan publik. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Kemampuan UPT dalam melaksanakan tugas

Kemampuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan tugas adalah keadaan dimana suatu UPT dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, seluruh capaian kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) Pelaksanaan tugas UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

2. Mutu pencapaian program SKPD sesuai dalam pengelolaan

Mutu pencapaian program SKPD sesuai dalam pengelolaan adalah suatu keadaan dimana mutu atau nilai yang menjadi target kerja dari suatu program yang telah ditentukan telah sesuai dengan pengelolaan yang ada. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Mutu pencapaian program SKPD telah sesuai dengan pengelolaan kerja di lapangan;

- b) Mutu pencapaian program SKPD telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Dimensi Efisiensi

Dimensi ini difahami sebagai suatu perbandingan antara *output* yang dihasilkan atau pencapaian prestasi dengan *input* yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Perbandingan *output* dengan *input* dari setiap UPT

Perbandingan output dengan input difahami sebagai perbandingan antara masukan dan keluaran. Apabila keluaran lebih baik dari pada masukan, maka capaian yang didapat lebih baik. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Perbandingan *output* dengan *input* dari setiap UPT telah sesuai harapan;
- b) *Output* selalu dievaluasi dan dipertahankan kualitasnya.

2. Pencapaian prestasi setiap UPT

Pencapaian prestasi setiap UPT difahami sebagai prestasi yang dicapai dari hasil kinerja karyawan setiap UPT. Capaian prestasi ini dilihat dari output yang lebih baik dari input. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Pencapaian prestasi di setiap UPT telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b) Pencapaian prestasi di setiap UPT memperoleh *rewards* dari Pimpinan.

c. Dimensi Kepuasan

Dimensi ini difahami sebagai suatu keuntungan yang diterima oleh peserta (pelaksana atau staf) atau pelanggannya (masyarakat) meliputi sikap staf, rotasi atau mutasi staf, kemangkiran, keterlambatan, dan keluhan (kedisiplinan dan tanggung jawab staf). Konsepi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Manfaat yang diterima oleh staf

Manfaat yang diterima oleh staf yaitu manfaat berupa manfaat materi atau non-materi yang diberikan oleh Pimpinan dan masyarakat atas kinerja yang telah diberikan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Manfaat yang diterima oleh staf berupa kepuasan hasil kinerja yang baik;
- b) Manfaat yang diterima oleh staf berupa imbalan gaji dan tunjangan.

2. Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat

Manfaat yang diterima oleh publik/ masyarakat yaitu manfaat berupa materi dan non-materi yang diberikan oleh staf UPT Disperindag Kabupaten Garut kepada masyarakat. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa bantuan modal bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat;
- b) Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat.

3. Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT

Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT yaitu ketepatan pengalokasian unit kerja yang dibutuhkan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan yang tepat, cepat, dan tidak bertele-tele. Sehingga dengan kecepatan dan ketepatan birokrasi yang ada, efektivitas kerja staf dan anggaran di setiap UPT dapat dioptimalkan. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu.
- b) Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT dilaksanakan dengan terobosan sistem “*one day service*”.

4. Rotasi atau mutasi staf

Rotasi atau mutasi staf yaitu proses pemindahan tugas staf dari satu posisi kepada posisi lainnya. Rotasi ini dimaksudkan untuk penyegaran staf guna dapat bekerja lebih baik dalam unit kerja yang baru. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Rotasi staf disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman;
- b) Rotasi staf dievaluasi secara berkala.

5. Disiplin staf UPT

Disiplin staf yaitu ketaatan staf baik secara perilaku dan pemikiran terhadap segala peraturan yang berlaku. Sehingga, semua pemikiran, ucapan serta tindakan staf diharapkan dapat memacu kinerja yang produktif sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Disiplin staf UPT berasal dari hati nurani;
- b) Disiplin staf UPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Tanggung jawab staf UPT

Tanggung jawab staf yaitu segala tugas pokok dan fungsi staf yang dibebankan oleh Pemerintah kepada seorang staf atau pegawai yang harus senantiasa dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, hasil kinerja staf dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah sebagai pihak yang telah memberikan beban kerja dan penggajian kepadanya. Konsepsi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tanggung jawab staf UPT yang dibebankan dijalankan dengan baik;
- b) Tanggung jawab staf UPT yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

d. Dimensi Adaptasi

Dimensi ini difahami sebagai suatu usaha sebuah organisasi untuk dapat menanggapi perubahan internal dan eksternal yang berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan eksternal maupun internal organisasi itu sendiri. Konsepsi dimensi di atas diuraikan melalui indikator-indikator berikut:

1. Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT

Tanggapan organisasi/ lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT yaitu setiap perubahan yang terjadi di dalam lingkungan kerja (internal) UPT yang berada di bawah naungan Disperindag. Perubahan ini berasal dari dalam unit kerja dan atau disebabkan adanya perubahan

perturan kerja yang dibuat oleh Pimpinan dan atau pemerintah. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon dengan baik;
- b) Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak.

2. Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT

Tanggapan organisasi/ lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT yaitu setiap perubahan yang terjadi dari luar lingkungan kerja (eksternal) UPT yang berada di bawah naungan Disperindag. Perubahan ini berasal dari luar unit kerja yang mungkin disebabkan oleh kondisi budaya masyarakat, tuntutan masyarakat, atau perubahan jaman. Konsepi indikator di atas diuraikan melalui butir-butir item berikut:

- a) Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik;
- b) Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak.

2.5 Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian

Kajian tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dalam penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari ruang lingkup kajian administrasi negara, karena masalah kebijakan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai kebijakan publik merupakan bagian dari studi administrasi negara.

Peneliti beranggapan bahwa Pelaksanaan Kebijakan terjadi melalui suatu proses pengelolaan agar pelaksanaannya tetap berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III (dalam Winarno, 2016: 134 dan Iskandar, 2017b: 221) bahwa proses kebijakan publik melibatkan 4 (empat) faktor diterminan, yaitu; Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*), dan Birokrasi (*Bureaucratie*).

Hal tersebut didukung pernyataan dari Iskandar (2017b: 236) bahwa melaksanakan pelayanan publik merupakan bagian dari kinerja pegawai yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai pengguna (user) dari pelayanan publik itu sendiri. Oleh karenanya kinerja dari pegawai harus senantiasa baik yang tercermin dalam ucapan maupun tindakan guna mampu melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan melalui sasaran dan tujuan tertentu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, peneliti menarik benang merah bahwa pelaksanaan kebijakan mempunyai hubungan sebab akibat dengan suatu proses kinerja yang dilaksanakan oleh pegawai. Melalui proses kinerja pegawai yang didalamnya terdiri dari fungsi-fungsi kinerja, maka suatu kebijakan publik dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa teori-teori yang dikemukakan cukup relevan untuk menyatakan adanya hubungan konseptual antara pelaksanaan kebijakan dengan kinerja pegawai.

Berdasarkan hubungan konseptual di atas, setiap kegiatan organisasi tidak terlepas dari aktivitas manusia sebagai pegawai yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Stoner, *et al.*, (dalam Iskandar, 2017b: 223) menyatakan organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara berstruktur, untuk mencapai sasaran atau sejumlah sasaran yang spesifik. Oleh karena itu, untuk menggerakkan pegawai diperlukan kerjasama yang solid yaitu suatu proses saling memahami, membantu, dan melengkapi diantara para pegawai agar terjadi kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Iskandar, 2017b: 223).

Setiap organisasi selalu berusaha agar para pegawainya dapat berprestasi dengan menunjukkan kinerja yang optimal. Kinerja pegawai secara realistis dapat berbentuk memberikan efektivitas kerja yang optimal. Efektivitas kerja pegawai yang optimal dalam konteks penelitian ini adalah efektivitas pegawai dalam mengelola pasar rakyat yang merupakan suatu alat pengukur keberhasilan pegawai dalam menjalankan tanggung jawab kinerjanya. Karena semakin tinggi efektivitas pengelolaan pegawai dalam menjalankan pekerjaannya, maka keuntungan organisasi akan meningkat.

Menurut Muchdarsyah (dalam Yuniarsih, TjuTju dan Suwatno, 2012: 227) menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi efektivitas kinerja yang dalam hal ini adalah efektivitas pengelolaan, salah satunya yaitu kinerja pegawai. Selanjutnya, kinerja pegawai merupakan faktor kualitas orang yang bekerja atau mengabdikan pada sebuah organisasi atau lembaga yang dapat berimbas pada peningkatan efektivitas. Kinerja pegawai dapat tercapai salah satunya dengan cara adanya rekrutmen

pegawai yang memadai keilmuan dan keahliannya termasuk menguasai penerapan teknologi dan pemanfaatan pengetahuan yang memerlukan pendidikan dan penelitian.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (Variabel X), variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (variabel Y), dan variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (variabel Z) memiliki hubungan kausalitas (*causal effectual*) antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara yang dimaksudkan untuk memberikan perhatian terhadap masyarakatnya khususnya dalam bidang perekonomian. Sehingga, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang optimal berpotensi meningkatkan Kinerja Pegawai. Selanjutnya, Kinerja Pegawai yang optimal dapat berdampak pada peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, khususnya pengelolaan pasar rakyat pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat pada unit pelaksana teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang optimal merupakan hasil dari Kinerja Pegawai yang baik yang ditopang oleh optimalnya Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Selanjutnya, hubungan konseptual antar variabel penelitian tersebut di atas didukung oleh teori-teori sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma (2016) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Tradisional di Pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar tradisional di pasar Pa’baeng-Baeng Kota Makassar memberikan berpengaruh cukup positif dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar tradisional, sehingga dapat memberikan setidaknya pelayanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelayanan sebelumnya yang dapat diberikan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa kebijakan revitalisasi ini berdampak pada meningkatnya animo pedagang pasar tradisional dalam menjual barang dagangannya, begitu juga dengan animo masyarakat sebagai pembeli menjadi lebih bersemangat dikarenakan fisik bangunan pasar tradisional mengalami revitalisasi menjadi lebih baik. Hal tersebut memberikan imbas berupa kepercayaan masyarakat akan kualitas perekonomian pasar. Sehingga, masyarakat sebagai konsumen merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pedagang serta Pemerintah Daerah dengan Dinas terkait sebagai pihak pengelola Pasar Tradisional.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Martin (2017) dengan judul “Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung

berpengaruh positif terhadap pengelolaan ekonomi pasar di Kota Bandung. Selain itu, secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung dapat memberikan pengaruh pada terwujudnya produktivitas pasar tradisional yang tidak termonopoli oleh pasar modern.

3. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Natsir (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional dapat berjalan efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila Implementasi Kebijakan dapat diterapkan secara lintas sektoral dimana diperlukan kerjasama antar aparatur pelaksana. Kemudian secara empiris hasil penelitian memberi gambaran bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Mamuju memberikan hasil positif sehingga terdapat perbaikan dari sisi tata kelola pasar tradisional di Kabupaten Mamuju Utara yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan demikian, hubungan konseptual antar variabel penelitian di atas nampak jelas, sehingga dari keseluruhan uraian di atas dapat menjadi kerangka pemahaman bahwa terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut merupakan hasil dari solidnya Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang didukung oleh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang baik. Jika kedua variabel tersebut saling mendukung kearah yang positif, maka Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat Pada

Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut dapat terwujud dengan optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan teknik survey. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah yang akan diteliti pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif (Iskandar, 2017d: 174).

Adapun teknik survey yang peneliti gunakan adalah untuk mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuosioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati. Dengan demikian, metode deskriptif dan teknik survey yang digunakan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap pemecahan masalah melalui pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai variabel-variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat, kinerja pegawai unit pelaksana teknis, dan hubungannya dengan efektivitas pengelolaan pasar rakyat.

3.2 Variabel-variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian

3.2.1 Variabel-variabel yang Diteliti

Variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai lebih dari satu nilai (Iskandar, 2017d: 73). Dalam penelitian sosial pengertian abstrak biasanya disebut konsep, sedangkan pengertian-pengertian empirik disebut variabel. Dengan kata lain, variabel penelitian dapat dikatakan sebagai karakteristik yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh karakteristik lain.

Adapun dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel, yaitu variabel bebas atau *independent variable*, variabel terikat atau *dependent variable*, dan variabel antara atau *intervening variable*. Selanjutnya, variabel bebas dapat difahami sebagai variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat dapat difahami sebagai variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel antara dapat difahami sebagai variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Ketiga variabel tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

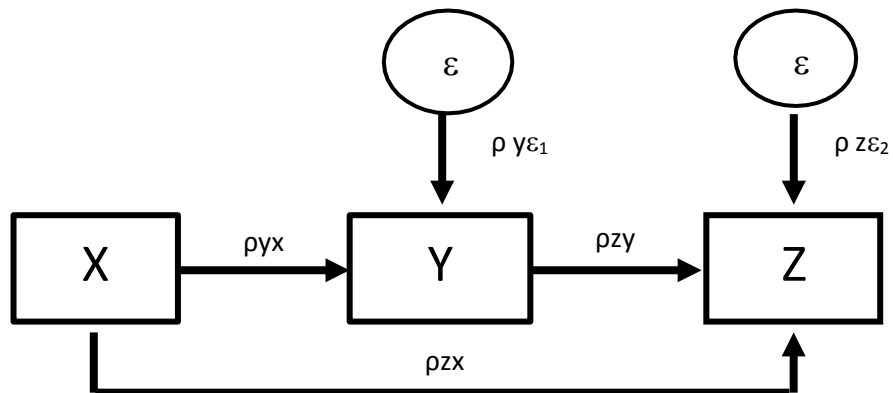
1. Variabel bebas (*Independent variable* (X)), yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat.
2. Variabel antara (*Intervening variable* (Y)), yaitu Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis.

3. Variabel terikat (*Dependent variable* (Z)), yaitu Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat.

3.2.2 Paradigma Penelitian

Dari ketiga variabel di atas, paradigma penelitian yang digambarkan adalah bahwa Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat meningkat apabila Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dapat optimal sebagai Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Supaya dapat difahami lebih jelas, ketiga variabel yang menggambarkan hubungan *Causal Effectual* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Model Paradigma Penelitian

Keterangan :

- : Hubungan Kausal
- X : Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (Variabel bebas/*Independent variable*)

- Y : Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Variabel antara/ *Intervening variable*)
- Z : Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Variabel terikat/ *Dependent variable*)
- Pyx : Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y
- Pzx : Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Z terhadap variabel X
- Pzy : Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Z terhadap variabel Y
- ε : Variabel lain yang tidak diteliti
- $\rho_{y\varepsilon_1}$: Pengaruh variabel lain terhadap Y
- $\rho_{z\varepsilon_2}$: Pengaruh variabel lain terhadap Z

Skema hubungan diantara ketiga variabel penelitian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel X mempunyai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan variabel Y dan Z. Hal ini mempunyai arti bahwa variabel X merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Y dan variabel Z. Parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y ditunjukkan dengan simbol ρ_{yx} . Sedangkan parameter yang menunjukkan pengaruh variabel X terhadap variabel Z ditunjukkan dengan simbol ρ_{zx} .
2. Variabel Y mempunyai hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dengan variabel Z. Hal ini mempunyai arti bahwa variabel Y merupakan faktor yang mempengaruhi variabel Z. Parameter yang menunjukkan pengaruh variabel Y terhadap variabel Z ditunjukkan dengan simbol ρ_{zy} .

3. Variabel Y dan Z tidak hanya dipengaruhi oleh variabel X. Ini mempunyai arti bahwa selain variabel X ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Y dan Z yaitu yang disebut sebagai faktor epsilon. Faktor epsilon adalah faktor atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian dan disimbolkan dengan huruf ϵ . Pengaruh epsilon terhadap variabel Y disimbolkan dengan $\rho_{Y\epsilon_1}$ dan pengaruh epsilon terhadap Z disimbolkan dengan $\rho_{Z\epsilon_2}$.

3.3 Definisi Operasional Variabel-Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan. Operasional variabel penelitian ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang mengarahkan tersusunnya instrument atau alat ukur penelitian.

Berdasarkan beberapa teori, konsep, proposisi dan asumsi mengenai variabel-variabel penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada kerangka pemikiran, maka definisi operasional variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X), Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu kegiatan yang terstruktur yang dilakukan oleh suatu kelompok individu dalam hal ini pegawai atau

staf UPT Disperindag ESDM Kabuapten Garut dalam melaksanakan serangkaian kegiatan yang didukung oleh kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diharapkan dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur melalui skor total jawaban responden dari item pertanyaan/ pernyataan yang diajukan, meliputi dimensi: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; serta (4) Birokrasi (Edwards III dalam Iskandar, 2017b: 221-222).

2. Variabel Antara (Y), Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis merupakan suatu kemampuan dan keahlian pegawai dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja yang mana melibatkan unsur-unsur Motivasi, Pembinaan, Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja, dan Akses Terhadap Sumber Informasi, yang diukur melalui skor total jawaban responden dari item pertanyaan/ pernyataan yang diajukan, meliputi dimensi: Motivasi, Pembinaan, Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja, dan Akses Terhadap Sumber Informasi (Coughlin dalam Iskandar, 2017b: 112-121).

3. Variabel Terikat (Z), Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat

Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan ukuran pencapaian suatu pekerjaan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, yang diukur melalui skor total jawaban responden dari item pertanyaan/ pernyataan yang diajukan, meliputi dimensi:

Produktivitas atau Produksi, Efisiensi, Kepuasan, dan Adaptasi (Gibson, Ivancevich, dan Donnely dalam Iskandar, 2017b: 329).

3.4 Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian

Berdasarkan definisi operasional variabel yang telah ditentukan dan model paradigma penelitian, maka untuk mengoperasionalkan variabel penelitian terlebih dahulu digambarkan pada tingkat dimensi dan indikator. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pengukuran variabel-variabel sebagai bahan analisis dan pembahasan hasil penelitian:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

| No | Variabel | Dimensi | Indikator | Butir Item |
|----|---|---------------|----------------|---|
| 1 | Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat (X) (Edwards III dalam Iskandar 2017b: 221-222) | 1. Komunikasi | a. Komunikator | 1) Komunikator memiliki kompetensi komunikasi yang baik; 2) Komunikator memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu. |
| | | | b. Pesan | 1) Isi kebijakan dapat difahami; 2) Isi kebijakan mendukung eksistensi pengelolaan pasar rakyat. |
| | | | c. Saluran | 1) Saluran/ media sosialisasi dilakukan secara interpersonal (antar orang per orang). 2) Saluran/ media sosialisasi dilakukan secara kelompok. |

| | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | d. Komunikasikan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Komunikasikan dapat memahami kebijakan yang disampaikan; 2) Komunikasikan dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. |
| | | | e. Umpan balik | <ol style="list-style-type: none"> 1) Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan; 2) Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi. |
| | | 2. Sumber daya | a. Anggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang transport; 2) Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang makan minum. |
| | | | b. Sarana | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana yang tersedia cukup mendukung; 2) Sarana yang tersedia didukung oleh teknologi informasi. |
| | | | c. Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1) Prasarana yang tersedia cukup representatif; 2) Prasarana yang tersedia bersih dan nyaman. |
| | | | d. Alat-alat | <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat-alat yang tersedia cukup mendukung; 2) Alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna. |
| | | 3. Disposisi | a. Rencana kerja yang terstruktur | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana kerja yang ada tertuang dalam restra; 2) Rencana kerja yang ada dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|---|
| | | | b. Konsultasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsultasi dilaksanakan pada setiap kegiatan; 2) Konsultasi dilakukan secara berkelanjutan. |
| | | | c. Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan; 2) Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan. |
| | | | d. Laporan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan dibuat secara ringkas dan jelas; 2) Laporan dibuat untuk melaporkan hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan. |
| | | 4. Birokrasi | a. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas dan terstruktur | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dengan jelas dan terstruktur; 2) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| | | | b. Wewenang yang jelas | <ol style="list-style-type: none"> 1) Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan teguran kepada pedagang; 2) Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada pedagang. |
| | | | c. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar operasional prosedur (SOP) ditetapkan dengan jelas dan terukur; 2) Standar operasional prosedur (SOP) berlaku bagi seluruh staf yang bertugas. |

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|---|
| | | | d. Koordinasi yang solid | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terjalin dengan solid; 2) Koordinasi antar Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Dinas terkait terjalin dengan harmonis. |
| | | | e. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut; 2) Hasil pengawasan terhadap Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala. |
| 2 | Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) (Coughlin dalam Iskandar, 2017b: 112-121) | 1. Motivasi | a. Kebutuhan berafiliasi | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebutuhan berafiliasi antar Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid; 2) Kebutuhan berafiliasi antar Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memacu dedikasi dan prestasi; 3) Dedikasi yang tinggi dapat menyelesaikan tugas dengan baik. |
| | | | b. Meningkatkan kompetensi staf | <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu diprioritaskan; 2) Program pengembangan karir staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berjalan sesuai dengan Perundangan yang ada; 3) Peningkatan karir di UPT Disperindag |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | ESDM Kab. Garut dapat meningkatkan kesejahteraan staf. |
| | | 2. Pembinaan | a. Monitoring | <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung; 2) Monitoring dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan; 3) Monitoring dilaksanakan secara berkala. |
| | | | b. Evaluasi kegiatan | <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi selalu dilaksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan; 2) Evaluasi dilaksanakan untuk menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan; 3) Evaluasi dilaksanakan secara berkala. |
| | | | c. Tindak lanjut | <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindak lanjut dilakukan untuk mengukur hasil evaluasi yang telah dilaksanakan; 2) Tindak lanjut dilakukan untuk meyakinkan laporan efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang telah dilaksanakan; 3) Tindak lanjut dilakukan untuk menentukan perencanaan dan pengembangan program kegiatan selanjutnya. |
| | | 3. Dukungan dan kerjasama dari mitra kerja | a. Solidaritas | <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut; 2) Kerjasama yang harmonis juga |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | <p>dilaksanakan antara UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);</p> <p>3) Kerjasama yang solid antar pihak menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi.</p> |
| | | | b. Integritas Sosial | <p>1) Integritas sosial dalam bekerja dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut;</p> <p>2) Integritas sosial menghasilkan <i>team work</i> yang solid;</p> <p>3) Integritas sosial yang dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat mempengaruhi iklim lingkungan sosial yang kondusif.</p> |
| | | 4. Akses terhadap sumber informasi | a. Kemudahan Informasi | <p>1) Kemudahan memperoleh informasi telah sesuai dengan yang dibutuhkan;</p> <p>2) Informasi yang diakses dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai;</p> <p>3) Informasi yang diperoleh digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada;</p> <p>4) Informasi yang diperoleh telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemerintah.</p> |
| | | | b. Pemahaman Informasi | <p>1) Pemahaman informasi telah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi staf UPT</p> |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|---|
| | | | | <p>Disperindag ESDM Kab. Garut;</p> <p>2) Pemahaman informasi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut didasarkan pada informasi yang diakses pada saat melaksanakan tugas;</p> <p>3) Pemahaman staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terkait informasi terbaru selalu disosialisasikan antar staf;</p> <p>4) Pimpinan dan segenap unsur terkait mengevaluasi keakuratan informasi yang diperoleh dan disosialisasikan.</p> |
| | | | c. Umpan balik (<i>feedback</i>) | <p>1) Umpan balik (<i>feedback</i>) yang bersifat membangun diinventarisir dengan baik;</p> <p>2) Umpan balik (<i>feedback</i>) yang telah diinventarisir diterima dan direspon dengan positif;</p> <p>3) Umpan balik (<i>feedback</i>) dievaluasi oleh Pimpinan dan unsur terkait lainnya sebelum digunakan menjadi pedoman perbaikan;</p> <p>4) Umpan balik (<i>feedback</i>) digunakan sebagai pedoman perbaikan program yang akan datang.</p> |
| 3 | Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z) | 1. Produktivitas yang memadai | a. Kemampuan UPT dalam melaksanakan tugas | 1) Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|---|---|
| | (Gibson, Ivancevich, dan Donnely (dalam Iskandar, 2017b: 329) | | | <p>peraturan yang berlaku;</p> <p>2) Pelaksanaan tugas UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.</p> | |
| | | | b. Mutu pencapaian program SKPD sesuai dalam pengelolaan | <p>1) Mutu pencapaian program SKPD telah sesuai dengan pengelolaan kerja di lapangan;</p> <p>2) Mutu pencapaian program SKPD telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.</p> | |
| | | | 2. Efisiensi | a. Perbandingan <i>output</i> dengan <i>input</i> dari setiap UPT | <p>1) Perbandingan <i>output</i> dengan <i>input</i> dari setiap UPT telah sesuai harapan;</p> <p>2) <i>Output</i> selalu dievaluasi dan dipertahankan kualitasnya.</p> |
| | | | | b. Pencapaian prestasi setiap UPT | <p>1) Pencapaian prestasi di setiap UPT telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;</p> <p>2) Pencapaian prestasi di setiap UPT memperoleh <i>rewards</i> dari Pimpinan.</p> |
| | | 3. Kepuasan | a. Manfaat yang diterima oleh staf | <p>1) Manfaat yang diterima oleh staf berupa kepuasan hasil kinerja yang baik;</p> <p>2) Manfaat yang diterima oleh staf berupa imbalan gaji dan tunjangan.</p> | |
| | | | b. Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat | <p>1) Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa bantuan modal bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat;</p> | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|---|
| | | | | 2) Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat. |
| | | | c. Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT | 1) Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu. 2) Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT dilaksanakan dengan terobosan sistem “ <i>one day service</i> ”. |
| | | | d. Rotasi atau mutasi staf | 1) Rotasi staf disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman; 2) Rotasi staf dievaluasi secara berkala. |
| | | | e. Disiplin staf UPT | 1) Disiplin staf UPT berasal dari hati nurani; 2) Disiplin staf UPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | | | f. Tanggungjawab staf UPT | 1) Tanggung jawab staf UPT yang dibebankan dijalankan dengan baik; 2) Tanggung jawab staf UPT yang diberikan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. |
| | | 4. Adaptasi | a. Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT | 1) Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon dengan baik; 2) Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | | direspons berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. |
| | | | b. Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT | 1) Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspons dengan baik; 2) Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspons berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. |

3.5 Alat Ukur Penelitian Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian adalah penghubung antara masalah penelitian yang dirumuskan secara teoritik dengan data yang dikumpulkan melalui pengamatan empirik (Iskandar, 2017d: 10). Alat ukur yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah angket berupa kuesioner terstruktur yang bersifat tertutup dimana responden hanya memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia dengan memberikan tanda sesuai petunjuk. Satuan pengukuran yang digunakan adalah *scoring*, yaitu pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban yang disediakan dalam pertanyaan penelitian. Tingkat pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah ordinal dan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu: (sangat baik/baik/cukup/tidak baik/sangat tidak baik), sebagaimana yang peneliti paparkan dalam table berikut:

Tabel 3.2
Kategori dan Bobot Skor Jawaban

| Alternatif Jawaban | Skoring |
|---|---------|
| Sangat Benar/Sangat Sering/Seluruhnya | 5 |
| Benar/Sering/Sebagian besar | 4 |
| Ragu-ragu/Kadang-kadang/Sebagian | 3 |
| Tidak Benar/Pernah/Sebagian Kecil | 2 |
| Sangat Tidak Benar/Tidak Pernah/Tidak Sama Sekali | 1 |

Sumber: (Iskandar, 2017d: 10)

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu alat ukur. Hal ini disampaikan oleh Iskandar (2017d: 147) bahwa validitas suatu alat ukur didefinisikan sebagai sifat suatu ukuran yang memungkinkan peneliti beranggapan bahwa alat ukur itu dapat dipergunakan untuk mengukur karakter yang hendak diukur.

Oleh karena itu mengingat ketepatan alat ukur sangat tergantung pada kualitas data yang akan dipakai dalam pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian validitas konseptual dan uji validitas lapangan.

1. Uji validitas konseptual

Menurut Iskandar (2017d: 151-152) dikenal pula adanya validitas isi, validitas konstruk, validitas budaya dan validitas muka. Validitas tersebut meliputi:

- a. Validitas isi adalah suatu tipe validitas atau alat tes kuantitatif. Item-itemnya harus tercakup dalam ukuran sehingga mencerminkan kemampuan dan tujuan orang yang

melakukan pengujian atau pengalaman pribadi dan latar belakang professional (Iskandar, 2017d: 152) dan merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional.

- b. Validitas Konstrak adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Konsep validitas konstruk sangatlah berguna pada alat ukur yang mengukur *trait* yang tidak memiliki kriteria eksternal misalnya berupa keagresifan yang tersembunyi (Iskandar, 2017d: 161).
- c. Validitas Budaya adalah validitas yang dimuat sesuai dengan konteks sosiobudaya pada penelitian tersebut.
- d. Validitas Muka adalah validitas yang sesuai dengan hasil penilaian pakar di bidang ilmu tertentu pada variabel penelitian tersebut dan pada alat ukur tertentu.

2. Uji Validitas Lapangan

Peneliti melakukan uji lapangan bertujuan untuk menguji validitas dan reabilitas alat ukur, data hasil uji tersebut dianalisis dengan menggunakan uji *Pearson Product Moment* (Iskandar 2017d: 37) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penentuan Nilai Korelasi (r)

Korelasi adalah suatu ukuran keeratan hubungan antara dua variabel (Iskandar, 2017d: Lampiran 28). Analisa korelasi (r) menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari Pearson (dalam Iskandar 2015a: 37) sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{[n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2][n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2]}}$$

Keterangan:

r = Nilai koefisien korelasi

X = Skor yang diperoleh subjek dalam tiap item

Y = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

$\sum X$ = Jumlah skor dalam distribusi item X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam distribusi item Y

n = Jumlah responden

b. Penilaian t_{hitung}

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi (r) dilakukan uji t pada $\alpha = 5\%$ atau $0,05$ dengan derajat kebebasan/ *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t_{hitung}

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

c. Penarikan Kaidah Keputusan

1. Jika $t_{hitung} > t_{a(n-2)}$ maka alat ukur yang digunakan valid.
2. Jika $t_{hitung} \geq t_{a(n-2)}$ maka alat ukur yang digunakan tidak valid.

Berikut adalah hasil uji validitas variabel X (Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat) disajikan dalam tabel 3.3. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel X
(Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat)

| Nomor Item | Koefisien Korelasi | t_{hitung} | T_{tabel} | Validitas |
|------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 0.4581 | 4.8886 | 1.6620 | valid |
| 2 | 0.7803 | 11.8376 | 1.6620 | valid |
| 3 | 0.4461 | 4.7284 | 1.6620 | valid |
| 4 | 0.5445 | 6.1585 | 1.6620 | valid |
| 5 | 0.7875 | 12.1199 | 1.6620 | valid |
| 6 | 0.5789 | 6.7357 | 1.6620 | valid |
| 7 | 0.8894 | 18.4554 | 1.6620 | valid |
| 8 | 0.8760 | 17.2333 | 1.6620 | valid |
| 9 | 0.5895 | 6.9241 | 1.6620 | valid |
| 10 | 0.6009 | 7.1309 | 1.6620 | valid |
| 11 | 0.1748 | 1.6840 | 1.6620 | valid |
| 12 | 0.2100 | 2.0377 | 1.6620 | valid |
| 13 | 0.3017 | 3.0021 | 1.6620 | valid |
| 14 | 0.6909 | 9.0670 | 1.6620 | valid |
| 15 | 0.7472 | 10.6659 | 1.6620 | valid |
| 16 | 0.7452 | 10.6032 | 1.6620 | valid |
| 17 | 0.4261 | 4.4684 | 1.6620 | valid |
| 18 | 0.3908 | 4.0275 | 1.6620 | valid |

| | | | | |
|----|--------|---------|--------|-------|
| 19 | 0.3017 | 3.0021 | 1.6620 | valid |
| 20 | 0.6909 | 9.0670 | 1.6620 | valid |
| 21 | 0.7472 | 10.6659 | 1.6620 | valid |
| 22 | 0.7452 | 10.6032 | 1.6620 | valid |
| 23 | 0.4261 | 4.4684 | 1.6620 | valid |
| 24 | 0.3908 | 4.0275 | 1.6620 | valid |
| 25 | 0.8789 | 17.4841 | 1.6620 | valid |
| 26 | 0.7999 | 12.6464 | 1.6620 | valid |
| 27 | 0.8187 | 13.5236 | 1.6620 | valid |
| 28 | 0.8760 | 17.2333 | 1.6620 | valid |
| 29 | 0.9055 | 20.2436 | 1.6620 | valid |
| 30 | 0.8760 | 17.2333 | 1.6620 | valid |
| 31 | 0.7826 | 11.9272 | 1.6620 | valid |
| 32 | 0.7693 | 11.4226 | 1.6620 | valid |
| 33 | 0.6594 | 8.3216 | 1.6620 | valid |
| 34 | 0.7693 | 11.4226 | 1.6620 | valid |
| 35 | 0.7281 | 10.0755 | 1.6620 | valid |
| 36 | 0.8187 | 13.5236 | 1.6620 | valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar 1.6620. Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel X dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Selanjutnya, berikut adalah hasil uji validitas variabel Y (Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis) yang disajikan dalam tabel 3.4. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Y

(Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis)

| Nomor Item | Koefisien Korelasi | t_{hitung} | T_{tabel} | Validitas |
|------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 0.7188 | 9.8077 | 1.6620 | valid |
| 2 | 0.5730 | 6.6327 | 1.6620 | valid |
| 3 | 0.7895 | 12.2050 | 1.6620 | valid |
| 4 | 0.4825 | 5.2254 | 1.6620 | valid |
| 5 | 0.4614 | 4.9343 | 1.6620 | valid |
| 6 | 0.3441 | 3.4763 | 1.6620 | valid |
| 7 | 0.5673 | 6.5352 | 1.6620 | valid |
| 8 | 0.1876 | 1.8116 | 1.6620 | valid |
| 9 | 0.6784 | 8.7591 | 1.6620 | valid |
| 10 | 0.7969 | 12.5152 | 1.6620 | valid |
| 11 | 0.7667 | 11.3284 | 1.6620 | valid |
| 12 | 0.4816 | 5.2128 | 1.6620 | valid |
| 13 | 0.5162 | 5.7170 | 1.6620 | valid |
| 14 | 0.6226 | 7.5485 | 1.6620 | valid |
| 15 | 0.6667 | 8.4858 | 1.6620 | valid |
| 16 | 0.2252 | 2.1925 | 1.6620 | valid |
| 17 | 0.1872 | 1.8084 | 1.6620 | valid |
| 18 | 0.3272 | 3.2855 | 1.6620 | valid |
| 19 | 0.3770 | 3.8615 | 1.6620 | valid |
| 20 | 0.7731 | 11.5630 | 1.6620 | valid |
| 21 | 0.5756 | 6.6781 | 1.6620 | valid |
| 22 | 0.4846 | 5.2559 | 1.6620 | valid |
| 23 | 0.5412 | 6.1050 | 1.6620 | valid |
| 24 | 0.7425 | 10.5145 | 1.6620 | valid |
| 25 | 0.7056 | 9.4466 | 1.6620 | valid |
| 26 | 0.1982 | 1.9179 | 1.6620 | valid |
| 27 | 0.6999 | 9.2973 | 1.6620 | valid |
| 28 | 0.6337 | 7.7719 | 1.6620 | valid |
| 29 | 0.6231 | 7.5573 | 1.6620 | valid |
| 30 | 0.4022 | 4.1669 | 1.6620 | valid |
| 31 | 0.6152 | 7.4037 | 1.6620 | valid |
| 32 | 0.6722 | 8.6136 | 1.6620 | valid |
| 33 | 0.5857 | 6.8546 | 1.6620 | valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar 1.6620. Berdasarkan perbandingan nilai

t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Y dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Kemudian, berikut adalah hasil uji validitas variabel Z (Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat) yang disajikan dalam tabel 3.5. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Z
(Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat)

| Nomor Item | Koefisien Korelasi | t_{hitung} | T_{tabel} | Validitas |
|------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 0.6529 | 8.1777 | 1.6620 | valid |
| 2 | 0.6529 | 8.1777 | 1.6620 | valid |
| 3 | 0.7856 | 12.0442 | 1.6620 | valid |
| 4 | 0.8839 | 17.9257 | 1.6620 | valid |
| 5 | 0.3996 | 4.1350 | 1.6620 | valid |
| 6 | 0.2680 | 2.6391 | 1.6620 | valid |
| 7 | 0.9033 | 19.9797 | 1.6620 | valid |
| 8 | 0.5044 | 5.5420 | 1.6620 | valid |
| 9 | 0.3697 | 3.7742 | 1.6620 | valid |
| 10 | 0.5249 | 5.8508 | 1.6620 | valid |
| 11 | 0.2204 | 2.1437 | 1.6620 | valid |
| 12 | 0.6868 | 8.9641 | 1.6620 | valid |
| 13 | 0.6352 | 7.8031 | 1.6620 | valid |
| 14 | 0.2288 | 2.2298 | 1.6620 | valid |
| 15 | 0.7534 | 10.8708 | 1.6620 | valid |
| 16 | 0.5338 | 5.9879 | 1.6620 | valid |
| 17 | 0.7862 | 12.0706 | 1.6620 | valid |
| 18 | 0.8063 | 12.9339 | 1.6620 | valid |
| 19 | 0.7253 | 9.9945 | 1.6620 | valid |
| 20 | 0.4015 | 4.1584 | 1.6620 | valid |
| 21 | 0.4450 | 4.7140 | 1.6620 | valid |
| 22 | 0.6650 | 8.4466 | 1.6620 | valid |
| 23 | 0.7037 | 9.3972 | 1.6620 | valid |
| 24 | 0.5709 | 6.5967 | 1.6620 | valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ diperoleh sebesar 1.6620. Berdasarkan perbandingan nilai

t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Z dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

3.5.3 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus handal (*reliable*). Suatu alat ukur dikatakan *reliable* apabila alat ukur tersebut memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut *reliable*. Oleh karena itu, reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur penelitian dalam mengukur gejala yang sama (Iskandar, 2017d: 166).

Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan nilai korelasi (r). Untuk menentukan nilai korelasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_1 = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{S_i^2}{S_r^2} \right\} = \dots\dots\dots$$

$$S_i^2 = \frac{J K_i}{n} - \frac{J K_s}{n^2}$$

$$S_r^2 = \frac{\sum Xr^2}{n} - \frac{(\sum Xr)^2}{n^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah responden

Jki : Jumlah kuadrat seluruh item

JKs : Jumlah kuadrat seluruh subjek

Xr : Skor masing-masing responden

K : Banyaknya butir pertanyaan/pernyataan

r : reliabilitas alat ukur

ΣSi : Jumlah varian item

Sr : Varian total

2. Penentuan nilai t hitung, rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai t hitung sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r : Koefisien

n : Jumlah responden

3. Penentuan kaidah Nilai t hasil (t_{hitung}) yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai tabel (t_{tabel}) untuk tingkat kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat

kebebasan (dk) = $n - 2$. Setelah dibandingkan, kemudian diambil keputusannya dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur penelitian yang digunakan tersebut *reliable*.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka alat ukur penelitian yang digunakan tersebut tidak *reliable*.

Pada alat ukur penelitian ini telah dilakukan uji reliabilitas dan hasilnya disajikan dalam tabel 3.6 (Hasil Uji Reliabilitas Variabel X). Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

| RELIABILITAS | |
|-----------------------------------|----------|
| Varians Total (St^2) | 59.713 |
| Varians Instrumen ($\sum Si^2$) | 13.674 |
| ALFA | 0.779 |
| t_{hitung} | 11.805 |
| t_{tabel} | 1.662 |
| Keputusan | Reliabel |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11.805 > 1.662$), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan Reliabel.

Selanjutnya, Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y disajikan dalam tabel 3.7. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

| RELIABILITAS | |
|-----------------------------------|----------|
| Varians Total (St^2) | 253.292 |
| Varians Instrumen ($\sum Si^2$) | 26.129 |
| ALFA | 0.907 |
| t_{hitung} | 20.394 |
| t_{tabel} | 1.662 |
| Keputusan | Reliabel |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($20.394 > 1.662$), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan Reliabel.

Selanjutnya, Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z disajikan dalam tabel 3.8. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z

| RELIABILITAS | |
|-----------------------------------|----------|
| Varians Total (St^2) | 108.408 |
| Varians Instrumen ($\sum Si^2$) | 14.497 |
| ALFA | 0.876 |
| t_{hitung} | 17.213 |
| t_{tabel} | 1.662 |
| Keputusan | Reliabel |

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2018

Berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17.213 > 1.662$), maka alat ukur yang digunakan dinyatakan Reliabel.

3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampling

Populasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Iskandar (2017d: 230), bahwa

“Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri tertentu.”

Dengan demikian, populasi penelitian merupakan jumlah keseluruhan objek yang diteliti atau unit analisis atau wilayah yang terdiri atas subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran (*target population*) adalah seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah tanggung jawab

Kepala Dinas Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang berjumlah 155 orang.

Adapun objek atau unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai unit pelaksana teknis (UPT) Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Data populasi selengkapnya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Populasi Penelitian

| No. | Nama UPTD | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|-----|-------------|----------------|------------|
| 1 | Guntur | 19 | |
| 2 | Kadungora | 10 | |
| 3 | Bayongbong | 9 | |
| 4 | Cikajang | 9 | |
| 5 | Leles | 11 | |
| 6 | Samarang | 11 | |
| 7 | Wanaraja | 13 | |
| 8 | Limbangan | 7 | |
| 9 | Malangbong | 5 | |
| 10 | Cisurupan | 5 | |
| 11 | Pameungpeuk | 7 | |
| 12 | Cibatu | 5 | |
| 13 | Garut Kota | 13 | |
| 14 | Sukawening | 7 | |
| 15 | Cilawu | 5 | |
| 16 | Singajaya | 2 | |

| | | | |
|--------|---------------|-----|--|
| 17 | Cisewu | 3 | |
| 18 | Karangpawitan | 7 | |
| 19 | Banyuresmi | 5 | |
| 20 | Bungbulang | 2 | |
| Jumlah | | 155 | |

Sumber: *Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, 2017*

Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, maka penentuan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *sensus sampling*, dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian Iskandar (2017d: 230). Sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang berjumlah 155 orang.

3.7 Sumber Data, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Proses Pengumpulan Data

3.7.1 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden sebanyak 155 pegawai (UPT) Disperindag ESDM Kabupaten Garut sebagai objek penelitian sesuai ruang lingkup dan kebutuhan.
- b. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun dari dokumen, catatan, peraturan perundang-undangan dan publikasi-publikasi yang menunjang penelitian.

Jenis Data berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang mendekati kebenaran dan data tersebut sifatnya valid yang mencakup data variabel-variabel penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak bisa dilihat langsung tetapi data tersebut ada, dan bersifat menunjang data penelitian.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan studi lapangan dan studi dokumentasi, sebagaimana pendapat Iskandar (2017c: 236) bahwa, “Pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan, mengumpulkan, mengkompilasi, menyusun fakta dan data“. Adapun sumber pengumpulan data diperoleh dari:

1. Studi dokumentasi (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dari laporan, dokumen, literatur dan hasil penelitian sejenis yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Pada penelitian ini studi dokumentasi yang dimaksud antara lain mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 4 ayat (1);
 - b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
- e) Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Untuk menentukan apakah dokumen itu layak atau tidak untuk dijadikan sumber data maka harus melakukan kritik internal dan kritik eksternal yaitu:

- a. Kritik internal harus berusaha mengkaji dan menelaah secara seksama tentang materi-materi dokumen tersebut mengenai keaslian dan kebenarannya, serta harus diperhatikan apakah materi tersebut masih layak digunakan atau tidak.
 - b. Kritik eksternal mencoba mengkaji, menelaah tentang orang atau lembaga yang membuat dokumentasi tadi, harus dilihat ada tidaknya lembaga yang menerbitkan naskah atau dokumen tersebut.
2. Studi lapangan (*field research*) yaitu meneliti secara langsung variabel-variabel yang dijadikan obyek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penelitian terutama mengamati aktivitas pegawai (UPT) Disperindag ESDM Kabupaten Garut dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pasar rakyat.
- b) Angket/kuisisioner, yakni teknik pengumpulan data dengan cara memberikan formulir berisi pertanyaan/ Pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai keadaan yang sebenarnya. Data yang ditampilkan adalah data sesuai dengan ukuran dari dimensi-dimensi ketiga variabel, yaitu: yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X), Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y), dan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z).
- c) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan informan kunci guna memperoleh data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi maupun studi dokumentasi, wawancara dilakukan kepada Pimpinan atau Kepala UPT, Kasubag UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

3.7.3 Proses Pengumpulan Data

Adapun fase pengumpulan data melalui penyebaran angket/kuisisioner yang dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Peneliti melapor atau membuat surat izin penelitian kepada instansi yang terkait penelitian, dalam hal ini Disperindag ESDM Kabupaten Garut.
- b. Peneliti mempersiapkan angket/kuisisioner yang akan disebar kepada responden tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, dan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat.
- c. Penentuan responden yaitu seluruh pegawai (UPT) Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang berjumlah sebanyak 155 orang.

2. Pelaksanaan

Angket/kuisisioner disebar kepada responden untuk dilakukan pengisian.

3. Evaluasi

Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pengumpulan data.

4. Tindak lanjut

Pada tahap ini peneliti secara bertahap mengumpulkan kuisisioner yang telah diisi oleh responden untuk ditindaklanjuti.

5. Pengakhiran

Fase ini merupakan kegiatan terakhir dalam pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengecekan terakhir di lapangan untuk memastikan bahwa kuisisioner yang disebar telah diisi oleh responden untuk mempersiapkan laporan penelitian.

3.8 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengujian hipotesis Penelitian

3.8.1 Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dianalisis secara statistik, baik secara deskriptif inferensial, maupun analisis hubungan antara variabel. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan melalui:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali instrumen penelitian (alat ukur) yang memuat data hasil penelitian tersebut (Iskandar, 2017d: 279). Peneliti melakukan pemeriksaan/penyuntingan data berupa kuesioner penelitian yang telah terkumpul dari responden, sehingga data yang terhimpun memenuhi harapan peneliti.
2. *Coding*, yaitu menuliskan kode-kode pada kategori jawaban responden dalam instrumen penelitian yaitu berupa angka atau nilai yang sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya (Iskandar, 2017d: 279). Proses pemberian identitas dengan cara memberikan kode-kode pada kategori jawaban responden dalam kuesioner penelitian, sehingga memiliki arti tertentu pada saat data dianalisis.
3. *Tabulating*, yaitu membuat tabel-tabel pengolahan data terdiri dari:
 - a). Tabel Frekuensi;
 - b). Tabel Himpunan Data;

c). Tabel Skor total (Iskandar, 2017d: 279).

3.8.2 Proses Transformasi Data

Sehubungan dengan pendekatan analisis yang digunakan, maka untuk keperluan analisis penulisan hipotesis data yang berskala ordinal, terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data berskala interval (Iskandar, 2017d: 46) melalui metode Interval Suksesif (*Method of Successive Interval*), yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperhatikan setiap item pertanyaan;
2. Menentukan frekuensi jawaban yang mendapat skor 1 - 5;
3. Menentukan proporsi dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah responden;
4. Menghitung proporsi kumulatif;
5. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal
6. Menentukan nilai skala untuk setiap nilai Z dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$SV \text{ (Scale value)} = \frac{(\text{destiny at lower Limit}) - (\text{Destiny at Upper Limit})}{(\text{area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit})}$$

7. Menghitung skor (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$SV_{\text{transformasi}} = SV - SV_{\text{minimum}} + 1$$

8. Analisis Data

Tujuan analisis data tersebut adalah menjadikan data mentah yang dikumpulkan sehingga mudah ditafsirkan menjadi informasi yang bermakna. Dalam proses pengolahan data mentah dipecahkan secara kelompok-kelompok kategori, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan makna untuk menjawab masalah yang diteliti atau untuk menguji hipotesis.

3.8.3 Teknik Pengujian Hipotesa Penelitian

Teknik analisis data dimaksudkan untuk melakukan hipotesis dan menjawab rumusan masalah yang diajukan, karena dalam penelitian ini akan digunakan skala pengukuran interval, maka data yang diperoleh dengan menggunakan statistik parametik. Adapun prosedur yang akan ditempuh untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Menghitung dan memeriksa kembali kelengkapan angket yang telah diisi oleh responden.
2. Memeriksa dan memberi skor pada jawaban responden.
3. Mengolah data uji statistik.

Selanjutnya, dari data skor jawaban responden, ditentukan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Jumlah skor total responden tiap variabel;
2. Skor tertinggi dan terendah tiap variabel;
3. Jumlah total kuadrat skor responden tiap variabel;
4. Rata-rata skor responden tiap variabel;
5. Simpangan baku skor responden tiap variabel;
6. Jumlah total hasil skor responden variabel X, Y, dan Z.

Teknik yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah analisis struktur dengan model analisis jalur (*Path Analysis*) yang dimaksudkan untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel antara maupun terhadap variabel terikat. Iskandar (2017d: 15) mengemukakan bahwa untuk menguji hipotesis kausalitas (sebab, akibat, pengaruh), dapat menggunakan uji analisis jalur (*path analysis*).

Pengujian hipotesis dilakukan secara langsung melalui pengujian masing-masing hipotesis dengan memperhatikan nilai-nilai koefisien jalur untuk setiap hipotesis (Iskandar 2017c: 46), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks korelasi (R) dengan variabel terikat (Z) serta variabel antara (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X) serta factor luar yang tidak teridentifikasi seperti dibawah ini:

$$R = \begin{vmatrix} r_{xx} & r_{xy} & r_{xz} \\ r_{yx} & r_{yy} & r_{yz} \\ r_{zx} & r_{zy} & r_{zz} \end{vmatrix}$$

$$r_{xy} = \frac{\sum xy^2 - \frac{1}{n} (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[\sum x^2 - \frac{1}{n} (x)^2][\sum y^2 - \frac{1}{n} (y)^2]}}$$

$$r_{xz} = \frac{\sum xz^2 - \frac{1}{n} (\sum x)(\sum z)}{\sqrt{[\sum x^2 - \frac{1}{n} (x)^2][\sum z^2 - \frac{1}{n} (z)^2]}}$$

$$r_{yz} = \frac{\sum yz^2 - \frac{1}{n} (\sum y)(\sum z)}{\sqrt{[\sum y^2 - \frac{1}{n} (y)^2][\sum z^2 - \frac{1}{n} (z)^2]}}$$

2. Menguji Koefisien Jalur ρ_{xy}

Statistik Uji:

$$t = \frac{P_{xy}}{\sqrt{\frac{1 - r^2}{n-2}}}, \text{ dimana } \rho_{xy} = r_{xy}$$

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \rho_{yx} \leq 0$: artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y tidak signifikan.

$H_0 : \rho_{yx} \geq 0$: artinya pengaruh variabel X terhadap Y signifikan.

Kriteria uji:

Tolak H_0 apabila $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers Matrik Korelasi (R^{-1}):

$$R^{-1} = \begin{vmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{yz} \\ & & C_{zz} \end{vmatrix}$$

4. Menghitung besar pengaruh:

$$P_{yz} = \frac{-C_{yz}}{C_{zz}}$$

$$P_{yz} = \frac{-C_{zy}}{C_{zz}}$$

$$P_{ZXY}^2 = P_{ZY} r_{ZY} + P_{ZY} r_{ZY}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur:

$$H_0 : P_{ZX} \leq 0 \text{ melawan } H_1 : P_{ZX} > 0$$

$$H_0 : P_{ZX} \cdot r_{ZX} + P_{ZX} \cdot r_{ZX}$$

Statistik uji:

$$t_x = \frac{\frac{P_{ZX}}{1 - P^2}}{\sqrt{\frac{ZYX}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}} \quad t_y = \frac{\frac{P_{ZY}}{1 - P^2}}{\sqrt{\frac{ZYX}{(n-k-1)(1 - R_{ZY}^2)}}}$$

Kriteria uji:

Tolak H_0 apabila $t = t_{(1-\alpha)(n-k-1)}$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

5. Menentukan besar pengaruh variabel lain:

$$P_{ys1}^2 \sqrt{1 - R_{yx}^2} \quad P_{ys2}^2 \sqrt{1 - R_{zyx}^2}$$

6. Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung :

a. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$\rho_{ZX} = r_{ZX} \cdot r_{ZX}$$

b. Pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z

$$\rho_{ZXY} = \rho_{ZX} \cdot r_{YX} \cdot \rho_{ZY}$$

c. Jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z

$$Z = \rho_{ZX} + \rho_{ZXY}$$

d. Pengaruh langsung variabel Y terhadap variabel Z

$$\rho_{ZY} = r_{ZY} \cdot r_{ZY}$$

3.9 Lokasi, Jadwal Waktu Penelitian dan Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Adapun waktu pelaksanaan yang diperlukan mulai dari tahap persiapan sampai pada ujian Tesis adalah 8 bulan, dengan langkah-langkah dan jadwal waktu penelitian secara rinci sebagai berikut:

1. Memilih masalah penelitian
2. Melakukan studi kepustakaan
3. Merumuskan masalah penelitian
4. Menyusun usulan penelitian
5. Seminar usulan penelitian
6. Melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian

7. Perbaikan usulan penelitian
8. Proses pengumpulan data
9. Pengelolaan dan analisis data
10. Penyusunan hasil penelitian (Tesis)
11. Ujian sidang Tesis
12. Perbaikan Tesis
13. Publikasi Tesis

Selanjutnya, langkah-langkah dan jadwal waktu penelitian secara rinci dilihat dari tabel berikut

Tabel 3.10
Langkah –langkah dan Jadwal Waktu Penelitian

| No | Uraian Kegiatan | Jadwal Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---|----|----|----|------|---|---|--|--|---|
| | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Memilih Masalah Penelitian | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Melakukan Studi Kepustakaan | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Merumuskan Masalah Penelitian (Identifikasi Masalah Penelitian) | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Menyusun Usulan Penelitian | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Melakukan Seminar Usulan Penelitian | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 6 | Melakukan Uji Validitas dan Reliabilitas | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Perbaikan Usulan Penelitian | | | | ■ | | | | | | | | |
| 8 | Proses Pengumpulan Data | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 9 | Melakukan Pengolahan dan Analisis Data | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 10 | Menyusun Tesis | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 11 | Ujian Sidang Tesis | | | | | | | | | | | | ■ |
| 12 | Perbaikan Tesis | | | | | | | | | | | | ■ |
| 13 | Publikasi Tesis | | | | | | | | | | | | ■ |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berkaitan dengan perekonomian masyarakat, keberadaan pasar rakyat (tradisional) menjadi suatu keharusan yang mana fungsi dan peranannya menjadi sangat penting bagi suatu masyarakat yang berdormisili di daerah tersebut. Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat berfungsi sebagai fasilitas pelayanan jual beli barang maupun jasa yang senantiasa dapat memberikan pelayanan perekonomian yang terjangkau, merata, efektif, efisien, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Harapan ideal tersebut juga dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Garut.

Akan tetapi guna mencapai kualitas pasar rakyat yang ideal yang sesuai dengan standarisasi penilaian Pemerintah Pusat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, dan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dibutuhkan perbaikan mutu pasar, peningkatan kinerja pegawai serta penerapan manajemen yang baik guna dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Permasalahan yang muncul dengan terbitnya kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat antara lain: ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai dan berkompeten di bidangnya, sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat oleh dinas terkait belum optimal, perubahan pola pikir pegawai yang tidak sama, dan dibutuhkannya anggaran yang tidak sedikit untuk memenuhi kriteria sarana dan prasarana pasar rakyat yang ideal sesuai dengan standarisasi Pemerintah pusat.

4.1.1 Keadaan Permasalahan Pasar Rakyat (Tradisional)

Kondisi yang terjadi di pasar rakyat di Kabupaten Garut saat ini perlu perhatian dari pemangku dan pembuat kebijakan, baik internal maupun eksternal UPT Disperindag ESDM serta Dinas terkait lainnya di Kabupaten Garut. Hal ini berkaitan dengan efektivitas pengelolaan pasar rakyat dimana beberapa program yang dilaksanakan oleh UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sesuai harapan, hal ini ditunjukkan dengan beberapa capaian program kerja yang masih rendah. Selain itu terdapat permasalahan lain yang menyangkut kinerja pegawai di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Berkaitan dengan kinerja pegawai tersebut, umumnya pegawai yang mengabdikan diri di lingkungan UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, dimana hal ini berdampak terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang berjumlah 85 pasar yang tersebar di Kabupaten Garut dengan jumlah kios/ los ditambah PKL sebanyak 16.577, dan jumlah pedagang sebanyak 15.816. Seperti diketahui, dengan kurangnya jumlah pegawai UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang sementara ini berjumlah 155 orang secara

rasio perbandingan akan sangat berpengaruh pada kinerja pegawai yang kemudian berimbas pula pada efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang ada.

Selain permasalahan internal berkaitan dengan kinerja pegawai yang belum optimal, UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dihadapkan pula dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri berupa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati berupa Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Ketiga kebijakan tersebut menuntut adanya perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh pasar rakyat, maka dengan itu perlu dilakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana, pelayanan pedagang, serta kualitas pegawai UPT Disperindag ESDM sendiri.

Akan tetapi, apabila ditinjau dari sudut pandang profesional pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat tersebut masih belum optimal. Hal itu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten di bidangnya.

Dari aspek pegawai, jumlah formasi pegawai PNS UPT Disperindag ESDM masih mengalami kekurangan, dimana pegawai UPT Disperindag ESDM masih terdiri dari pegawai PNS, TKK, DAN TKS sebanyak 155 se-Kabupaten Garut. Keterbatasan pegawai di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut menyebabkan seorang pegawai bisa menangani beberapa program. Apabila mengacu pada standar pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat dimana satu program mempunyai SOP dan dipertanggungjawabkan tersendiri, maka bisa dibayangkan satu orang pegawai harus membuat SOP dan mempertanggungjawabkan beberapa program sekaligus.

- b. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat yang seyogyanya dilakukan oleh dinas terkait belum dilaksanakan secara optimal.

Seyogyanya kebijakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat disosialisasikan sejak jauh-jauh hari yang mana hal ini dilakukan oleh dinas terkait yaitu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) UPT Disperindag dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) UPT Bapenda. Dalam ranah pembina pedagang pasar dan pengelolaan pasar rakyat berada dibawah UPT Disperindag, adapun secara keorganisasian pasar rakyat berada dibawah wewenang Bapenda. Dikarenakan terdapat dua SKPD yang berbeda yang menangani keberadaan pasar rakyat, maka kesulitan dalam melakukan koordinasi ini sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari kerana kentalnya ego sektoral yang pada akhirnya masalah ini menjadi salah satu sebab munculnya ketidakefektifan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat, khususnya di Kabupaten Garut.

- c. Adanya perubahan pola pikir pegawai UPT Disperindag ESDM yang tidak sama.

Perubahan pola pikir yang basis pada standar pendapatan retribusi pasar sebagai ajang penilaian standard keberhasilan pengelolaan pasar rakyat mulai mengalami perubahan menjadi pola pikir yang berbasis pada standar pelayanan yang mengedepankan perbaikan perilaku pedagang, perbaikan sarana dan prasarana pasar, mensosialisasikan serta menjalankan peraturan yang ada demi terciptanya situasi pasar yang teratur dan disiplin menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan kedua pola pikir di atas, pola pikir lama hanya akan menyentuh tataran pendapatan keuangan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa memperdulikan kualitas dan kenyamanan pelayan transaksi yang terjadi di pasar rakyat tersebut. Perbedaan akan terjadi apabila fungsi perbaikan perilaku pedagang, perbaikan sarana dan prasarana pasar, mensosialisasikan serta menjalankan peraturan yang ada demi terciptanya situasi pasar yang teratur dan disiplin akan melahirkan standar pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai konsumen, disamping terpenuhinya terstandar pendapatan keuangan yang diperoleh dari pengelolaan pasar yang optimal. Selanjutnya, dengan pengelolaan pasar yang optimal, keberadaan pasar tetap akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat diandalkan.

- d. Dibutuhkannya anggaran yang tidak sedikit untuk memenuhi kriteria sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat.

Sedangkan berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk pengelolaan pasar saat ini masih menjadi kendala mendasar yang dirasakan oleh UPT Disperindag ESDM, karena anggaran yang dimiliki belum mencukupi untuk mengganti atau menambah sarana dan prasarana sesuai standar Peraturan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014, dan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016. Walaupun terdapat anggaran pengelolaan pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini APBD, akan tetapi tentunya memerlukan waktu dalam proses pengajuan dan persetujuan Pemerintah Daerah dan DPRD.

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Berkenaan dengan kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, kebijakan tersebut tidak terlepas dari reformasi kerangka hukum di bidang perekonomian, yang diawali oleh amandemen UUD 1945 pada tahun 1999, khususnya pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dasar perubahan ini, sehingga ditetapkan pula revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611). Melalui Undang-Undang yang baru ini, perekonomian merupakan hak asasi seluruh rakyat Indonesia dan salah satu unsur kesejahteraan rakyat yang harus dipenuhi, dan hal ini harus berasal dari usaha kecil, kemudian menuju usaha menengah, dan usaha berskala nasional. Adapun dalam pelaksanaannya setiap kegiatan dalam upaya untuk

memelihara dan meningkatkan derajat perekonomian rakyat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga dalam rangka pembentukan kesejahteraan rakyat Indonesia, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan pelengkap bagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yaitu: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern tersebut, kemudian Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan revisi Peraturan yang diregister dengan Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan ini merupakan penjelas dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang detail pelaksanaan penataan serta pembinaan dalam mengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini, diharapkan berdampak besar pada peningkatan dan pemerataan akses perekonomian di Indonesia, dimana mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik akan perekonomian di Indonesia bisa menjadi lebih baik dan dapat menjadi bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional.

Guna menjamin kualitas pelayanan perekonomian secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu, khususnya di Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Garut

kemudian menerbitkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Bupati ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yaitu UPT Disperindag ESDM dan Bapeda Kabupaten Garut dapat dengan jelas dan terarah mengecek dan menilai kelayakan tempat, fasilitas, dan pedagang, serta barang yang tersedia di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Garut. Kebijakan tersebut juga menjamin perbaikan mutu, sarana, dan prasarana pasar tradisional yang keberadaannya tidak kalah oleh pasar modern. Selain itu kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional ini menjamin masyarakat dapat berbelanja dengan puas dan nyaman sehingga perekonomian rakyat kelas bawah dan menengah yang notabene mengandalkan berjualan di pasar tradisional tetap dapat bertahan dan semakin berkembang, sehingga perekonomian rakyat dapat menjadi lebih baik. Dengan perbaikan ekonomi di kelas usaha kecil dan menengah ini, diharapkan dapat menjadi penyumbang bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Garut.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, secara umum tugas pokok UPT Disperindag ESDM diantaranya adalah:

1. Mensosialisasikan serta menjalankan peraturan yang ada demi terciptanya situasi pasar yang teratur dan disiplin;
2. Memperbaiki perilaku pedagang; serta
3. Memelihara dan atau memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Adapun fungsi Disperindag ESDM khususnya UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dalam pengelolaan pasar rakyat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan di atas, diantaranya, yaitu untuk:

1. Menetapkan nilai (*sets value*). Penetapan nilai, dalam ekonomi pasar merupakan suatu proses menentukan harga sesuai dengan ukuran nilainya.
2. Mengorganisir produksi. Mengorganisir produksi merujuk pada adanya harga-harga produksi di pasar, yang kemudian mendorong produsen (*entrepreneur*) memilih metode produksi yang efisien.
3. Mendistribusikan barang. Mendistribusikan barang merujuk pada kemampuan seseorang membeli barang tergantung pada penghasilannya.
4. Menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penyelenggaraan penjatahan merujuk pada penjatahan inti dari adanya harga dan barang atau jasa.
5. Mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Fungsi ini merujuk pada daya tahan stok barang yang disimpan dan disiapkan guna didistribusikan di masa datang sehingga menghindari adanya kelangkaan barang.

4.2 Karakteristik Responden

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas Disperindag ESDM

Kabupaten Garut. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 155 orang. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini, peneliti klasifikasikan berdasarkan usia, pendidikan terakhir, masa kerja, dan pangkat/ golongan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pegawai UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran usia responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| No. | Golongan Kelompok Umur | Jumlah | Prosentase (%) |
|---------------|------------------------|------------|----------------|
| 1. | < 25 | - | - |
| 2. | 25-30 | 12 | 7,74 |
| 3. | 31-35 | 18 | 11,62 |
| 4. | 36-40 | 32 | 20,64 |
| 5. | 41-45 | 28 | 18,06 |
| 6. | 46-50 | 25 | 16,13 |
| 7. | 51-55 | 21 | 13,55 |
| 8. | > 55 | 19 | 12,26 |
| Jumlah | | 155 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran usia responden paling banyak pada kisaran 36 - 40 tahun yaitu berjumlah 32 orang atau 20,64% dari total keseluruhan responden. Sedangkan yang paling sedikit pada kisaran 25-30 tahun yaitu berjumlah 12 orang, atau hanya 7,74% dari total keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi usia, keseluruhan responden berada dalam usia dewasa dan dapat dijadikan

sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas dan akurat sesuai dengan kepentingan penelitian.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pegawai UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| No. | Pendidikan | Jumlah | Prosentase (%) |
|---------------|----------------|------------|----------------|
| 1. | SMU/ Sederajat | 106 | 68,39 |
| 2. | Diploma | 4 | 2,58 |
| 3. | Strata 1 (S1) | 45 | 29,03 |
| Jumlah | | 155 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden pada umumnya berada pada jenjang SMU/ Sederajat sebanyak 106 orang atau 68,39% dari keseluruhan responden. Hal ini dapat menggambarkan bahwa rata-rata responden dapat dikategorikan sudah cukup faham dan mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai akurasi yang cukup baik.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pegawai UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran masa kerja responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

| No. | Golongan Kelompok Masa Kerja | Jumlah | Prosentase (%) |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| 1 | <1 tahun | - | - |
| 2 | 1 – 3 tahun | 4 | 2,56 |
| 3 | 4 – 6 tahun | 8 | 5,16 |
| 4 | 7 – 9 tahun | 20 | 12,90 |
| 5 | 10 – 12 tahun | 37 | 23,87 |
| 6 | 13 – 15 tahun | 42 | 27,09 |
| 7 | >15 tahun | 44 | 28,38 |
| Jumlah | | 155 | 100 |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa masa kerja responden pada umumnya berada pada kisaran >15 tahun, yaitu sebanyak 44 orang atau sebesar 28,38%, dan paling sedikit pada kisaran 1 – 3 tahun, yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 2,56%, dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada masa sangat berpengalaman untuk memahami permasalahan yang diteliti sehingga dianggap penelitian yang dilakukan mempunyai akurasi yang baik.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pegawai UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran Pangkat/Golongan responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

| No. | Golongan Kelompok Pangkat/Golongan | Jumlah | Prosentase (%) |
|---------------|------------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Golongan I | 3 | 1,93 |
| 2 | Golongan II | 58 | 37,42 |
| 3 | Golongan III | 45 | 29,03 |
| 4 | Non PNS (TKK/TKS) | 49 | 31,61 |
| Jumlah | | 155 | 100,00 |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa modus Pangkat/Golongan responden secara umum berada pada Golongan II, sebanyak 58 orang atau 37,42%, dan yang paling sedikit berada pada Pangkat/Golongan I sebanyak 3 orang atau sebesar 1,93% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah cukup berpengalaman dalam menjawab setiap pertanyaan/ pernyataan yang diajukan, sehingga akurasi dari jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, dan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih

dan dianggap paling sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 155 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden adalah 155 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah kumulatif nilai terbesar = $155 \times 5 = 775$
 - b. Jumlah kumulatif nilai terkecil = $155 \times 1 = 155$
 - c. Nilai persentase terbesar adalah = $(775/775) \times 100\% = 100\%$
 - d. Nilai persentase terkecil = $(155/775) \times 100\% = 20\%$,
 - e. Dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$ dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar = $(80\%)/5 = 16\%$ sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

| No | Persentase | Kriteria Penilaian |
|----|------------|--------------------|
| 1 | 20-35,99 | Sangat kurang baik |
| 2 | 36-51,99 | Kurang baik |
| 3 | 52-67,99 | Cukup baik |
| 4 | 68-83,99 | Baik |
| 5 | 84-100 | Sangat baik |

4.3.1 Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat rakyat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 36 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 36 pernyataan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|------------|
| 1 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut sebagai komunikator memiliki kompetensi komunikasi yang baik. | 622 | 80.26% | Baik |
| 2 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut sebagai komunikator memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu. | 622 | 80.26% | Baik |
| 3 | Isi kebijakan tentang Pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat dapat difahami oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 620 | 80.00% | Baik |
| 4 | Isi kebijakan mendukung eksistensi pengelolaan pasar rakyat. | 620 | 80.00% | Baik |
| 5 | Saluran/ media sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan pasar rakyat dilakukan secara interpersonal (antar orang per orang). | 620 | 80.00% | Baik |
| 6 | Saluran/ media sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan pasar rakyat dilakukan secara kelompok. | 639 | 82.45% | Baik |
| 7 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat memahami kebijakan yang disampaikan. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| 8 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |
| 9 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan pengelolaan pasar rakyat. | 621 | 80.13% | Baik |
| 10 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi. | 634 | 81.81% | Baik |
| 11 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang transport. | 631 | 81.42% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|--|------------------|------------|-------------|
| 12 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang makan minum. | 626 | 80.77% | Baik |
| 13 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, sarana yang tersedia cukup mendukung. | 626 | 80.77% | Baik |
| 14 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, sarana yang tersedia didukung oleh teknologi informasi. | 617 | 79.61% | Baik |
| 15 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia cukup representatif. | 634 | 81.81% | Baik |
| 16 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia bersih dan nyaman. | 649 | 83.74% | Baik |
| 17 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, alat-alat yang tersedia cukup mendukung. | 629 | 81.16% | Baik |
| 18 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna. | 606 | 78.19% | Baik |
| 19 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada tertuang dalam restra. | 663 | 85.55% | Sangat Baik |
| 20 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. | 620 | 80.00% | Baik |
| 21 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, konsultasi dilaksanakan pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan. | 607 | 78.32% | Baik |
| 22 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, konsultasi dilakukan secara berkelanjutan. | 636 | 82.06% | Baik |
| 23 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan. | 607 | 78.32% | Baik |
| 24 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan. | 608 | 78.45% | Baik |
| 25 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, laporan kegiatan dibuat secara ringkas dan jelas. | 607 | 78.32% | Baik |
| 26 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, laporan dibuat untuk melaporkan hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan. | 621 | 80.13% | Baik |
| 27 | Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dengan jelas dan terstruktur. | 611 | 78.84% | Baik |
| 28 | Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. | 597 | 77.03% | Baik |
| 29 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan teguran kepada pedagang. | 621 | 80.13% | Baik |
| 30 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada pedagang. | 623 | 80.39% | Baik |
| 31 | Standar operasional prosedur (SOP) yang ada di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut ditetapkan dengan jelas dan terukur. | 581 | 74.97% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------|
| 32 | Standar operasional prosedur (SOP) yang ada di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, berlaku bagi seluruh staf yang bertugas. | 578 | 74.58% | Baik |
| 33 | Koordinasi antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terjalin dengan solid. | 581 | 74.97% | Baik |
| 34 | Koordinasi antar Staf UPT Disperindag ESDM dengan Dinas terkait lainnya di Kab. Garut terjalin dengan harmonis. | 622 | 80.26% | Baik |
| 35 | Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 606 | 78.19% | Baik |
| 36 | Hasil pengawasan terhadap Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala. | 594 | 76.65% | Baik |
| JUMLAH | | | 2842.32% | |
| RATA-RATA | | | 78.95% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat adalah baik yaitu sebesar 78,95% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat secara umum dianggap memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi berada pada butir item: *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada tertuang dalam restra*, sebesar 85.55%, dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, secara umum item tersebut dianggap sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, setiap pegawai yang mengabdikan di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menganggap bahwa setiap rencana kerja telah secara rinci dan jelas tertuang dalam rencana strategis atau restra. Oleh karenanya, pegawai dapat memahami dan melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam restra. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa para pegawai yang mengabdikan di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sama-sama

mengetahui dan memahami bahwa setiap program kerja, baik program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang semuanya telah dituangkan dalam rencana strategis yang garis besarnya telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, dan dijabarkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada item: *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan*, sebesar 64.90%, dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, komunikasikan (staf UPT) belum dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya staf UPT sebagai penerima isi kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat belum dapat melaksanakannya dengan optimal dikarenakan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan, seperti terbatasnya jumlah pegawai UPT, terbatasnya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang tidak membutuhkan dana sedikit untuk mengelola sekitar 50 pasar rakyat yang tersebar di wilayah Kabupatén Garut. Menurut hasil wawancara, beberapa responden menjawab bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang ideal tidak mudah dikarenakan kondisi riil di lapangan yang menuntut pelayanan lebih baik dari segi sumber daya, sarana prasarana, perbaikan system, dan pendanaan.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat, rincian tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.3.1.1 Dimensi Komunikasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi komunikasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Dimensi
Komunikasi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|------------|
| 1 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut sebagai komunikator memiliki kompetensi komunikasi yang baik. | 622 | 80.26% | Baik |
| 2 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut sebagai komunikator memiliki komitmen menyelesaikan tugas sesuai batas waktu. | 622 | 80.26% | Baik |
| 3 | Isi kebijakan tentang Pelaksanaan pengelolaan pasar rakyat dapat difahami oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 620 | 80.00% | Baik |
| 4 | Isi kebijakan mendukung eksistensi pengelolaan pasar rakyat. | 620 | 80.00% | Baik |
| 5 | Saluran/ media sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan pasar rakyat dilakukan secara interpersonal (antar orang per orang). | 620 | 80.00% | Baik |
| 6 | Saluran/ media sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan pasar rakyat dilakukan secara kelompok. | 639 | 82.45% | Baik |
| 7 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat memahami kebijakan yang disampaikan. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| 8 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |
| 9 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Umpan balik dijadikan pedoman untuk mendapatkan koreksi tentang hasil pekerjaan pengelolaan pasar rakyat. | 621 | 80.13% | Baik |
| 10 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi. | 634 | 81.81% | Baik |
| JUMLAH | | | 777.68% | |
| RATA-RATA | | | 77.77% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi komunikasi rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 77,77% dari

seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, secara umum komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator dianggap memuaskan.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Umpan balik digunakan untuk memacu capaian prestasi*, sebesar 81.81%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, umpan balik yang diterima oleh pegawai UPT Disperindag ESDM Kab. Garut diterima dengan baik, dipilah dan diprioritaskan mana yang termasuk umpan balik yang membangun dan mana yang tidak. Setelah dipilih, umpan balik yang membangun kemudian digunakan untuk memacu capaian prestasi semua pegawai UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. Oleh karenanya, responden memberikan jawaban terhadap item ini dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hasilnya menunjukkan bahwa responden telah berkomitmen untuk sama-sama terbuka menerima masukan atau umpan balik dari pihak mana pun demi perbaikan kinerja UPT Disperindag ESDM Kab. Garut secara umum.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, komunikasikan (staf UPT) dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan*, sebesar 64.90%, dengan kriteria cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, komunikasikan (staf UPT) belum dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya staf UPT sebagai penerima isi kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat belum dapat melaksanakannya dengan optimal dikarenakan berbagai Kendala

yang ditemukan di lapangan, seperti terbatasnya jumlah pegawai UPT, terbatasnya anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang tidak membutuhkan dana sedikit untuk mengelola sekitar 50 pasar rakyat yang tersebar di wilayah Kabuapten Garut. Menurut hasil wawancara, beberapa responden menjawab bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang ideal tidak mudah dikarenakan kondisi riil di lapangan yang menuntut pelayanan lebih baik dari segi sumber daya, sarana prasarana, perbaikan system, dan pendanaan.

4.3.1.2 Dimensi Sumber daya

Untuk mengetahui kondisi dimensi sumber daya, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Dimensi Sumber
daya

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|----------|
| 1 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang transport. | 631 | 81.42% | Baik |
| 2 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk uang makan minum. | 626 | 80.77% | Baik |
| 3 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, sarana yang tersedia cukup mendukung. | 626 | 80.77% | Baik |
| 4 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, sarana yang tersedia didukung oleh teknologi informasi. | 617 | 79.61% | Baik |
| 5 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia cukup representatif. | 634 | 81.81% | Baik |
| 6 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia bersih dan nyaman. | 649 | 83.74% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|----------|
| 7 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, alat-alat yang tersedia cukup mendukung. | 629 | 81.16% | Baik |
| 8 | Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna. | 606 | 78.19% | Baik |
| JUMLAH | | | 647.48% | |
| RATA-RATA | | | 80.94% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi sumber daya, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 80,94% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, secara umum sumber daya dianggap memuaskan oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia bersih dan nyaman*, dengan persentase 83,74% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, prasarana yang tersedia bersih dan nyaman. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, belum semua pasar rakyat menyediakan prasarana yang bersih dan nyaman, akan tetapi keadaan pasar rakyat sekarang sudah lebih baik dibanding dengan kondisi tahun-tahun ke belakang. Oleh karenanya, responden menjawab bahwa butir item ini masuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara, para responden membenarkan adanya perbaikan kondisi pasar rakyat dibandingkan kondisi sebelumnya. Perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat dilaksanakan secara bertahap dalam merehab fisik pasar rakyat yang berjumlah 50 se-Kabupaten Garut.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Dalam pelaksanaan program kebijakan pengelolaan pasar rakyat, alat-alat yang tersedia digunakan tepat guna*, dengan persentase 78.19%, dan termasuk ke dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, alat-alat tersedia belum sepenuhnya tepat guna dikarenakan adanya berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, alat – alat yang diperlukan untuk pengelolaan pasar rakyat masih dapat dikatakan terbatas dikarenakan terbentur dengan kendala pembiayaan. Sebagaimana diketahui, bahwa peralatan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar umumnya tergolong alat-alat berat, sehingga harganya relative mahal. Kemudian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mengelola pasar rakyat yang ada belum sepenuhnya tepat guna karena terbatasnya sumber daya manusia/ petugas yang memenuhi syarat kualifikasi keahlian dalam mengoperasikan peralatan tersebut.

4.3.1.3 Dimensi Disposisi

Untuk mengetahui kondisi dimensi disposisi atau sikap dan perilaku aparatur, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Dimensi
Disposisi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|-------------|
| 1 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada tertuang dalam restru. | 663 | 85.55% | Sangat Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|----------------|----------|
| 2 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada dibuat berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. | 620 | 80.00% | Baik |
| 3 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, konsultasi dilaksanakan pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan. | 607 | 78.32% | Baik |
| 4 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, konsultasi dilakukan secara berkelanjutan. | 636 | 82.06% | Baik |
| 5 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir program kegiatan. | 607 | 78.32% | Baik |
| 6 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan. | 608 | 78.45% | Baik |
| 7 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, laporan kegiatan dibuat secara ringkas dan jelas. | 607 | 78.32% | Baik |
| 8 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, laporan dibuat untuk melaporkan hasil program kegiatan yang telah dilaksanakan. | 621 | 80.13% | Baik |
| JUMLAH | | | 641.16% | |
| RATA-RATA | | | 80.15% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi disposisi, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 80,15% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, disposisi secara umum dianggap memuaskan.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, rencana kerja yang ada tertuang dalam restra*, dengan persentase 85,55% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, secara umum item tersebut dianggap sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, setiap pegawai yang mengabdikan di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menganggap bahwa setiap rencana kerja telah secara rinci dan jelas tertuang dalam rencana strategis atau restra. Oleh karenanya, pegawai dapat memahami dan melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang tertuang dalam restra.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa para pegawai yang mengabdikan diri di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sama-sama mengetahui dan memahami bahwa setiap program kerja, baik program jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang semuanya telah dituangkan dalam rencana strategis yang garis besarnya telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, dan dijabarkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item Di UPT *Disperindag ESDM Kab. Garut*, *konsultasi dilaksanakan pada setiap kegiatan program yang dilaksanakan*, Kemudian di UPT *Disperindag ESDM Kab. Garut*, *laporan kegiatan dibuat secara ringkas dan jelas*, dengan persentase 78,32%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, tidak semua responden menilai bahwa konsultasi tidak selalu dilaksanakan pada setiap kegiatan program, disamping itu laporan kegiatan belum juga dibuat oleh seluruh pegawai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program kegiatan. Oleh karenanya, kedua item di atas dinilai sebagai butir item terendah, meskipun demikian kedua butir item tersebut masih termasuk ke dalam kriteria baik. Adapun hasil wawancara menunjukkan bahwa konsultasi dilaksanakan hanya sewaktu-waktu saja ketika ada permasalahan yang serius. Disamping itu laporan yang dibuat oleh pegawai hanya beberapa saja. Hal ini disebabkan karena kendala sumber daya manusia yang masih belum profesional dimana umumnya masih berasal dari lulusan SMU/ sederajat.

4.3.1.4 Dimensi Birokrasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi birokrasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing

dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Dimensi
Birokrasi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|----------------|----------|
| 1 | Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tertuang dengan jelas dan terstruktur. | 611 | 78.84% | Baik |
| 2 | Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab. | 597 | 77.03% | Baik |
| 3 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan teguran kepada pedagang. | 621 | 80.13% | Baik |
| 4 | Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada pedagang. | 623 | 80.39% | Baik |
| 5 | Standar operasional prosedur (SOP) yang ada di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut ditetapkan dengan jelas dan terukur. | 581 | 74.97% | Baik |
| 6 | Standar operasional prosedur (SOP) yang ada di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, berlaku bagi seluruh staf yang bertugas. | 578 | 74.58% | Baik |
| 7 | Koordinasi antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terjalin dengan solid. | 581 | 74.97% | Baik |
| 8 | Koordinasi antar Staf UPT Disperindag ESDM dengan Dinas terkait lainnya di Kab. Garut terjalin dengan harmonis. | 622 | 80.26% | Baik |
| 9 | Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 606 | 78.19% | Baik |
| 10 | Hasil pengawasan terhadap Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala. | 594 | 76.65% | Baik |
| JUMLAH | | | 776.00% | |
| RATA-RATA | | | 77.60% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi, rata-rata penilaiannya adalah sangat baik dengan rata-rata sebesar 77,60% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi struktur birokrasi, secara umum dinilai baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item *Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada pedagang*, dengan persentase 80,39% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pegawai/ staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berwenang memberikan penyuluhan kepada para pedagang agar para pedagang dapat mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan, jujur dalam bertransaksi, serta mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengelola usahanya dengan baik. Oleh karenanya butir item ini dinilai sebagai butir item tertinggi dalam dimensi birokrasi. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai/ staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berjalan dengan cukup baik. Selain itu, penyuluhan juga melibatkan unsur terkait seperti dari dinas Kesehatan yang bertugas memberikan penyuluhan tentang hidup sehat di kawasan pasar, dan unsur independen yang melibatkan pemerhati ekonomi dan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, para responden menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan adalah salah satu agenda rutin yang dilaksanakan paling tidak 2 x dalam 6 bulan untuk mengadakan dialog dengan para pedagang yang berjualan di pasar rakyat. Sehingga, masukan/ umpan balik dapat langsung disampaikan kepada *Staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut* yang mewakili unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Standar operasional prosedur (SOP) yang ada di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, berlaku bagi seluruh staf yang bertugas*, dengan persentase 74,58%, dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, standar operasional prosedur (SOP) yang ada dan digunakan di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut belum

sepenuhnya difahami oleh semua pegawai/ staf yang bertugas, sehingga kejelasan SOP tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal, sehingga akurasi keterukurannya masih belum mencapai nilai optimal. Sehingga, secara presentase penilaian responden pada butir item ini tergolong nilai yang paling rendah, yaitu 74,58%, akan tetapi secara kategori masih dianggap baik. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut belum sepenuhnya jelas dan terukur. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor sumber daya manusia di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut masih terbatas dalam artian masih jarang staf dengan latar belakang pendidikan sarjana. Sehingga, terdapat kendala dalam menelaah, mendalami dan memahami SOP tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa standar operasional prosedur (SOP) belum sepenuhnya disosialisasikan, sehingga SOP tersebut belum sepenuhnya difahami oleh semua jenjang lapisan pegawai/ staf yang bertugas di Disperindag ESDM Kab. Garut.

4.3.2 Variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

Untuk mengetahui kondisi variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 33 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 33 pernyataan tentang Manajemen Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Kriteria Penilaian Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|----------|
| 1 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, kebutuhan berafiliasi antar Staf tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid. | 628 | 81.03% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|-------------|
| 2 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Kebutuhan berafiliasi antar Staf memacu dedikasi dan prestasi. | 622 | 80.26% | Baik |
| 3 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, dedikasi yang tinggi dapat menyelesaikan tugas dengan baik. | 628 | 81.03% | Baik |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu diprioritaskan. | 623 | 80.39% | Baik |
| 5 | Program pengembangan karir staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berjalan sesuai dengan Perundangan yang ada. | 622 | 80.26% | Baik |
| 6 | Peningkatan karir di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat meningkatkan kesejahteraan staf. | 612 | 78.97% | Baik |
| 7 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |
| 8 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| 9 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan secara berkala. | 622 | 80.26% | Baik |
| 10 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan. | 644 | 83.10% | Baik |
| 11 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan untuk menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan. | 650 | 83.87% | Baik |
| 12 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan secara berkala. | 649 | 83.74% | Baik |
| 13 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk mengukur hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. | 642 | 82.84% | Baik |
| 14 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk meyakinkan laporan efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang telah dilaksanakan. | 626 | 80.77% | Baik |
| 15 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk menentukan perencanaan dan pengembangan program kegiatan selanjutnya. | 633 | 81.68% | Baik |
| 16 | Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 666 | 85.94% | Sangat Baik |
| 17 | Kerjasama yang harmonis juga dilaksanakan antara UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). | 639 | 82.45% | Baik |
| 18 | Kerjasama yang solid antar pihak menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi. | 623 | 80.39% | Baik |
| 19 | Integritas sosial dalam bekerja dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 614 | 79.23% | Baik |
| 20 | Integritas sosial di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menghasilkan <i>team work</i> yang solid. | 631 | 81.42% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------|
| 21 | Integritas sosial yang dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat mempengaruhi iklim lingkungan sosial yang kondusif. | 619 | 79.87% | Baik |
| 22 | Kemudahan memperoleh informasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan yang dibutuhkan. | 635 | 81.94% | Baik |
| 23 | Informasi yang diakses di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai. | 615 | 79.35% | Baik |
| 24 | Informasi yang diperoleh oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. | 621 | 80.13% | Baik |
| 25 | Informasi yang diperoleh oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemerintah. | 620 | 80.00% | Baik |
| 26 | Pemahaman informasi telah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 608 | 78.45% | Baik |
| 27 | Pemahaman informasi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut didasarkan pada informasi yang diakses pada saat melaksanakan tugas. | 620 | 80.00% | Baik |
| 28 | Pemahaman staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terkait informasi terbaru selalu disosialisasikan antar staf. | 600 | 77.42% | Baik |
| 29 | Pimpinan dan segenap unsur terkait mengevaluasi keakuratan informasi yang diperoleh dan disosialisasikan. | 629 | 81.16% | Baik |
| 30 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dan bersifat membangun diinventarisir dengan baik. | 621 | 80.13% | Baik |
| 31 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang telah diinventarisir oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut diterima dan direspon dengan positif. | 587 | 75.74% | Baik |
| 32 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi oleh Pimpinan dan unsur terkait lainnya sebelum digunakan menjadi pedoman perbaikan. | 588 | 75.87% | Baik |
| 33 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut digunakan sebagai pedoman perbaikan program yang akan datang. | 589 | 76.00% | Baik |
| JUMLAH | | | 2626.45% | |
| RATA-RATA | | | 79.59% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis adalah baik yaitu sebesar 79,59% dari

seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis secara umum oleh para responden dianggap baik, sehingga jawaban yang diberikan termasuk dalam kategori memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item: *Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut*, yaitu sebesar 85,94% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, responden menganggap bahwa kunci dari suatu keberhasilan dalam bekerja adalah kerjasama yang solid, oleh karenanya para responden menganggap bahwa butir item ini sesuai dengan kebiasaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan setiap program kerja. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kerjasama antar staf telah terbentuk dengan solid begitu juga kerjasama antar unsur terkait diluar *UPT Disperindag ESDM Kab. Garut*. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, oleh karenanya seluruh staf belajar untuk mau dan mampu bekerjasama untuk meraih kemudahan dalam setiap melaksanakan program kerja agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada item: *Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung*, sebesar 64,90%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pelaksanaan *monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut* belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah dibandingkan butir item lainnya

pada variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Secara umum butir item ini termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya tidak semua program kerja dimonitor. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah staf yang bertugas, yang hanya berjumlah 155 se-Kabupaten Garut yang mana harus melayani 15.816 pedagang yang terdata di pasar rakyat se-Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengingkari hal ini dengan alasan rasio staf dengan total pedagang tidak berimbang. Sehingga, dengan adanya keterbatasan jumlah, kegiatan monitoring belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.3.2.1 Dimensi Motivasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi Motivasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Dimensi
Motivasi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, kebutuhan berafiliasi antar Staf tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid. | 628 | 81.03% | Baik |
| 2 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, Kebutuhan berafiliasi antar Staf memacu dediaksi dan prestasi. | 622 | 80.26% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|----------|
| 3 | Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, dedikasi yang tinggi dapat menyelesaikan tugas dengan baik. | 628 | 81.03% | Baik |
| 4 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu diprioritaskan. | 623 | 80.39% | Baik |
| 5 | Program pengembangan karir staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berjalan sesuai dengan Perundangan yang ada. | 622 | 80.26% | Baik |
| 6 | Peningkatan karir di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat meningkatkan kesejahteraan staf. | 612 | 78.97% | Baik |
| JUMLAH | | | 481.94% | |
| RATA-RATA | | | 80.32% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi Motivasi, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 80,32% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, secara umum dimensi tersebut dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, kebutuhan berafiliasi antar staf tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid*, disamping itu *Di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, dedikasi yang tinggi dapat menyelesaikan tugas dengan baik*, yaitu sebesar 81,03% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kebutuhan berafiliasi antar staf dilaksanakan dengan solid, sehingga staf dapat berdedikasi dalam menyelesaikan setiap tugas. Secara umum, kesesuaian antara afiliasi yang solid berimbang pada dedikasi staf yang baik sehingga dapat menyelesaikan setiap tugas yang dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, jalinan berafiliasi antar staf telah berjalan dengan baik, sehingga umumnya staf dapat memiliki dedikasi kerja yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa afiliasi kerja yang solid

adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap staf agar tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Peningkatan karir di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat meningkatkan kesejahteraan staf*, dengan persentase 78,97% dan masuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, capaian karir di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut belum dapat meningkatkan kesejahteraan staf, hal ini mengingat mayoritas staf masih berstatus TKK dan TKS, disamping masih banyak staf yang sudah berstatus PNS akan tetapi masih golongan I dan II. Dengan keadaan tersebut, karir para staf umumnya masih belum standar sehingga belum berimbas pada kesejahteraan kehidupan staf dan keluarga. Oleh karenanya, secara presentase butir item ini termasuk kategori paling rendah. Meskipun demikian, secara aturan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di lingkungan Disperindag ESDM Kab. Garut.

4.3.2.2 Dimensi Pembinaan

Untuk mengetahui kondisi dimensi pembinaan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 9 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-9 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Dimensi
Pembinaan

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|---|------------------|------------|------------|
| 1 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|------------|
| 2 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| 3 | Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan secara berkala. | 622 | 80.26% | Baik |
| 4 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan di akhir pelaksanaan kegiatan. | 644 | 83.10% | Baik |
| 5 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan untuk menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan. | 650 | 83.87% | Baik |
| 6 | Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan secara berkala. | 649 | 83.74% | Baik |
| 7 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk mengukur hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. | 642 | 82.84% | Baik |
| 8 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk meyakinkan laporan efektivitas dan efisiensi program kegiatan yang telah dilaksanakan. | 626 | 80.77% | Baik |
| 9 | Tindak lanjut di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilakukan untuk menentukan perencanaan dan pengembangan program kegiatan selanjutnya. | 633 | 81.68% | Baik |
| JUMLAH | | | 709.03% | |
| RATA-RATA | | | 78.78% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi pembinaan, rata-rata penilaian menunjukkan baik dengan rata-rata sebesar 78,78% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum pembinaan yang telah diimplementasikan pada Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dianggap memuaskan.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan untuk menganalisa hasil pelaksanaan kegiatan*, dengan persentase 83,87%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, walaupun belum setiap program kerja dievaluasi dengan detail dan berkala, namun evaluasi sudah dapat dilaksanakan minimal pada akhir kegiatan yang dianggap

paling penting. Oleh karenanya, responden menjawab bahwa butir item ini sudah termasuk pada penilaian tertinggi dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, umumnya evaluasi dilaksanakan diakhir setiap kegiatan dimana secara periodik 3 – 6 bulan evaluasi biasa dilaksanakan oleh pimpinan kepada seluruh unsur bawahan. Berdasarkan hasil wawancara, responden menunjukkan bahwa evaluasi merupakan salah satu kegiatan rutin yang telah dijadwalkan bersama dalam rangka memantau dan memperbaiki kinerja staf baik pimpinan maupun bawahan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung*, dengan persentase 64,90%, dan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pelaksanaan *monitoring di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut* belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah dibandingkan butir item lainnya pada variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Secara umum butir item ini termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya tidak semua program kerja dimonitor. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah staf yang bertugas, yang hanya berjumlah 155 se-Kabupaten Garut yang mana harus melayani 15.816 pedagang yang terdata di pasar rakyat se-Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengingkari hal ini dengan alasan rasio staf dengan total pedagang tidak berimbang. Sehingga, dengan adanya keterbatasan jumlah, kegiatan monitoring belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal.

4.3.2.3 Dimensi Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja

Untuk mengetahui kondisi dimensi dukungan dan kerja sama dari mitra kerja, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Dimensi Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|-------------|
| 1 | Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 666 | 85.94% | Sangat Baik |
| 2 | Kerjasama yang harmonis juga dilaksanakan antara UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dengan Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). | 639 | 82.45% | Baik |
| 3 | Kerjasama yang solid antar pihak menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi. | 623 | 80.39% | Baik |
| 4 | Integritas sosial dalam bekerja dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 614 | 79.23% | Baik |
| 5 | Integritas sosial di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menghasilkan <i>team work</i> yang solid. | 631 | 81.42% | Baik |
| 6 | Integritas sosial yang dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dapat mempengaruhi iklim lingkungan sosial yang kondusif. | 619 | 79.87% | Baik |
| JUMLAH | | | 489.29% | |
| RATA-RATA | | | 81.55% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi dukungan dan kerja sama dari mitra kerja, rata-rata penilaian menunjukkan peringkat baik dengan rata-rata sebesar 81,55% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi dukungan dan kerja sama dari mitra kerja tersebut, secara umum dimensi ini dianggap memuaskan.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Kerjasama yang solid dilaksanakan antar staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut*, dengan persentase 85.94% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, responden menganggap bahwa kunci dari suatu keberhasilan dalam bekerja adalah kerjasama yang solid, oleh karenanya para responden menganggap bahwa butir item ini sesuai dengan kebiasaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan setiap program kerja. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kerjasama antar staf telah terbentuk dengan solid begitu juga kerjasama antar unsur terkait diluar *UPT Disperindag ESDM Kab. Garut*. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, oleh karenanya seluruh staf belajar untuk mau dan mampu bekerjasama untuk meraih kemudahan dalam setiap melaksanakan program kerja agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Integritas sosial dalam bekerja dimiliki oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut*, dengan persentase 79,23%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, responden menyatakan bahwa integritas sosial yang dimiliki oleh para staf belum dimiliki secara utuh oleh para staf, belum semua staf dapat berbaur dengan masyarakat dimana mereka bertugas dan tinggal. Keumuman staf baru bisa berbaur dengan komunitasnya saja, sehingga pencapaian target hasil dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat sekitar khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat masih mengalami kendala. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Berdasarkan hasil observasi di

lapangan integritas sosial masih merupakan hal tabu untuk diterapkan secara massif oleh para staf, mengingat jumlah staf yang masih relative terbatas sehingga belum bisa menyentuh seluruh lapisan sosial khususnya yang berhubungan dengan masyarakat yang berada di pasar rakyat di Kabupaten Garut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa integritas sosial merupakan bagian dari integritas kerja sehingga seharusnya dapat dilaksanakan dengan optimal. Akan tetapi, hal ini tidak mudah untuk dapat dilaksanakan oleh semua staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut.

4.3.2.4 Dimensi Akses Terhadap Sumber Informasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi akses terhadap sumber informasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-12 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Dimensi Akses Terhadap Sumber Informasi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|--|------------------|------------|----------|
| 1 | Kemudahan memperoleh informasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan yang dibutuhkan. | 635 | 81.94% | Baik |
| 2 | Informasi yang diakses di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilengkapi dengan teknologi informasi yang memadai. | 615 | 79.35% | Baik |
| 3 | Informasi yang diperoleh oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. | 621 | 80.13% | Baik |
| 4 | Informasi yang diperoleh oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Pemerintah. | 620 | 80.00% | Baik |
| 5 | Pemahaman informasi telah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. | 608 | 78.45% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|----------------|----------|
| 6 | Pemahaman informasi staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut didasarkan pada informasi yang diakses pada saat melaksanakan tugas. | 620 | 80.00% | Baik |
| 7 | Pemahaman staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terkait informasi terbaru selalu disosialisasikan antar staf. | 600 | 77.42% | Baik |
| 8 | Pimpinan dan segenap unsur terkait mengevaluasi keakuratan informasi yang diperoleh dan disosialisasikan. | 629 | 81.16% | Baik |
| 9 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dan bersifat membangun diinventarisir dengan baik. | 621 | 80.13% | Baik |
| 10 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang telah diinventarisir oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut diterima dan direspon dengan positif. | 587 | 75.74% | Baik |
| 11 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi oleh Pimpinan dan unsur terkait lainnya sebelum digunakan menjadi pedoman perbaikan. | 588 | 75.87% | Baik |
| 12 | Umpan balik (<i>feedback</i>) yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut digunakan sebagai pedoman perbaikan program yang akan datang. | 589 | 76.00% | Baik |
| JUMLAH | | | 946.19% | |
| RATA-RATA | | | 78.85% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi akses terhadap sumber informasi, rata-rata penilaian dinyatakan sangat baik dengan rata-rata sebesar 78,85% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi akses terhadap sumber informasi tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sangat baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada item: *Kemudahan memperoleh informasi di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan yang dibutuhkan*, dengan persentase 81.94%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemudahan informasi berkenaan dengan kebijakan pengelolaan pasar rakyat, kinerja pegawai, dan hal-hal penting lainnya disediakan oleh lembaga UPT

Disperindag ESDM Kab. Garut, sehingga staf dapat bertindak cepat tatkala ada informasi baru yang disosialisasikan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, responden menilai butir item ini termasuk pada penilaian tertinggi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kemudahan informasi umumnya selalu disosialisasikan oleh pimpinan kepada semua bawahan agar proses pembaharuan informasi terjadi secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara, para responden mengakui adanya kemudahan sosialisasi informasi baru yang disampaikan oleh pimpinan kepada seluruh staf agar semua staf mengetahui dan memahami informasi terbaru, sehingga, seluruh staf dapat langsung merespon informasi baru tersebut dengan cepat dan tanggap.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Umpan balik (feedback) yang telah diinventarisir oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut diterima dan direspon dengan positif*, dengan persentase 75.74%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, umpan balik (*feedback*) yang telah diinventarisir oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut belum semuanya bisa diterima dan direspon dengan positif. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, umpan balik (*feedback*) yang telah diinventarisir oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut sebelumnya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hasil musyawarah tersebut akan menjadi dasar hukum untuk merespon umpan balik yang diterima oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. Sehingga, butir item ini dinilai paling rendah dibandingkan butir item yang lainnya.

4.3.3 Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat

Untuk mengetahui kondisi variabel efektivitas pengelolaan pasar rakyat, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 24 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 24 pernyataan tentang efektivitas pengelolaan pasar rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|--|------------------|------------|-------------|
| 1 | Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. | 652 | 84.13% | Sangat Baik |
| 2 | Pelaksanaan tugas UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. | 628 | 81.03% | Baik |
| 3 | Mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan pengelolaan kerja di lapangan. | 624 | 80.52% | Baik |
| 4 | Mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. | 622 | 80.26% | Baik |
| 5 | Perbandingan <i>output</i> dengan <i>input</i> dari setiap UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai harapan. | 620 | 80.00% | Baik |
| 6 | <i>Output</i> di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dievaluasi dan dipertahankan kualitasnya. | 635 | 81.94% | Baik |
| 7 | Pencapaian prestasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. | 621 | 80.13% | Baik |
| 8 | Pencapaian prestasi setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memperoleh <i>rewards</i> dari Pimpinan. | 640 | 82.58% | Baik |
| 9 | Manfaat yang diterima oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa kepuasan hasil kinerja yang baik. | 609 | 78.58% | Baik |
| 10 | Manfaat yang diterima oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa imbalan gaji dan tunjangan. | 632 | 81.55% | Baik |
| 11 | Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa bantuan modal bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat. | 637 | 82.19% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------|
| 12 | Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat. | 644 | 83.10% | Baik |
| 13 | Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu. | 647 | 83.48% | Baik |
| 14 | Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan dengan terobosan sistem "one day service". | 605 | 78.06% | Baik |
| 15 | Rotasi staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman. | 633 | 81.68% | Baik |
| 16 | Rotasi staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala. | 644 | 83.10% | Baik |
| 17 | Disiplin staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut berasal dari hati nurani. | 636 | 82.06% | Baik |
| 18 | Disiplin staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut sesuai dengan peraturan yang berlaku. | 612 | 78.97% | Baik |
| 19 | Tanggung jawab yang dibebankan kepada staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut dijalankan dengan baik. | 626 | 80.77% | Baik |
| 20 | Tanggung jawab yang dibebankan kepada staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. | 608 | 78.45% | Baik |
| 21 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon dengan baik. | 614 | 79.23% | Baik |
| 22 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. | 638 | 82.32% | Baik |
| 23 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |
| 24 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| JUMLAH | | | 1916.90% | |
| RATA-RATA | | | 79.87% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel efektivitas pengelolaan pasar rakyat adalah baik yaitu sebesar 79,87% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden pada variabel efektivitas pengelolaan pasar rakyat, secara umum hasil kinerja pegawai tersebut dianggap memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item: *Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku*, sebesar 84,13%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku telah dianggap sangat baik, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dimungkinkan tidak ada pelanggaran dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat dalam konteks pengelolaan pasar rakyat. Berdasarkan hasil wawancara, para staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam surat tugas yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan alasan ini, pelaksanaan tugas masing-masing staf telah sesuai dengan standarisasi Pemerintah pusat yang berlaku.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada tiga butir item: *Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik*, sebesar 64,90% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum sepenuhnya direspon dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terkendala oleh berbagai kondisi riil yang terjadi di lingkungan eksternal yang belum tentu sejalan dengan kondisi yang berkembang di lingkungan internal. Akan tetapi, tidak semua kondisi yang berkembang di lingkungan eksternal tidak diterima, ada pula yang yang diterima

akan tetapi implementasinya membutuhkan proses yang cukup lama. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir terendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan jawaban bahwa kesesuaian antara perubahan eksternal dan internal harus bisa disesuaikan terlebih dahulu, sehingga hal tersebut dapat diterima oleh seluruh unsur terkait di lingkungan UPT Disperindag Kabupaten Garut. Selanjutnya, perubahan tersebut dapat mewarnai kinerja pelayanan di UPT Disperindag Kabupaten Garut menjadi lebih baik lagi.

Untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi yang tersedia dari variabel efektivitas pengelolaan pasar rakyat, selanjutnya dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut:

4.3.3.1 Dimensi Produktivitas atau Produksi

Untuk mengetahui kondisi dimensi produktivitas atau produksi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Dimensi Produktivitas atau Produksi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|---------|--|------------------|------------|-------------|
| 1 | Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. | 652 | 84.13% | Sangat Baik |
| 2 | Pelaksanaan tugas UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. | 628 | 81.03% | Baik |
| 3 | Mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan pengelolaan kerja di lapangan. | 624 | 80.52% | Baik |

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|----------------|----------|
| 4 | Mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. | 622 | 80.26% | Baik |
| JUMLAH | | | 325.94% | |
| RATA-RATA | | | 81.48% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi produktivitas atau produksi, rata-rata penilaian menunjukkan baik dengan rata-rata sebesar 81,48% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi produktivitas atau produksi, secara umum dimensi ini dianggap memuaskan.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku*, sebesar 84,13% dan termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dalam melaksanakan tugas telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tugas yang dibebankan kepada staf disesuaikan dengan latar belakang Pendidikan dan keahlian, sehingga beban kerja yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara, staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut umumnya telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada, disamping para staf juga selalu melakukan konsultasi pra dan pasca melaksanakan tugas kepada staf

senior atau pimpinan apabila ada permasalahan yang belum difahami dan dikuasai dengan matang.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dua item, yaitu: *Mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan*, dengan persentase 80,26% dan termasuk kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut belum sepenuhnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, butir item ini dinilai sebagai butir item terendah dalam dimensi ini. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, mutu pencapaian program SKPD di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut secara umum ada yang berhasil dan ada pula yang belum berhasil. Hal ini dikarenakan kendala riil di lapangan yang belum dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut mengakui bahwa sebagai manusia biasa capaian yang dapat diselesaikan oleh staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut masih ada yang belum sesuai dengan tuntutan Pemerintah, walau di sisi lain sudah banyak capaian yang dapat diraih sesuai Peraturan yang berlaku.

4.3.3.2 Dimensi Efisiensi

Untuk mengetahui kondisi dimensi efisiensi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang dilengkapi 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Dimensi
Efisiensi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|--|------------------|----------------|----------|
| 1 | Perbandingan <i>output</i> dengan <i>input</i> dari setiap UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai harapan. | 620 | 80.00% | Baik |
| 2 | <i>Output</i> di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut selalu dievaluasi dan dipertahankan kualitasnya. | 635 | 81.94% | Baik |
| 3 | Pencapaian prestasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. | 621 | 80.13% | Baik |
| 4 | Pencapaian prestasi setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memperoleh <i>rewards</i> dari Pimpinan. | 640 | 82.58% | Baik |
| JUMLAH | | | 324.65% | |
| RATA-RATA | | | 81.16% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi efisiensi, rata-rata penilaian menunjukkan baik dengan rata-rata sebesar 81,16% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum dimensi efisiensi yang dilakukan oleh staf di UPT Disperindag Kabupaten Garut dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada butir item: *Pencapaian prestasi setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memperoleh rewards dari Pimpinan*, sebesar 82,58% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pencapaian prestasi setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut memperoleh *rewards* dari Pimpinan dianggap sebagai suatu program yang baik untuk mendorong iklim kerja di organisasi. Sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dan termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut umumnya bekerja dengan sungguh-sungguh bukan karena mengharap *rewards* dari pimpinan, akan tetapi didasarkan pada amanah dan tanggungjawab yang telah

dibebankan. Begitu pula berdasarkan hasil wawancara, staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menyatakan bahwa tujuan mereka menjadi pegawai di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut adalah untuk dapat sekuat tenaga memberikan pelayanan prima dalam bidang pelayanan perekonomian kepada masyarakat.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dua butir item: *Perbandingan output dengan input dari setiap UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai harapan*, dengan persentase 80,00% dan termasuk kategori sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, perbandingan output dengan input dari setiap UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut belum sepenuhnya sesuai harapan, dikarenakan terdapat kendala di lapangan yang belum dapat diatasi oleh staf maupun secara kelembagaan. Selanjutnya, tingkat kepuasan para pedagang yang berdagang di pasar rakyat berbeda-beda sesuai dengan fasilitas, kualitas serta kuantitas pasar rakyat yang telah dibangun dan dipersiapkan oleh UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Namun demikian, butir item ini masih termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa permasalahan tersebut memang benar adanya, dimana masih ada fasilitas, sarana dan prasarana pasar rakyat yang belum layak, sedangkan pajak retribusi pedagang terus dipungut setiap harinya. Dengan adanya pungutan tersebut, kiranya wajar apabila para pedagang menuntut ada keseimbangan output dan input yang telah diberikan.

4.3.3.3 Dimensi Kepuasan

Untuk mengetahui kondisi dimensi kepuasan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-12 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Dimensi
Kepuasan

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|----------|
| 1 | Manfaat yang diterima oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa kepuasan hasil kinerja yang baik. | 609 | 78.58% | Baik |
| 2 | Manfaat yang diterima oleh staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa imbalan gaji dan tunjangan. | 632 | 81.55% | Baik |
| 3 | Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa bantuan modal bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat. | 637 | 82.19% | Baik |
| 4 | Manfaat yang diterima oleh publik/masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang di pasar rakyat. | 644 | 83.10% | Baik |
| 5 | Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu. | 647 | 83.48% | Baik |
| 6 | Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan dengan terobosan sistem "one day service". | 605 | 78.06% | Baik |
| 7 | Rotasi staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman. | 633 | 81.68% | Baik |
| 8 | Rotasi staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dievaluasi secara berkala. | 644 | 83.10% | Baik |
| 9 | Disiplin staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut berasal dari hati nurani. | 636 | 82.06% | Baik |
| 10 | Disiplin staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut sesuai dengan peraturan yang berlaku. | 612 | 78.97% | Baik |
| 11 | Tanggung jawab yang dibebankan kepada staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut dijalankan dengan baik. | 626 | 80.77% | Baik |
| 12 | Tanggung jawab yang dibebankan kepada staf UPT di Disperindag ESDM Kab. Garut telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku. | 608 | 78.45% | Baik |
| JUMLAH | | | 972.00% | |
| RATA-RATA | | | 81.00% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi kepuasan, rata-rata penilaiannya adalah sangat baik dengan rata-rata sebesar 81,00% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi kepuasan di atas, secara umum dimensi ini dianggap baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu*, sebesar 83.48% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut berupa terobosan sistem pelayanan satu pintu dianggap sebagai agenda penting dalam reformasi pelayanan publik. Hal ini juga didukung dan diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa untuk mengefektifkan waktu, tenaga, dan biaya, Pemerintah harus berani melakukan reformasi yang menyeluruh terhadap pelayanan publik yang direformasi menjadi pelayanan satu pintu. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya semua staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menyambut baik terobosan tersebut dan berharap terobosan pelayanan satu pintu dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa semua staf di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut menyatakan siap mendukung berjalannya terobosan pelayanan public satu pintu agar pelayanan public menjadi efisien dan memudahkan masyarakat. Dengan pelayanan publik satu pintu, Disperindag ESDM Kab. Garut berharap tingkat kepuasan publik dapat meningkat khususnya dalam bidang perekonomian rakyat, dan pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Garut.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut dilaksanakan dengan terobosan sistem “one day service”*, dengan persentase 78.06% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, penyederhanaan birokrasi di setiap UPT Disperindag ESDM Kab. Garut terobosan sistem “one day service” belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terkendala dengan kesiapan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang lainnya. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah, akan tetapi secara penilaian butir item ini masih dikategorikan baik. Berdasarkan hasil observasi, umumnya kesiapan sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang lainnya masih mengalami kendala, sehingga terobosan sistem “one day service” belum dapat dilaksanakan secara optimal di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut. Adapun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa selain kesiapan sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang, kesiapan mental dan anggaran juga harus diprioritaskan sehingga terobosan sistem “one day service” dapat disambut baik dan dilaksanakan dengan optimal.

4.3.3.4 Dimensi Adaptasi

Untuk mengetahui kondisi dimensi adaptasi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.20

Dimensi Adaptasi

| No Item | Tentang | Jumlah Kumulatif | Persentase | Kriteria |
|------------------|---|------------------|----------------|------------|
| 1 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon dengan baik. | 614 | 79.23% | Baik |
| 2 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. | 638 | 82.32% | Baik |
| 3 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik. | 503 | 64.90% | Cukup Baik |
| 4 | Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak. | 526 | 67.87% | Cukup Baik |
| JUMLAH | | | 294.32% | |
| RATA-RATA | | | 73.58% | |

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi adaptasi, rata-rata penilaian menunjukkan baik dengan rata-rata sebesar 73,58% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi adaptasi di atas, secara umum dimensi ini dianggap memuaskan responden.

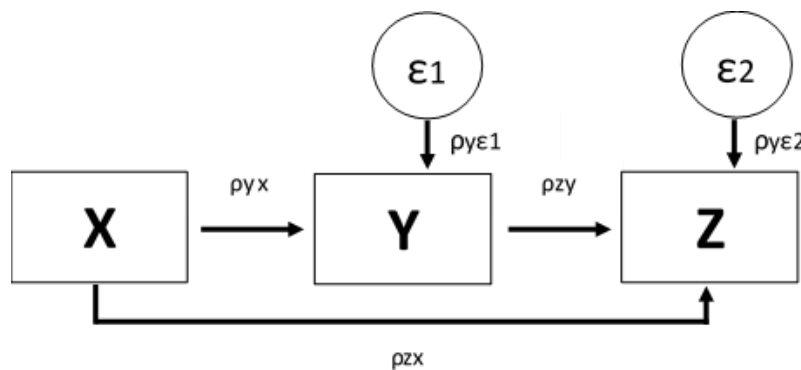
Penilaian tertinggi dari responden ada pada item: *Tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak*, sebesar 82,32% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, tanggapan lembaga terhadap perubahan internal di setiap UPT direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak dianggap telah berjalan dengan optimal, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya semua staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal, akan tetapi guna menyamakan persepsi seluruh staf, respon tersebut harus didasarkan pada hasil evaluasi semua pihak. Sehingga, semua staf dapat mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon setiap

perubahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa semua staf UPT Disperindag ESDM Kab. Garut setuju dengan cara yang diambil oleh seluruh unsur terkait di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut agar segala sesuatu didasarkan pada kesepakatan musyawarah mufakat agar terdapat kesepakatan yang baik demi lancarnya semua program kerja yang telah direncanakan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item: *Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik*, dengan persentase 64,90% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum direspon dengan baik. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah. Berdasarkan hasil observasi, umumnya tidak semua perubahan eksternal ditanggapi dan direspon dengan baik, karena hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang berkembang di lingkungan internal. Sehingga, apa yang diambil sebagai respon harus dapat menguntungkan keduanya, baik di lingkungan eksternal maupun internal. Adapun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua perubahan di lingkungan eksternal itu membawa dampak positif, oleh karenanya pimpinan harus jeli dalam menerima, menyeleksi, dan merespon perubahan tersebut. Sehingga, hasilnya tidak membawa kerugian bagi kedua belah pihak, baik kondisi internal maupun eksternal.

4.4 Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis Penelitian

Rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disinggung pada Bab I halaman 31-33. Adapun untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan suatu pengujian melalui analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram berikut:



Gambar 4.1
Diagram
Jalur

Dari diagram di atas, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Z = P_{zx} + P_{zxy} + P_{z\epsilon_2}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan:

1. Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.
2. Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

Selanjutnya, diuraikan hasil pengujian Hipotesis Utama dan Sub-sub Hipotesis, sebagai berikut:

4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z)

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Adapun untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui:

$$n = 155$$

$$k = 3$$

$$\alpha = 0,05$$

2. Membuat Matriks Korelasi (R), dengan menggunakan persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{XX} & r_{YX} & r_{ZX} \\ & r_{YY} & r_{YZ} \\ & & r_{ZZ} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{\sum xy^2 - 1/n (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum y^2 - 1/n (x)^2]}}$$

$$\Gamma_{xz} = \frac{\sum xz^2 - 1/n (\sum x)(\sum z)}{\sqrt{[\sum x^2 - 1/n (x)^2][\sum z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

$$\Gamma_{yz} = \frac{\sum yz^2 - 1/n(\sum y)(\sum z)}{\sqrt{[\sum y^2 - 1/n(y)^2][\sum z^2 - 1/n(z)^2]}}$$

Persamaan diatas dipergunakan untuk menghitung input data *Path Analysis*

(terlampir), maka diperoleh:

| | X | Y | Z |
|---|--------|--------|--------|
| X | 1.0000 | 0.6298 | 0.6191 |
| Y | 0.6298 | 1.0000 | 0.7609 |
| Z | 0.6191 | 0.7609 | 1.0000 |

3. Membuat Matrik Invers Korelasi (R^{-1}):

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{XX} & C_{YX} & C_{ZX} \\ & C_{YY} & C_{YZ} \\ & & C_{ZZ} \end{bmatrix}$$

| | X | Y | Z |
|---|---------|---------|---------|
| X | 1.7956 | -0.6770 | -0.5965 |
| Y | -0.6770 | 2.6306 | -1.5826 |
| Z | -0.5965 | -1.5826 | 2.5735 |

4. Menghitung Besarnya Pengaruh:

$$P_{ZX} = -\frac{C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZX} = -\frac{-0.5965}{2.5735} = 0.2318$$

$$P_{ZY} = -\frac{C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$P_{ZY} = -\frac{1.5826}{2.5735} = 0.6150$$

5. Menghitung Koefisien Determinasi Total:

$$R^2_{YZX} = P_{ZX} \cdot r_{ZX} + P_{ZY} \cdot r_{ZY}$$

$$R^2_{YZX} = 0,2318 \times 0,6191 + 0,6150 \times 0,7609$$

$$R^2_{YZX} = 0,6114$$

$$R_{YZX} = 0,7819$$

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,7819. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dalam mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari F_{hitung} :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = 79,2010$$

Menghitung F_{tabel} :

$$F_{\text{tabel}} = 3,0560$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{\text{hitung}} = 79,2010 > F_{\text{tabel}} = 3,0560$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dan variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat.

Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat ditunjukkan oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = 0,6114. Nilai tersebut diartikan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebesar 61,14%, sedangkan sisanya sebesar 38,86% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang tidak dimasukkan ke dalam model.

$$P_{Z\epsilon 2}^2 = 1 - R_{ZYX}^2$$

$$P_{Z\epsilon 2}^2 = 1 - 0,6114 = 0,3886$$

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa penggunaan komunikasi, pembentukan birokrasi, penggunaan disposisi, serta penggunaan sumber daya dapat menentukan kualitas Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang pada akhirnya dapat mewujudkan kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa dalam penggunaan komunikasi para penentu kebijakan dalam hal ini adalah Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat melakukannya dengan lugas dan jelas agar mudah difahami oleh para komunikan, yaitu para staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Di samping itu, pembentukan birokrasi yang tepat juga menentukan kualitas para penyampai kebijakan tersebut, dimana para penyampai Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat harus mempunyai disposisi yang baik dalam menyampaikan informasi berupa Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat kepada para staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, sehingga sumber daya organisasi yang ada dapat menjadi optimal. Dalam pelaksanaan berkomunikasi, komunikator harus dapat menyampaikan pesan dengan baik kepada para komunikan, yaitu mereka harus dapat menggunakan saluran yang tepat, sehingga upaya penyampaian informasi tentang Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dapat mengenai sasaran. Dengan penyampaian

informasi yang baik, maka tingkat kesadaran para staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut menyadari arti pentingnya Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang berimbang pada kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Garut, sehingga menjadi lebih baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat beberapa staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut yang masih belum memahami makna dari Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang harus diimplementasikan di setiap UPT. Namun demikian, segenap jajaran pimpinan dan manajemen UPT staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dalam Mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat tidak hanya dipengaruhi oleh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat saja, namun juga dipengaruhi oleh Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Dimana faktor Motivasi; Pembinaan; Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja; dan Akses Terhadap Sumber Informasi menjadi faktor penentu dalam mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Di dalam program Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut bekerjasama dengan berbagai pihak terkait khususnya dengan Bappeda Kabupaten Garut yang sudah memberikan dukungan melalui program-program pendampingan dengan tujuan meningkatkan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis

di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, yang mana hal ini akan berimbas pada Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Selain Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis adalah sebesar 38,86% (Epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat tersebut salah satunya adalah faktor manajemen. Faktor manajemen dimungkinkan sangat berperan dalam mengatur dan mengurus seluruh unsur yang terlibat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dalam meningkatkan kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa responden ketika diwawancara.

4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar 0,6298.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, maka

dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Mencari t_{hitung} :

$$t = \frac{P_{yx}}{\frac{\sqrt{1-P^2_{yx}}}{n-2}}$$

$$t = 10,0288$$

Menghitung t_{tabel} :

$$t_{\text{tabel}} = 1,9758$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 10,0288 > t_{\text{tabel}} = 1,9758$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis adalah sebesar 0,3966% atau sebesar 39,66% sedangkan sisanya sebesar 0,6034% atau sebesar 60,34% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui dari Matriks Korelasi:

$$R^2_{YX} = 0,6298^2 = 0,3966$$

Sehingga:

$$P^2_{Ye1} = 1 - R^2_{YX}$$

$$P^2_{Ye1} = 1 - 0,3966 = 0,6034$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi komunikasi, pembentukan birokrasi, penentuan disposisi, serta penggunaan sumber daya dapat menentukan kualitas Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan komunikasi yang dilakukan oleh para komunikator dapat difahami dengan baik oleh para komunikan, sehingga berimbas terhadap baiknya Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Di samping itu, struktur organisasi juga menentukan kualitas para pegawai yang mempunyai disposisi yang baik dalam mensosialisasikan seluruh kebijakan pemerintah kepada para staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, sehingga sumber daya organisasi yang ada menjadi optimal. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dapat berpengaruh terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis. Sebagaimana hukum sebab akibat, semakin baik Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang dilakukan oleh para aparatur, maka akan semakin baik pula suatu Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang dilaksanakan oleh para staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian responden terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 79,59% dan termasuk dalam kriteria baik.

Berdasarkan observasi di lapangan, diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko

Swalayan, merupakan landasan hukum dalam pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Garut. Dalam penyelenggaraannya, UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut harus dapat memberikan pelayanan yang berkenaan dengan perekonomian yang standar dengan peraturan Pemerintah yang diukur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pada pelaksanaannya, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Secara hirarki, kedua regulasi di atas mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Adapun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ini bermuara pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1).

Dengan adanya regulasi yang mengatur Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah mengharapkan Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan yang ada, disamping kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat pun menjadi terstandar dan optimal. Hal ini secara langsung akan memberikan efek puas kepada masyarakat, baik yang berdagang, ataupun yang berbelanja di pasar

rakyat. Akan tetapi, secara umum memberikan efek puas terhadap seluruh masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan publik ini.

4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis (Y) terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{ZY}) sebesar 0,6150.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{\text{hitung}} = 7,8657 > t_{\text{tabel}} = 1,9758$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Nilai tersebut di atas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZY} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{ZY}^2)}}$$

$$t_{ZY} = 7,8657$$

Besar pengaruh variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat secara langsung adalah sebesar 0,4680 atau sebesar 46,80% sedangkan sisanya sebesar 0,5320 atau sebesar 53,20% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui bahwa: $r_{zy} = 0,7609$ dan $P_{zy} = 0,6150$ maka:

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,7609 \times 0,6150 = 0,4680 \text{ (46,80\%)}$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi Motivasi; Pembinaan; Dukungan dan Kerja Sama dari Mitra Kerja; dan Akses Terhadap Sumber Informasi menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Produktivitas Kerja Pegawai di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, sehingga pengaruh secara langsung variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat relatif signifikan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa motivasi yang ditunjukkan oleh kebutuhan berafiliasi antar staf tertuang dalam jalinan kerjasama yang solid, disamping itu di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, para staf memiliki dedikasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Di samping itu, pembinaan berupa evaluasi di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dilaksanakan dengan detail dan berkala untuk menganalisa hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karenanya, hal tersebut dapat berimbas pada baiknya Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Sebagaimana hukum sebab akibat, ketika Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan dengan optimal, maka Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat pun akan menjadi optimal. Selanjutnya, sesuai dengan hasil penilaian responden terhadap variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, variabel ini menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 79,59% dan termasuk kriteria baik.

Namun di sisi lain, hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sudah cukup optimal. Beberapa alasan yang membuat penilaian Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis sudah optimal antara lain; dalam sisi motivasi: semua staf yang mengabdikan di UPT Disperindag ESDM telah mengetahui dan memahami bagaimana memotivasi diri dan rekan agar kinerja staf dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan optimal. Dalam sisi pembinaan: umumnya semua staf yang mengabdikan di UPT Disperindag ESDM selalu mendapat arahan dari pimpinan sehingga para staf memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas, sehingga menunjang terwujudnya Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis yang lebih baik.

4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini telah disampaikan pada Bab I. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan

pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0.2318.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 3,5489 > t_{\text{tabel}} = 1,9758$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{zx} = \frac{P_{zx}}{\sqrt{\frac{1 - R_{zyx}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{yx}^2)}}$$

$$t_{zx} = 3,5489$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,9758$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Besar pengaruh secara langsung dari Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat adalah sebesar 0,0537 atau sebesar 5,37%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat melalui Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis adalah sebesar 0,0898 atau sebesar 8,98%.

Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebesar 0,1435 atau sebesar 14,35% sedangkan sisanya sebesar 0,8565 atau sebesar 85,65% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z:

Diketahui bahwa $P_{zx} = 0,2318$, maka:

$$P_{zx} \cdot P_{zx} = 0,2318 \times 0,2318 = 0,0537$$

2. Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z:

$$(P_{ZY})(r_{YZ})(P_{ZX}) = 0,6150 \times 0,7609 \times 0,2318 = 0,0898$$

3. Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z:

$$(P_{zx})^2 + (P_{ZY})(r_{YZ})(P_{ZX}) = 0,0537 + 0,0898 = 0,1435$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi Dimensi produktivitas atau produksi; Dimensi Efisiensi; Dimensi Kepuasan; dan Dimensi Adaptasi dapat menentukan kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, sesuai dengan hasil penilaian responden terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, variabel ini menunjukkan nilai dengan persentase sebesar 79,87% dan termasuk kriteria baik.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan dimensi produktivitas atau produksi dapat dilaksanakan sangat baik, sedangkan pada dimensi efisiensi dan kepuasan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun sedikit kendala

terdapat pada dimensi adaptasi, dimana tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum dapat direspon dengan baik, oleh karenanya dimensi adaptasi dinilai oleh responden cukup baik. Akan tetapi berdasarkan ketiga dimensi lainnya, responden menilai sangat baik, dan baik. Dengan fakta ini, maka pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat berdampak signifikan. Oleh karenanya, Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat secara fakta di lapangan telah dapat berpengaruh secara nyata terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Salah satu faktor tersebut adalah manajemen. Faktor manajemen dimungkinkan sangat berperan dalam mengatur dan mengurus seluruh unsur yang terlibat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dalam meningkatkan kualitas Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis dalam mewujudkan Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hasil analisis deskripsi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat menunjukkan kategori baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut dengan nilai 78,95%, dimana nilai tersebut termasuk dalam kriteria memuaskan atau baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada dimensi disposisi, yaitu bahwa responden di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dalam merencanakan rencana kerja telah dituangkan dalam restra, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 85.55%, dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi komunikasi, yaitu bahwa responden di UPT Disperindag ESDM Kab. Garut, dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64.90%, dan termasuk dalam kriteria cukup baik.

Kedua, hasil analisis deskripsi variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis menunjukkan kategori baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut dengan nilai 79,59%, dimana nilai tersebut

termasuk dalam kriteria memuaskan atau baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada dimensi dukungan dan kerjasama dari mitra kerja, yaitu bahwa responden selalu bekerjasama dengan solid antar staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 85,94%, dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi pembinaan, yaitu bahwa responden selalu melakukan monitoring terhadap proses kegiatan yang sedang dilaksanakan di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,90%, dan termasuk dalam kriteria cukup baik.

Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, menunjukkan kategori baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut dengan nilai 79,87%, dimana nilai tersebut termasuk dalam kriteria memuaskan atau baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada dimensi produktivitas atau produksi, yaitu bahwa responden di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 84,13%, dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi adaptasi, yaitu bahwa tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT direspon dengan baik, dimana butir item tersebut menunjukkan nilai rata-rata sebesar 64,90%, dan termasuk dalam kriteria cukup baik. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar

rakyat. secara presentase, pengaruh tersebut menunjukkan capaian yang optimal dengan nilai rata-rata 61,14%, dimana penerapan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian telah mencapai kesesuaian yang signifikan. Secara empiris hasil pengujian hipotesis ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat telah optimal, sementara kinerja pegawai unit pelaksana teknis yang baik dapat memberikan pengaruh nyata terwujudnya efektivitas pengelolaan pasar rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Adapun hasil pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai unit pelaksana teknis. Dimana faktor-faktor seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja pegawai unit pelaksana teknis.

Hasil pengujian sub hipotesis selanjutnya adalah pengaruh kinerja pegawai unit pelaksana teknis terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, terdapat pengaruh signifikan dari kinerja pegawai unit pelaksana teknis terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Pengaruh signifikan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor: motivasi; pembinaan; dukungan dan kerja sama dari mitra kerja; dan akses terhadap sumber informasi menjadi faktor penentu dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, sehingga fungsi kinerja pegawai unit pelaksana teknis dapat berjalan dengan optimal.

Hasil pengujian sub hipotesis berikutnya adalah pengaruh pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat, terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat. Dimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang didukung oleh faktor produktivitas atau produksi; efisiensi; kepuasan; dan adaptasi yang baik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan pasar rakyat.

Selanjutnya, terdapat temuan-temuan permasalahan penting yang terdapat dalam penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan variabel Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Komunikasikan (staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut) belum sepenuhnya dapat memahami kebijakan yang disampaikan*, dan (2)*Komunikasikan (staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut) belum dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan*.

Kedua, berkaitan dengan variabel Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sepenuhnya dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung*, dan (2)*Monitoring di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh unsur Pimpinan kepada bawahan*.

Ketiga, berkaitan dengan variabel Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat, yaitu ditemukan permasalahan sebagai berikut: (1)*Tanggapan lembaga terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum direspon dengan baik*, dan (2)*Tanggapan lembaga*

terhadap perubahan eksternal di setiap UPT belum direspon berdasarkan hasil evaluasi semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka implikasi hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap objek atau fenomena penelitian, yaitu walau pun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel mengindikasikan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagaimana butir item sebagaimana yang telah disajikan di atas sebagaimana temuan-temuan permasalahan tersebut yang tentunya berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Pasar Rakyat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Peneliti menyarankan kepada Pimpinan di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut untuk memberikan pengarahan dan pemahaman kepada seluruh staf UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut akan pentingnya memahami kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah, khususnya Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya memahami seluruh kebijakan yang disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, khususnya kebijakan yang berkenaan dengan Pengelolaan Pasar Rakyat.

2. Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman, pimpinan juga seyogyanya memberikan contoh konkrit kepada seluruh unsur staf bagaimana pelaksanaan kebijakan khususnya kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pimpinan selanjutnya tetap memantau kinerja staf sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan, sehingga seluruh proses Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua, Peneliti menyarankan agar Pimpinan membentuk tim yang bertugas memonitor/ mengawasi seluruh proses kinerja staf, agar Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis berjalan dengan optimal khususnya dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pimpinan hendaknya selalu pro-aktif dan partisipatif dalam setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut, sehingga monitoring pimpinan kepada bawahan menjadi sebuah kontrol langsung untuk membimbing kelancaran proses pelaksanaan tugas.
2. Pimpinan dapat juga membentuk tim monitoring yang bekerjasama dengan dinas terkait, seperti BAPEDA, agar tim yang bekerja betul-betul independen yang berfungsi mengawas, mengarahkan, dan mengontrol kinerja pegawai dalam proses pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat.

3. Kegiatan monitoring hendaknya dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Sehingga, hasil kegiatan benar-benar dapat dijamin kualitas dan manfaatnya.

Ketiga, Peneliti menyarankan agar pimpinan dan seluruh staf yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dapat terbuka terhadap situasi yang berkembang, baik yang berasal dari internal maupun eksternal lembaga. Dengan transparansi yang terkontrol iklim organisasi di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut akan menjadi dinamis dan berimbang pada optimalisasi kinerja pegawai dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan pasar rakyat yang menjadi salah satu tugas pokok UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pimpinan seyogyanya harus membuka diri untuk memiliki pemikiran dan karakter terbuka dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan lembaga yang dipimpinnnya, yaitu UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.
2. Keterbukaan pimpinan kemudian ditularkan kepada seluruh staf melalui pendidikan dan latihan (Diklat), agar semua unsur yang bertugas di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut dapat menerima dan merespon segala iklim perubahan yang positif yang berasal dari eksternal organisasi.
3. Respon yang diberikan terhadap perubahan yang berasal dari eksternal organisasi hendaknya diambil berdasarkan hasil evaluasi semua pihak yang terlibat di UPT Disperindag ESDM Kabupaten Garut.

Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, mengingat terdapat beberapa temuan penting pada penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini, maka

diharapkan pada masa mendatang berbagai pihak dapat meneliti lebih lanjut faktor lain dari variabel-variabel penelitian ini. Penelitian lanjutan yang disarankan diantaranya membahas faktor mengenai, manajemen, iklim organisasi, tunjangan pegawai, kepemimpinan, serta komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan di bidang usaha kecil dan menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich dan J.H. Donnelly Jr. 2010. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Jilid VI Edisi 6*. Terjemahan: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Iskandar, Jusman. 2016a. *Perilaku Manusia dalam Kelompok dan Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- , 2016b. *Teori sosial*. Bandung: Puspaga.
- , 2017a. *Indeks dan skala dalam penelitian*. Bandung: Puspaga.
- , 2017b. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan kebijakan publik*. Bandung: Puspaga.
- , 2017c. *Teori dan isu pembangunan*. Bandung: Puspaga.
- , 2017d. *Metode Penelitian Adminitrasi*. Bandung: Puspaga.
- , 2017e. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refka Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarman, Ari. 2009. *Teori Ekonomi Mikro: Edisi Empat Buku 1*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Witjaksono. 2009. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, Dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif)*, Yogyakarta: (CAPS) Center of Academic Publishing Service.
- Yuniarsih, TjuTju dan Suwatno. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Penelitian Ilmiah

- Hasil Penelitian Iqbal Martin (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan judul: *Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)*. *Jurnal Wawasan Juridika*, Vol. 1 (2), pp. 107-138.
- Hasil Penelitian Muhammad Natsir (2017) Pada Institute of the Malay World and Civilization, dengan Judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara*. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, Vol.1 (1), pp. 61-76.
- Hasil Penelitian Abdul Azis, Juliati Saleh, Muhammad Tahir (2017), dengan Judul *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 (2), pp. 128-145.
- Lembaga Penelitian SMERU (2007), dengan judul: *Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia*.
- Hasil Penelitian Wicaksono, Lulud N. (2009) pada Universitas Diponegoro, dengan judul: *Persepsi Pedagang Pasar Terhadap Program Perlindungan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Kota Semarang. Studi Kasus Pedagang Pasar Peterongan Semarang Selatan*.

Dokumen – Dokumen

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-Dag/Per/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/ 2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 784).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa.

Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar.

Rencana Kerja 2016. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 2016. Disperindag Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Garut Dalam Angka, BPS Kabupaten Garut. 2016.

Jawa Barat Dalam Angka, BPS Propinsi Jawa Barat. 2016.